

LAPORAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG,
SERTA CAPAIAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Triwulan III 2024



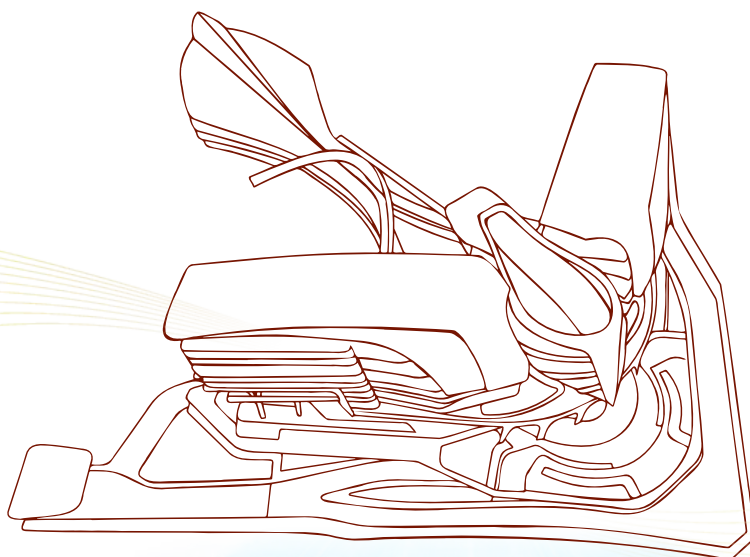
KONSISTENSI, INOVASI, DAN SINERGI

**Memperkuat Transformasi Kebijakan dan Kelembagaan
Memajukan Perekonomian Nasional**

LAPORAN KELEMBAGAAN BANK INDONESIA

PELAKSANAAN FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG,
SERTA CAPAIAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TRIWULAN III 2024



Laporan Kelembagaan Bank Indonesia adalah laporan kinerja kelembagaan yang disusun sebagai pemenuhan kewajiban akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia yang diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

DAFTAR ISI



Kata Pengantar	iv
Ringkasan Eksekutif	viii
BAB 1 Kelembagaan Bank Indonesia	1
1.1. Profil Bank Indonesia	2
1.2. Dewan Gubernur Bank Indonesia	3
1.3. Organisasi Bank Indonesia	10
1.4. Daftar Pemimpin Satuan Kerja Bank Indonesia	14
BAB 2 Prospek dan Tantangan Perekonomian	19
2.1. Perekonomian Global	20
2.2. Perekonomian Domestik	20
2.3. Kelembagaan	23
BAB 3 Respons Kebijakan Bank Indonesia	25
3.1. Stance Kebijakan Bank Indonesia	26
3.2. Respons Bauran Kebijakan Bank Indonesia	26
BAB 4 Transformasi Bank Indonesia	31
4.1. Transformasi Kebijakan	32
BOKS 1. Peluncuran <i>Blueprint</i> Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030	35
BOKS 2. Peluncuran <i>Central Counterparty</i> Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (CCP PUVA)	44
4.2. Transformasi Organisasi dan Proses Kerja	46
4.3. Transformasi SDM dan Budaya Kerja	49
4.4. Transformasi Digital	50

BAB 5	Capaian Kinerja Bank Indonesia Triwulan III 2024	55
PS 01	Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter dan Bauran Kebijakan Bank Indonesia Secara Berkelanjutan, Konsisten, dan Transparan untuk Mencapai Stabilitas Nilai Rupiah dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	56
PS 02	Memperkuat Sinergi Bauran Kebijakan Bank Indonesia dengan Kebijakan Fiskal dan Reformasi Struktural Pemerintah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	58
BOKS 3.	CBFest 2024: <i>Embracing Innovation for the Future of Central Banking Services</i>	61
PS 03	Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan serta Surveilans Makroprudensial untuk Turut Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	63
PS 04	Memperkuat Sinergi Kebijakan serta Pengawasan Makroprudensial dengan KSSK dan Otoritas Terkait untuk Turut Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	64
PS 05	Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Percepatan Ekonomi Keuangan Digital untuk Memelihara Stabilitas Sistem Pembayaran dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	65
BOKS 4.	Festival Rupiah Berdaulat (FERBI) 2024	69
PS 06	Memperkuat Sinergi Kebijakan dan Pengawasan Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan Otoritas Terkait untuk Percepatan Ekonomi dan Keuangan Digital serta Pengelolaan Uang Rupiah dalam rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan	70
PS 07	Mengatur, Mengawasi, dan Mengembangkan Pasar Uang dan Pasar Valas untuk Mendukung Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia serta Memperkuat Sinergi dengan Otoritas Terkait untuk Pengembangan Pasar Keuangan dan Pembiayaan Ekonomi	71
PS 08	Merumuskan Kebijakan dan Melaksanakan Program Bank Indonesia serta Memperkuat Sinergi untuk Meningkatkan Inklusi Ekonomi Keuangan, Keuangan Berkelanjutan, dan Pelindungan Konsumen Baik secara Konvensional maupun Berdasarkan Prinsip Syariah	72
BOKS 5.	Penyelenggaraan FEKDI x KKI 2024	75
PS 09	Merumuskan Kebijakan dan Melaksanakan Kerjasama Internasional dengan Bank Sentral, Organisasi, dan Lembaga Internasional untuk Mendukung Efektivitas Kebijakan Bank Indonesia serta Bersinergi dengan Pemerintah dan Otoritas Lain dalam rangka Memperjuangkan Kepentingan Nasional	78
BOKS 6.	Penguatan Sinergi Dorong Pemanfaatan Mata Uang Lokal	82
PS 10	Merumuskan Kebijakan dan Mengelola Sistem Tata Kelola Kelembagaan yang Baik untuk Memperkuat Kinerja Kelembagaan	83
PS 11	Merumuskan Kebijakan, Mengembangkan, dan Mengelola Proses Kerja, Sumber Daya Manusia, Peraturan dan Ketentuan, serta Laporan dan Komunikasi untuk Menjamin Tercapainya Kinerja Kelembagaan secara Efisien, Profesional, Taat Hukum, Akuntabel, dan Transparan	84
PS 12	Merencanakan, Mengembangkan, dan Mengelola Teknologi dan Inovasi Digital serta Sarana dan Prasarana Kerja untuk Menjamin Tercapainya Kinerja Kelembagaan yang Modern, Produktif dan Efektif	86
Lampiran		89
Daftar Istilah		90
Daftar Singkatan		97

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala (SWT), Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya Bank Indonesia dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Fungsi, Tugas, dan Wewenang serta Capaian Program dan Indikator Kinerja Utama Bank Indonesia periode triwulan III 2024. Laporan Kelembagaan Bank Indonesia ini merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Lebih lanjut, laporan ini disusun sebagai perwujudan komitmen Bank Indonesia untuk menjadi bank sentral yang kredibel dalam mencapai tujuannya secara efektif, efisien, dan taat asas serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pada triwulan III 2024, ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat, di tengah konvergensi kebijakan moneter negara maju. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah mendorong meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Di Amerika Serikat (AS), rilis tingkat pengangguran terkini menunjukkan perbaikan di tengah prospek inflasi yang lebih rendah sehingga mendorong ekspektasi pelaku pasar terhadap penurunan *Fed Funds Rate* (FFR) yang lebih rendah dari prakiraan semula. Tren penurunan suku bunga kebijakan negara maju, khususnya AS diperkirakan tetap berlanjut, meskipun dinamika ketegangan geopolitik perlu terus dicermati. Perkembangan ini memerlukan kehati-hatian dalam merumuskan respons

kebijakan dalam memitigasi dampak rambatan global, termasuk dalam mendorong aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar, guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Meski dihadapkan pada ketidakpastian global yang meningkat, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan perlu terus didorong agar lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2024 didukung oleh investasi yang terus tumbuh, serta konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor yang tetap terjaga. Nilai tukar Rupiah menguat didukung oleh konsistensi bauran kebijakan moneter Bank Indonesia serta meningkatnya aliran masuk modal asing. Inflasi juga tercatat menurun dan terjaga dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter *pro-market*, yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), untuk mendukung penguatan stabilitas nilai tukar Rupiah dan pencapaian sasaran inflasi.

Dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis global dan domestik tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan, bersinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional. Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) September 2024, Bank Indonesia menurunkan BI-Rate sebanyak satu kali sebesar 25bps menjadi 6,00%. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia juga terus

memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk memitigasi dampak rambatan memburuknya risiko global.

Bank Indonesia senantiasa memperkuat agenda transformasi untuk mencapai tujuan sesuai mandat UU P2SK. Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 4 Tahun 2024 tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI). Peraturan ini mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang diperkuat dengan kebijakan pendukung untuk mencapai tujuan Bank Indonesia. Pemenuhan amanat UU P2SK juga dilakukan dengan melanjutkan implementasi *dealer* utama (*primary dealer*) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing untuk mengakselerasi integrasi pengelolaan moneter dengan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing serta didukung dengan penerbitan PBI No. 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Sementara itu, transformasi di area kelembagaan antara lain dilakukan dengan penerbitan PBI No. 8 tahun 2024

tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI), serta memperkuat kapabilitas infrastruktur teknologi pengembangan pusat data dan *artificial intelligent* (AI) dalam rangka mewujudkan Bank Indonesia sebagai *data-driven institution*. Penajaman agenda transformasi tersebut mendukung tercapainya kinerja Bank Indonesia pada triwulan III 2024 sesuai tahapannya.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak sehingga Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas mulia dalam menjaga stabilitas dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kami berharap Laporan Kelembagaan Bank Indonesia triwulan III 2024 dapat menjadi rujukan terpercaya bagi masyarakat dan seluruh pihak terkait dalam menyusun langkah bersama untuk memajukan perekonomian Indonesia. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan keberkahan, kesempurnaan, dan kemudahan bagi setiap langkah kita untuk mewujudkan ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional.

Jakarta, Desember 2024

Gubernur Bank Indonesia

Perry Warjiyo



AIDA S. BUDIMAN
Deputi Gubernur

DONI PRIMANTO JOEWONO
Deputi Gubernur

PERRY WARJIYO
Gubernur



DESTRY DAMAYANTI
Deputi Gubernur Senior

JUDA AGUNG
Deputi Gubernur

FILIANINGSIH HENDARTA
Deputi Gubernur

RINGKASAN EKSEKUTIF

Prospek dan Tantangan Perekonomian

Pada triwulan III 2024, ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat, di tengah konvergensi kebijakan moneter negara maju. Ekonomi global pada 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 3,2% dengan kecenderungan yang melambat. Inflasi global dalam tren penurunan sehingga mendorong konvergensi pelonggaran kebijakan moneter, khususnya di negara maju. Di Amerika Serikat (AS), rilis tingkat pengangguran terkini menunjukkan perbaikan di tengah prospek inflasi yang lebih rendah sehingga mendorong ekspektasi pelaku pasar terhadap penurunan *Fed Funds Rate* (FFR) yang lebih rendah dari prakiraan semula. Ke depan, tren penurunan suku bunga kebijakan negara maju, khususnya AS diperkirakan tetap berlanjut, meskipun dinamika ketegangan geopolitik perlu terus dicermati.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik dan perlu didorong agar lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2024 didukung oleh investasi, khususnya investasi bangunan sejalan dengan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tetap terjaga dan ekspor nonmigas tetap baik sehingga turut menopang pertumbuhan ekonomi. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ditopang oleh Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan Besar dan Eceran. Dengan berbagai perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7%-5,5%. Dari sisi nilai tukar Rupiah, pada akhir triwulan III 2024 tercatat mengalami apresiasi sebesar 8,16% dibandingkan dengan akhir triwulan II 2024. Perkembangan ini lebih baik daripada apresiasi mata uang kawasan, seperti Won Korea, Peso Filipina, dan Yuan China. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 tercatat menurun dan terjaga dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Bank Indonesia terus mengoptimalkan instrumen moneter *pro-market*, yaitu SRBI, SVBI, dan SUVBI untuk mendukung penguatan stabilitas nilai tukar Rupiah dan pencapaian sasaran inflasi. Ketahanan sistem keuangan Indonesia pada

triwulan III 2024 juga terjaga baik, didukung oleh stabilitas sistem pembayaran yang tetap terjaga.

Respons Kebijakan Bank Indonesia

Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Bauran kebijakan Bank Indonesia sepanjang triwulan III 2024 diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan, serta bersinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional. RDG September 2024 memutuskan untuk menurunkan BI-Rate sebesar 25bps menjadi 6,00%. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Di bidang sistem pembayaran, kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

Bank Indonesia juga memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam menjaga stabilitas harga ditempuh melalui program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha. Bank Indonesia juga memperkuat kerja sama internasional pada area kebanksentralan antara lain melalui konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan

mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.

Transformasi Bank Indonesia

Bank Indonesia terus mempertajam agenda transformasi untuk mendukung pencapaian tujuan sebagaimana diamanatkan UU P2SK. Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 4 Tahun 2024 tentang Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI) yang mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang diperkuat dengan kebijakan pendukung, sebagai bagian dari pemenuhan amanat UU P2SK. Transformasi dalam pelaksanaan operasi moneter (OM) salah satunya dilakukan dengan melanjutkan implementasi *dealer* utama (*primary dealer*) di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA) untuk mengakselerasi integrasi pengelolaan moneter dan pengembangan PUVA. Dalam rangka reformasi regulasi di PUVA, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI No. 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Selain itu, Bank Indonesia bersinergi dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perbankan telah meluncurkan *Central Counterparty* (CCP) di pasar uang dan pasar valuta asing, yang diselenggarakan oleh PT Kliring Penjaminan

Efek Indonesia (KPEI) sebagai langkah pembentukan kelembagaan dan pengembangan CCP untuk Transaksi Suku Bunga dan Nilai Tukar. Di area kelembagaan, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI No. 8 tahun 2024 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) dalam rangka memenuhi amanat UU P2SK. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat kapabilitas infrastruktur teknologi untuk mendukung pemanfaatan AI dalam rangka mewujudkan Bank Indonesia sebagai *data-driven institution*.

Capaian Kinerja Bank Indonesia

Di tengah beratnya tantangan perekonomian global dan domestik, serta tuntutan implementasi dari amanat UU P2SK, Bank Indonesia dapat mencapai berbagai target Indikator Kinerja Utama (IKU) pada triwulan III 2024 sesuai tahapannya dan memberikan dampak positif dan bermakna bagi perekonomian Indonesia. Capaian ini menunjukkan efektivitas respons kebijakan Bank Indonesia yang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan lingkungan strategis terkini, didukung oleh penajaman sejumlah agenda transformasi, baik di area kebijakan maupun kelembagaan. Selain itu, penguatan kerangka dan implementasi sistem tata kelola yang baik dan profesional juga ditempuh untuk turut mendukung pencapaian kinerja Bank Indonesia.





BAB 1

Kelembagaan Bank Indonesia

1.1. Profil Bank Indonesia

Status dan Kedudukan

Keberadaan Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia telah diamanatkan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar 1945. Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia memasuki babak baru ketika Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada 17 Mei 1999 yang kemudian beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang berlaku sejak 12 Januari 2023. Undang-undang ini memperkuat status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain.

Dalam menjalankan independensinya, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk mengutamakan prinsip

tata kelola yang baik dan profesional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Sebagai perwujudan dari tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional, Bank Indonesia mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) selama 21 tahun berturut-turut. Hal ini merupakan pembuktian atas komitmen Bank Indonesia untuk mengelola keuangan dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik dan menyajikan laporan keuangan yang relevan, akuntabel, dan transparan. Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Bank Indonesia menyampaikan laporan kinerja kelembagaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Presiden, serta memublikasikannya kepada masyarakat.

Visi

“Menjadi Bank Sentral Digital Terdepan dengan Tata Kelola Kuat, yang Berkontribusi Nyata terhadap Perekonomian Nasional dan Terbaik di antara Negara *Emerging Markets* untuk Indonesia Maju”



Misi

- 01 Mencapai stabilitas nilai Rupiah melalui efektivitas penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 02 Memelihara stabilitas sistem pembayaran melalui penetapan kebijakan, pengaturan, perizinan, penyelenggaraan, pengawasan sistem pembayaran, dan pengelolaan uang Rupiah, termasuk memfasilitasi percepatan ekonomi dan keuangan digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 03 Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan makroprudensial dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
- 04 Turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan Pemerintah pusat dan daerah, otoritas atau lembaga terkait, dan/atau mitra strategis lain, serta kerja sama internasional.
- 05 Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan melalui pengaturan, pengawasan, dan pengembangan pasar uang dan pasar valas, termasuk infrastrukturnya, untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional.
- 06 Turut meningkatkan inklusi ekonomi keuangan dan keuangan berkelanjutan, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, serta perlindungan konsumen melalui perumusan kebijakan dan pelaksanaan program Bank Indonesia.
- 07 Mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan, yang mengutamakan Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia yang baik dan profesional, melalui pengelolaan organisasi dan sumber daya.

Tujuan dan Tugas

Tujuan Bank Indonesia, yang tercantum dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU P2SK, adalah: (i) mencapai stabilitas nilai Rupiah; (ii) memelihara stabilitas Sistem Pembayaran; dan (iii) turut menjaga Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam upaya mencapai tujuan dimaksud, Bank Indonesia diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas: (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan; (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; serta (iii) menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial.

Kebijakan moneter Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga dan memelihara stabilitas nilai Rupiah. Stabilitas nilai Rupiah mencakup kestabilan harga barang dan jasa serta kestabilan nilai tukar Rupiah. Kestabilan harga barang dan jasa secara umum diukur dari inflasi yang rendah dan stabil. Sementara itu, kestabilan nilai tukar Rupiah diukur dari kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai Rupiah dalam artian inflasi yang rendah dan stabil, serta kestabilan nilai tukar Rupiah sangat penting bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menetapkan sasaran inflasi secara eksplisit dan diumumkan secara transparan untuk memberikan sinyal kepada masyarakat dan pelaku pasar mengenai komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat kepercayaan publik.

Dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia memastikan seluruh perangkat pengaturan, lembaga, dan mekanisme pemindahan dana berjalan lancar untuk memenuhi setiap kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Teknologi digital dan inovasi kini telah memungkinkan perkembangan sistem pembayaran yang nyaman, cepat, dan efisien serta membuka lebar peluang inklusivitas ekonomi keuangan. Tren digitalisasi tersebut mempengaruhi sendi-sendi perekonomian, mengubah pola transaksi masyarakat, baik individu maupun korporasi, dan mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional,

tidak terkecuali di sektor keuangan. Hal ini menjadi tantangan kebijakan bagi otoritas, khususnya Bank Indonesia, dalam mencari titik keseimbangan yang tepat antara upaya mengoptimalkan peluang yang diusung oleh inovasi digital dengan upaya untuk memitigasi risiko. Oleh karena itu, Bank Indonesia menginisiasi Visi Sistem Pembayaran Indonesia dan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia 2030 yang diharapkan dapat memberikan arah yang jelas, guna memperoleh manfaat dari digitalisasi dengan tetap menjamin terlaksananya mandat Bank Indonesia dalam pengedaran uang, moneter, dan stabilitas sistem keuangan.

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan; memitigasi dan mengelola risiko sistemik; serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan serta keuangan berkelanjutan. Dengan semakin berkembangnya sistem keuangan, Bank Indonesia terus mengembangkan instrumen-instrumen kebijakan makroprudensial sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia, bersama dengan kebijakan moneter dan kebijakan sistem pembayaran.

1.2. Dewan Gubernur Bank Indonesia

Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas: Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan 4 (empat) hingga 7 (tujuh) Deputy Gubernur. Saat ini Dewan Gubernur Bank Indonesia terdiri atas Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan 4 (empat) orang Deputy Gubernur. Dewan Gubernur Bank Indonesia bersifat *collective collegial*. Dalam memutuskan hal-hal yang bersifat prinsipil dan strategis, Dewan Gubernur melaksanakan Rapat Dewan Gubernur. Rapat Dewan Gubernur merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di Bank Indonesia. Sejalan dengan sifat *collective collegial* dari Dewan Gubernur maka setiap keputusan Rapat Dewan Gubernur mengikat keseluruhan Anggota Dewan Gubernur.



Perry Warjiyo
Gubernur

PERRY WARJIYO menjabat kembali sebagai Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2023 tanggal 5 Mei 2023, dan diambil sumpahnya pada 24 Mei 2023 untuk masa jabatan 2023-2028. Sebelumnya, Perry Warjiyo menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 dan sebagai Deputy Gubernur untuk masa jabatan 2013-2018.

Sebelum menduduki jabatan Deputy Gubernur, Perry Warjiyo menjabat sebagai Asisten Gubernur Bank Indonesia untuk perumusan kebijakan moneter, makroprudensial, dan internasional. Jabatan ini diembannya setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia sejak 2009. Sebelum kembali ke Bank Indonesia pada Juli 2009, Perry Warjiyo menduduki posisi penting selama dua tahun sebagai Direktur Eksekutif di *International Monetary Fund* (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam the *South-East Asia Voting Group* (SEAVG), yang berkedudukan di Washington DC, AS. Perry Warjiyo mempunyai karier yang panjang di Bank Indonesia sejak 1984, khususnya di area riset ekonomi dan kebijakan moneter, isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter, pendidikan dan riset kebanksentralan, pengelolaan devisa, dan utang luar negeri.

Perry Warjiyo saat ini juga menduduki posisi sebagai *Chair of Asian Consultative Council – Bank for International Settlement* (ACC-BIS), *Chairman of Executive Committee*

(EC) - *Islamic Financial Service Board* (IFSB), Ketua Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), dan Ketua Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Selain itu, Perry Warjiyo juga mewakili Bank Indonesia dan Indonesia dalam Keketuaan *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dan *G20 Finance Ministers and Central Bank Governors* (FMCBG) Meeting, serta di *International Monetary Fund* (IMF), ASEAN, ASEAN+3, *Financial Stability Board* (FSB), *Islamic Development Bank* (IsDB), dan *Islamic International Liquidity Management* (IILM). Selama tahun 2020-2022, Perry Warjiyo aktif menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, di samping sebagai dosen tamu pada sejumlah universitas di dalam dan luar negeri.

Perry Warjiyo juga telah menulis dan memublikasikan sejumlah buku, jurnal, dan makalah di bidang ekonomi, moneter, dan isu Internasional. Salah satu bukunya, yaitu *“Central Bank Policy: Theory and Practice”* yang ditulis bersama Dr. Solikin M. Juhro mendapat pengakuan nasional dan internasional sebagai referensi penting dalam perumusan bauran kebijakan bank sentral.

Perry Warjiyo dilahirkan di Sukoharjo pada tahun 1959. Gelar Sarjana diraih dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1982. Gelar Master dan Ph.D. di bidang Moneter dan Keuangan Internasional diperoleh dari *Iowa State University*, AS, masing-masing pada tahun 1989 dan 1991.



Destry Damayanti
Deputi Gubernur Senior

DESTRY DAMAYANTI resmi menjabat Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 untuk periode 2019-2024, dan mengucapkan sumpah jabatan pada 7 Agustus 2019. Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 74/P Tahun 2024 tanggal 10 Juli 2024 Destry Damayanti kembali ditetapkan menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk periode 2024-2029, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 7 Agustus 2024. Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menjabat sebagai Anggota Dewan Komisiner LPS periode 2015-2019. Pada 2020-2024, Destry juga menjabat sebagai Anggota Dewan Komisiner (*ex-officio*) Bank Indonesia pada LPS.

Destry Damayanti mengawali kariernya sebagai peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis - Universitas Indonesia pada tahun 1987-1990. Selanjutnya, Destry Damayanti bekerja di Kementerian Keuangan selama periode 1992-1997. Pada tahun 1997-2000, Destry

Damayanti menjadi ekonom di Citibank yang kemudian diteruskan menjadi *Senior Economic Advisor* Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada tahun 2000 - 2003. Kariernya sebagai ekonom berlanjut sebagai Kepala Ekonom di Mandiri Sekuritas dan Bank Mandiri selama periode 2005-2015 dan sekaligus sebagai Direktur Eksekutif untuk Mandiri Institute.

Selama tahun 2014 - 2015, Destry juga menjabat sebagai Ketua *Task Force* Ketahanan Ekonomi pada Kementerian BUMN. Pada tahun 2015, Destry Damayanti dipercaya oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Ketua Tim Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2015-2019.

Destry Damayanti dilahirkan di Jakarta pada tahun 1963. Gelar Sarjana Ekonomi diraihinya dari Universitas Indonesia dan gelar Master of Science pada *Field of Regional Science* diraihinya dari *Cornell University*, New York, AS, pada tahun 1992.



Doni Primanto Joewono
Deputi Gubernur

DONI PRIMANTO JOEWONO menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 11 Agustus 2020. Selain itu, Doni Primanto Joewono juga dilantik menjadi Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (*Ex-Officio*) Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 51/P Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022 dan mengucapkan sumpah jabatan pada 20 Juli 2022

Doni Primanto Joewono memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1991 di Departemen Pengelolaan Moneter dan banyak terlibat dalam membangun sistem pengelolaan moneter, termasuk mempersiapkan terbitnya Obligasi Pemerintah, dan membangun sistem pelaporan Lalu Lintas Devisa. Doni Primanto Joewono pernah ditugaskan sebagai Peneliti Ekonomi Senior (Deputi Direktur) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia London (2005-2008). Kariernya berlanjut dengan memimpin beberapa Kantor Perwakilan Bank Indonesia di daerah, dimulai di Solo, kemudian di Provinsi DKI Jakarta, dan terakhir di Provinsi Jawa Barat. Selama kariernya di daerah, Doni Primanto Joewono bersama kepala daerah setempat pernah mendapat penghargaan sebagai TPID terbaik, yaitu saat di Solo (2012) dan DKI Jakarta (2017), serta banyak menginisiasi berbagai kegiatan

untuk mendorong investasi daerah dan pemberdayaan ekonomi pondok pesantren. Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono mengemban tugas sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2020.

Selama perjalanan kariernya di Bank Indonesia, Doni Primanto Joewono aktif memimpin dan memberdayakan organisasi, yaitu sebagai Ketua Keluarga Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS periode 2016-2021 dan terpilih kembali untuk periode 2021-2026, serta menjadi Wakil Ketua Ikatan Alumni UNS (2021-2024).

Doni Primanto Joewono lahir di Surabaya pada tahun 1965. Pendidikan formalnya ditempuh pada bidang Ekonomi Studi Pembangunan di Universitas Sebelas Maret (UNS) pada tahun 1988 untuk gelar Sarjana, serta bidang Administrasi dan Pengembangan SDM di Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2004 untuk gelar Magister. Doni Primanto Joewono mengikuti program kepemimpinan tertinggi di Bank Indonesia - SESPIBI pada tahun 2012 dan Program Pendidikan LEMHANNAS pada tahun 2018 serta beragam program eksekutif kepemimpinan dan pengembangan kompetensi moneter dan pasar keuangan di beberapa lembaga internasional (antara lain IMF dan SEACEN).



Juda Agung
Deputi Gubernur

JUDA AGUNG menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan masa jabatan sampai tahun 2027.

Memulai karier di Bank Indonesia pada tahun 1991, Junda Agung memiliki pengalaman yang panjang melalui sejumlah penugasan, mulai dari bidang kebijakan moneter, makroprudensial, dan manajemen strategis, hingga Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Junda Agung menjabat sebagai Asisten Gubernur yang membawahi stabilitas sistem keuangan dan kebijakan makroprudensial di Bank Indonesia. Jabatan tersebut diembannya setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Eksekutif di *International Monetary Fund* (IMF), mewakili 13 negara anggota yang tergabung dalam the

South-East Asia Voting Group (SEAVG), berkedudukan di Washington DC, AS.

Sebagai ekonom, Junda Agung telah memublikasikan sejumlah artikel di bidang moneter, finansial, dan perbankan pada berbagai jurnal internasional, antara lain *Applied Economics* dan *Review of International Economics*. Salah satu publikasi yang baru saja diterbitkan oleh Junda Agung adalah buku "Kebijakan Makroprudensial di Indonesia: Konsep, Kerangka, dan Implementasi."

Junda Agung lahir di Pontianak pada tahun 1964. Setelah menempuh pendidikan pada bidang Teknologi Pertanian di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Junda Agung melanjutkan pendidikan di University of Birmingham dan mendapatkan gelar Master di bidang *Money Banking and Finance* pada tahun 1995. Junda Agung kemudian melanjutkan pendidikan di *University of Birmingham* dan mendapatkan gelar Ph.D. di bidang *Economics* pada tahun 1999.



Aida S. Budiman
Deputi Gubernur

AIDA S. BUDIMAN resmi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan masa jabatan sampai tahun 2027. Selain itu, Aida S. Budiman juga dilantik menjadi Anggota Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (*Ex-Officio*) Bank Indonesia masa jabatan 2024 hingga 2025, berdasarkan Keputusan Presiden RI No.101/P Tahun 2024 tanggal 11 September 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisiner LPS.

Memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1991, sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman menjabat sebagai Asisten Gubernur yang membawahi kebijakan strategis di sektor moneter, mengoordinasikan bauran kebijakan Bank Indonesia dan sinergi dengan bauran kebijakan nasional selama periode 2020-2022. Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) periode 2018-2022 dan juga Kepala Departemen Internasional periode 2014-2018. Selama memimpin DKEM, Aida S. Budiman berperan dalam penguatan kerangka bauran kebijakan Bank Indonesia, perumusan sektor prioritas untuk mendukung pemulihan

ekonomi nasional, penguatan peran kantor perwakilan Bank Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, serta penguatan peran digitalisasi UMKM pangan dalam mendukung stabilisasi harga.

Aida S. Budiman juga aktif terlibat di berbagai keanggotaan baik pada forum lintas kementerian dan/atau lembaga maupun dalam organisasi profesional, serta mengajar di berbagai diklat Bank Indonesia dan Sesmenlu. Di kancah internasional, Aida S. Budiman sering mewakili Bank Indonesia dalam berbagai sidang internasional dan *working group* untuk perumusan kebijakan internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral, serta pernah bertugas sebagai *Alternate Executive Director* (AED) SEAVG, IMF Washington DC, AS.

Aida S. Budiman lahir di Bogor pada tahun 1965. Setelah menempuh pendidikan pada bidang Sosial-Ekonomi Pertanian Agribisnis di Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987, Aida S. Budiman melanjutkan pendidikan di *University of Southern California* dan mendapatkan gelar Master di bidang *Economics* pada tahun 1996. Aida S. Budiman kemudian melanjutkan pendidikan di *Claremont Graduate University* dan mendapat gelar Ph.D. di bidang *Economics* pada tahun 2001.



Filianingsih Hendarta

Deputi Gubernur

FILIANINGSIH HENDARTA ditetapkan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21/P Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023, dan diambil sumpahnya pada 18 April 2023 untuk masa jabatan 2023-2028.

Filianingsih Hendarta memulai kariernya di Bank Indonesia pada tahun 1986. Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur, Filianingsih berperan sebagai Asisten Gubernur bidang sistem pembayaran yang memimpin transformasi sistem pembayaran nasional. Filianingsih merupakan figur kunci dalam peluncuran Proyek Garuda, yang mengawali eksplorasi desain *Central Bank Digital Currency* (CBDC) Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Rupiah Digital. Filianingsih juga memimpin implementasi *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*, yang bertujuan untuk mempercepat transformasi dan integrasi ekonomi serta keuangan digital guna meningkatkan inklusi ekonomi dan keuangan di Indonesia.

Dengan pengalaman lebih dari 36 tahun di hampir seluruh sektor di Bank Indonesia, Filianingsih telah memimpin berbagai proyek berskala nasional dan internasional, serta mewakili Bank Indonesia di berbagai forum internasional. Atas dedikasi dan prestasinya, ia dipercaya menduduki beberapa posisi strategis, termasuk Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (2019–2023), Kepala

Departemen Kebijakan Makroprudensial (2015–2019), serta Kepala Departemen Pengelolaan Moneter (2013–2015).

Filianingsih Hendarta terlibat aktif dalam berbagai forum lintas kementerian dan lembaga di tingkat domestik maupun internasional. Filianingsih Hendarta berperan dalam berbagai forum, antara lain Penyusunan Regulasi dan Keuangan Digital dan Elektronifikasi Lintas Kementerian/Lembaga, serta berbagai komite internal Bank Indonesia. Di kancah internasional, Filianingsih Hendarta acapkali mewakili Bank Indonesia dalam berbagai fora, seperti G20, BIS, FSB, IMF, World Bank, ECB, dan EMEAP.

Filianingsih Hendarta lahir di Surabaya pada tahun 1963. Setelah menempuh pendidikan pada bidang Hukum di Universitas Airlangga, Filianingsih Hendarta melanjutkan pendidikan di *Boston University* dan mendapatkan gelar *Master of Business Administration (Economics and Finance)* pada tahun 1992. Filianingsih Hendarta juga pernah aktif terlibat sebagai pengurus pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) *Focus Group Moneter dan Makroprudensial* pada tahun 2018 – 2021. Saat ini, Filianingsih Hendarta menjabat sebagai Wakil Ketua 1 – Dewan Kehormatan Pengurus Ikatan Alumni Universitas Airlangga periode tahun 2021–2025.

1.3. Organisasi Bank Indonesia

Struktur Organisasi Bank Indonesia

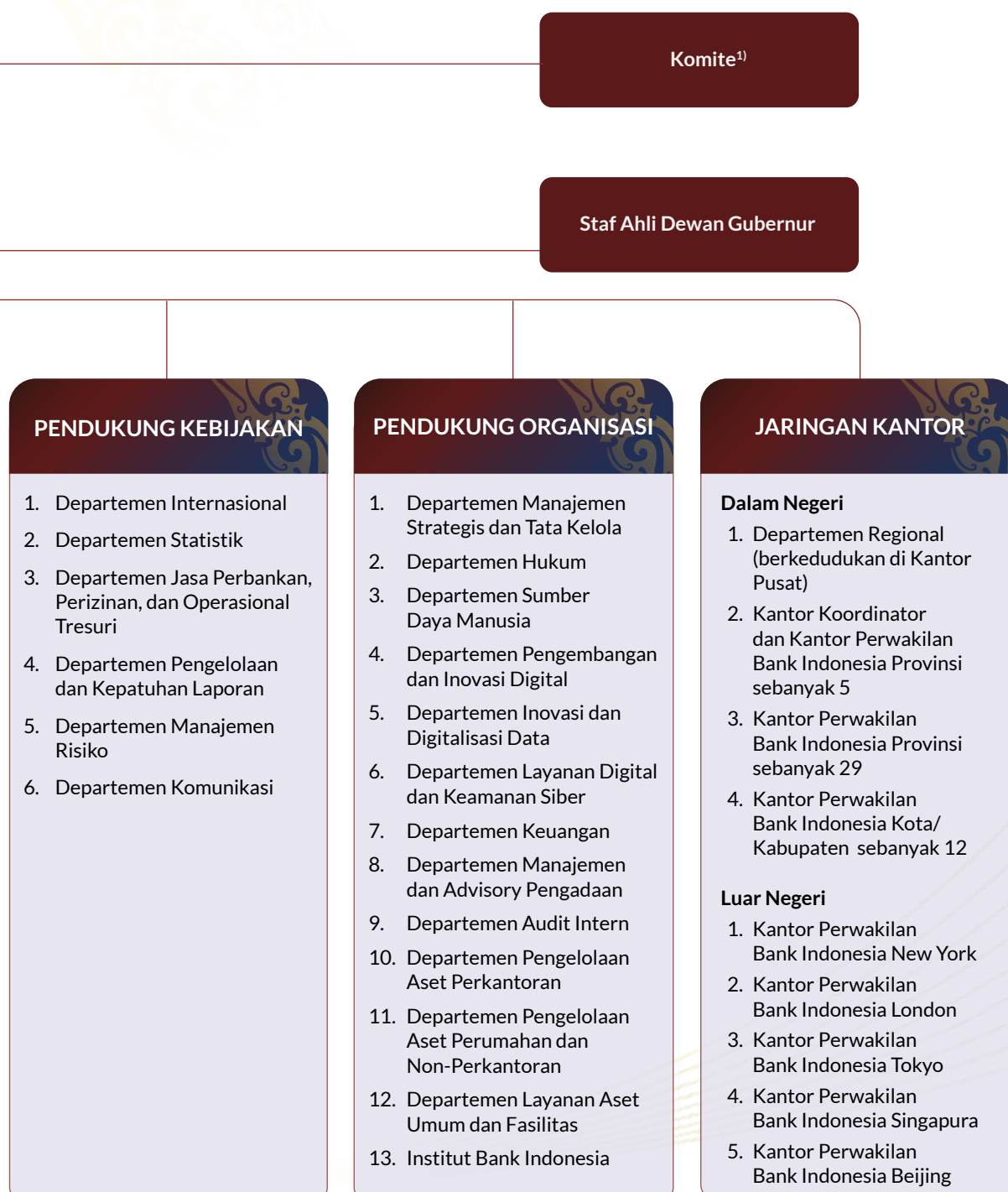
Per September 2024



Keterangan:

¹⁾ Komite adalah organ pendukung pengambilan keputusan yang bertanggung jawab melakukan perumusan rekomendasi kebijakan prinsipil dan strategis yang akan diputuskan dalam Rapat Dewan Gubernur

²⁾ Satuan Kerja khusus yang bersifat sementara



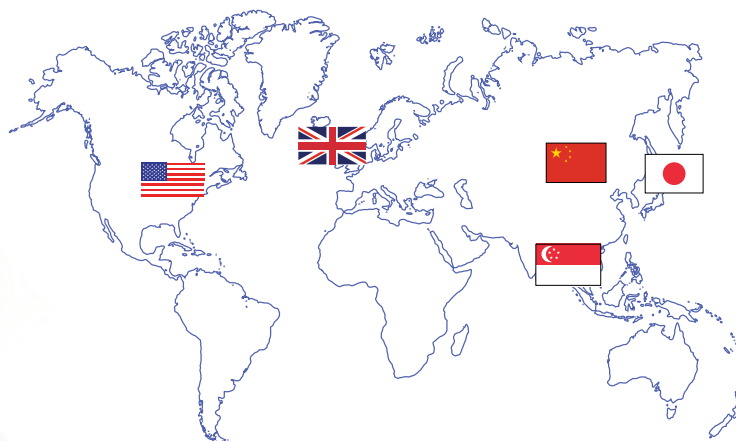
Sebaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI)

Per September 2024



KPw BI Luar Negeri

- KPw BI London
- KPw BI New York
- KPw BI Singapura
- KPw BI Tokyo
- KPw BI Beijing



Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Gorontalo

Provinsi Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Tenggara

Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Maluku Utara

Provinsi Maluku

Provinsi Papua Barat

Provinsi Papua

WILAYAH SULAMPUA

WILAYAH BALI NUSTRA

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Bali

- KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Barat
- KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Sulawesi Selatan

- KPw BI Provinsi Sulawesi Utara
- KPw BI Provinsi Sulawesi Tengah
- KPw BI Provinsi Papua
- KPw BI Provinsi Maluku
- KPw BI Provinsi Sulawesi Tenggara
- KPw BI Provinsi Gorontalo
- KPw BI Provinsi Sulawesi Barat
- KPw BI Provinsi Maluku Utara
- KPw BI Provinsi Papua Barat

1.4. Daftar Pemimpin Satuan Kerja Bank Indonesia

Per September 2024

KANTOR PUSAT BANK INDONESIA

MONETER

FIRMAN MOCHTAR	Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
EDI SUSIANTO	Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas
RAHMATULLAH	Departemen Pengelolaan Devisa
DONNY HUTABARAT	Departemen Pengembangan Pasar Keuangan
IMAM HARTONO	Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah

MAKROPRUDENSIAL

SOLIKIN M. JUHRO	Departemen Kebijakan Makroprudensial
Y. BUDIATMAKA	Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market
ANTON DARYONO	Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen
ANASTUTY K.	Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau

SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH

DICKY KARTIKOYONO	Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
IDA NURYANTI	Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
MARLISON HAKIM	Departemen Pengelolaan Uang
YUDI HARYMUKTI	Unit Khusus Pembangunan Sentra Pengelolaan Uang, <i>Data Center</i> , dan <i>Business Resumption Site</i>

PENDUKUNG KEBIJAKAN

RUDY BRANDO HUTABARAT	Departemen Internasional
RIZA TYAS U. H.	Departemen Statistik
HERAWANTO	Departemen Jasa Perbankan, Perizinan dan Operasional Tresuri
TEDDY PIRNGADI	Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
DWITYAPOETRA S. BESAR	Departemen Manajemen Risiko
ERWIN HARYONO	Departemen Komunikasi

PENDUKUNG ORGANISASI

DODDY ZULVERDI	Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola
IMAM SUBARCAH	Departemen Hukum
M. ANWAR BASHORI	Departemen Sumber Daya Manusia
ENDANG TRIANTI	Departemen Pengembangan dan Inovasi Digital
DIAH ROSDIANA	Departemen Inovasi dan Digitalisasi Data
RETNO PONCO WINDARTI	Departemen Layanan Digital dan Keamanan Siber

RIKA S. DEWI	Departemen Keuangan
HARUM SETIAWATI	Departemen Manajemen dan Advisory Pengadaan
FERRY B. TAMPUBOLON	Departemen Audit Intern
BUDIYONO	Departemen Pengelolaan Aset Perkantoran
HILMAN TISNAWAN	Departemen Pengelolaan Aset Perumahan dan Non Perkantoran
ERNA WIJAYANTI	Departemen Layanan Aset Umum dan Fasilitas
YOGA AFFANDI	Institut Bank Indonesia

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA (KPW BI) DALAM NEGERI

ARIEF HARTAWAN	Departemen Regional
I GEDE PUTU WIRA K.	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Sumatera Utara
ERWIN GUNAWAN HUTAPEA	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Jawa Timur
R. ERWIN SOERADIMADJA	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Bali
FADJAR MAJARDI	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Kalimantan Selatan
RIZKI ERNADI WIMANDA	Kantor Koordinator dan KPw BI Provinsi Sulawesi Selatan
RONY WIDIJARTO P.	KPw BI Provinsi Aceh
MOHAMAD ABDUL MAJID IKRAM	KPw BI Provinsi Sumatera Barat
PANJI ACHMAD	KPw BI Provinsi Riau
WARSONO	KPw BI Provinsi Jambi
RICKY PERDANA GOZALI	KPw BI Provinsi Sumatera Selatan
WAHYU YUWANA HIDAYAT	KPw BI Provinsi Bengkulu
JUNANTO HERDIAWAN	KPw BI Provinsi Lampung
ROMMY SARIU TAMAWIWY	KPw BI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
SURYONO	KPw BI Provinsi Kepulauan Riau
ARLYANA ABUBAKAR	KPw BI Provinsi DKI Jakarta
MUHAMAD NUR	KPw BI Provinsi Jawa Barat
RAHMAT DWISAPUTRA	KPw BI Provinsi Jawa Tengah
IBRAHIM	KPw BI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
AMERIZA MA'RUF MUSA	KPw BI Provinsi Banten
BERRY A. HARAHAHAP	KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Barat
AGUS SISTYO WIDJAJATI	KPw BI Provinsi Nusa Tenggara Timur

N. A. ANGGINI SARI	KPw BI Provinsi Kalimantan Barat
YULIANSAH ANDRIAS	KPw BI Provinsi Kalimantan Tengah
BUDI WIDIHARTANTO	KPw BI Provinsi Kalimantan Timur
WAHYU INDRA SUKMA	KPw BI Provinsi Kalimantan Utara
ANDRY PRASMUKO	KPw BI Provinsi Sulawesi Utara
RONY HARTAWAN	KPw BI Provinsi Sulawesi Tengah
DONI SEPTADIJAYA	KPw BI Provinsi Sulawesi Tenggara
DIAN NUGRAHA	KPw BI Provinsi Gorontalo
GUNAWAN PURBOWO	KPw BI Provinsi Sulawesi Barat
RAWINDRA ARDIANSAH	KPw BI Provinsi Maluku
DWI PUTRA INDRAWAN	KPw BI Provinsi Maluku Utara
FATURACHMAN	KPw BI Provinsi Papua
SETIAN	KPw BI Provinsi Papua Barat
PRABU DEWANTO	KPw BI Lhokseumawe
MUQOROBIN	KPw BI Pematang Siantar
RIZA PUTERA	KPw BI Sibolga
ANTON PITONO	KPw BI Cirebon
LAURA RULIDA EKA SARI P.	KPw BI Tasikmalaya
MARWADI	KPw BI Tegal
CHRISTOVENY	KPw BI Purwokerto
DWIYANTO CAHYO SUMIRAT	KPw BI Solo
YAYAT CADARAJAT	KPw BI Kediri
GUNAWAN	KPw BI Jember
FEBRINA	KPw BI Malang
ROBI ARIADI	KPw BI Balikpapan

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA (KPW BI) LUAR NEGERI

WAHYU AGUNG NUGROHO	KPw BI New York
FARIDA PERANGINANGIN	KPw BI London
IMADUDDIN SAHABAT	KPw BI Tokyo
WIDI AGUSTIN S.	KPw BI Singapura
TUTUK S.H. CAHYONO	KPw BI Beijing







BAB 2

Prospek dan Tantangan Perekonomian

2.1. Perekonomian Global

Ketidakpastian pasar keuangan global kembali meningkat, di tengah konvergensi kebijakan moneter negara maju. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah mendorong meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Di bidang ekonomi, pertumbuhan dunia pada 2024 diperkirakan tumbuh sebesar 3,2% dengan kecenderungan yang melambat. Inflasi global dalam tren penurunan sehingga mendorong konvergensi pelonggaran kebijakan moneter, khususnya di negara-negara maju. Di Amerika Serikat (AS), rilis tingkat pengangguran terkini menunjukkan perbaikan di tengah prospek inflasi yang lebih rendah sehingga mendorong ekspektasi pelaku pasar terhadap penurunan *Fed Funds Rate* (FFR) yang lebih rendah dari prakiraan semula. Perubahan ekspektasi penurunan FFR yang tidak sebesar sebelumnya menyebabkan kenaikan yield US Treasury tenor 2 dan 10 tahun dan indeks dolar AS (DXY).

Ke depan, tren penurunan suku bunga kebijakan negara maju, khususnya AS diperkirakan tetap berlanjut, meskipun dinamika ketegangan geopolitik perlu terus dicermati. Perkembangan ini memerlukan kehati-hatian dalam merumuskan respons kebijakan dalam memitigasi dampak rambatan global, termasuk dalam mendorong aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar, guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

2.2. Perekonomian Domestik

Ekonomi Indonesia tetap tumbuh baik dan perlu terus didorong agar lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi triwulan III 2024 didukung oleh permintaan domestik. Investasi tetap kuat, khususnya investasi bangunan sejalan dengan penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Konsumsi rumah tangga, khususnya kelas menengah ke atas, tetap terjaga. Ekspor nonmigas tumbuh positif di tengah perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan ditopang oleh Industri Pengolahan, Konstruksi, dan Perdagangan Besar dan Eceran. Secara spasial, kinerja ekonomi terjaga di seluruh wilayah. Pada triwulan IV 2024, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik ditopang terutama oleh kenaikan investasi dan baiknya konsumsi rumah tangga, serta peningkatan belanja Pemerintah pada akhir tahun. Secara keseluruhan tahun, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi 2024 berada dalam kisaran 4,7%-5,5% dan akan meningkat pada 2025. Ke depan, berbagai upaya perlu terus ditempuh untuk mendorong pertumbuhan,

baik dari sisi permintaan maupun dari sisi penawaran. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih tinggi, bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal Pemerintah. Dari sisi penawaran, kebijakan reformasi struktural perlu terus diperkuat untuk mendorong sektor ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja. Upaya tersebut didukung dengan optimalisasi stimulus kebijakan makroprudensial dan akselerasi digitalisasi transaksi pembayaran yang ditempuh Bank Indonesia.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tetap sehat dan mendukung terjaganya stabilitas eksternal. Kinerja NPI pada triwulan III 2024 mencatat surplus sebesar 5,9 miliar dolar AS, ditopang surplus neraca perdagangan nonmigas, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Aliran masuk investasi portofolio terus berlanjut dan tercatat tinggi pada triwulan III 2024 yakni *net inflows* sebesar 11,6 miliar dolar AS (qtd). *Net inflows* investasi portofolio berlanjut pada triwulan IV 2024 yang hingga 14 Oktober 2024, tercatat sebesar 0,6 miliar dolar AS (qtd). Posisi cadangan devisa Indonesia akhir September 2024 tercatat tinggi, sebesar 149,9 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,6 bulan impor atau 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Untuk keseluruhan 2024, NPI diperkirakan lebih baik dari proyeksi sebelumnya seiring dengan peningkatan surplus neraca transaksi modal dan finansial didukung oleh berlanjutnya peningkatan aliran masuk modal asing, sejalan dengan imbal hasil investasi yang tetap menarik. Sementara itu, defisit transaksi berjalan terjaga dalam kisaran rendah sebesar 0,1% sampai dengan 0,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada 2025, NPI diperkirakan akan tetap baik didukung oleh prospek perekonomian domestik yang meningkat dan defisit transaksi berjalan yang terjaga.

Nilai tukar Rupiah menguat didukung oleh konsistensi bauran kebijakan moneter Bank Indonesia serta meningkatnya aliran masuk modal asing. Nilai tukar Rupiah pada akhir triwulan III 2024 tercatat mengalami apresiasi sebesar 8,16% dibandingkan dengan akhir triwulan II 2024. Perkembangan ini lebih baik daripada apresiasi mata uang kawasan, seperti Won Korea, Peso Filipina, dan Yuan China masing-masing sebesar 5,37%, 4,58%, dan 3,65%. Perkembangan terkini, nilai tukar Rupiah pada Oktober 2024 (hingga 15 Oktober 2024) melemah sebesar 2,82% (ptp) dari bulan sebelumnya. Pelemahan nilai tukar tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan ketidakpastian global akibat eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Namun demikian,

apabila dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, nilai tukar Rupiah terdepresiasi hanya sebesar 1,17%, lebih baik daripada pelemahan Peso Filipina, Dollar Taiwan, dan Won Korea yang masing-masing terdepresiasi sebesar 4,25%, 4,58%, dan 5,62%. Ke depan, nilai tukar Rupiah diperkirakan stabil sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian. Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter (OM) *pro-market* melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI, untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk modal asing dan mendukung penguatan nilai tukar Rupiah.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada September 2024 menurun dan terjaga dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Inflasi IHK tercatat rendah di seluruh komponen sehingga mencapai 1,84% *Year on Year* (yoy) pada September 2024, lebih rendah daripada inflasi pada Juni 2024 sebesar 2,51%. Perkembangan ini dipengaruhi oleh rendahnya inflasi inti dan menurunnya *volatile food* (VF). Inflasi inti tercatat sebesar 2,09% (yoy), sementara inflasi VF terus menurun menjadi 1,43% (yoy). Penurunan inflasi VF didukung oleh peningkatan pasokan pangan seiring berlanjutnya musim panen, eratnya sinergi pengendalian inflasi TPIP/TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), dan pengaruh *base effect* harga pangan. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK tetap terkendali dalam sasarnya. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi VF diperkirakan terkendali didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat dan Daerah. Bank Indonesia terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, dengan tetap mendukung upaya penguatan pertumbuhan ekonomi.

Instrumen moneter *pro-market*, yaitu SRBI, SVBI, dan SUVBI terus dioptimalkan untuk mendukung penguatan stabilitas nilai tukar Rupiah dan pencapaian sasaran inflasi. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk mempercepat upaya pendalaman pasar uang dan pasar valas serta mendorong aliran masuk modal asing ke dalam negeri. Hingga 30 September 2024, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar

Rp927,61 triliun, 3,25 miliar dolar AS, dan 230 juta dolar AS. Penerbitan SRBI telah mendukung upaya peningkatan aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri dan penguatan nilai tukar Rupiah. Kepemilikan nonresiden dalam SRBI mencapai Rp254,22 triliun (26,13% dari total *outstanding*). Implementasi *Primary Dealer* (PD) sejak Mei 2024 juga semakin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan *repurchase agreement* (repo) antarpelaku pasar, sehingga memperkuat efektivitas instrumen moneter dalam stabilisasi nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi. Ke depan, Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai inovasi instrumen *pro-market*, baik dari sisi volume maupun sisi daya tarik imbal hasil, dan didukung kondisi fundamental ekonomi domestik yang kuat, untuk mendorong berlanjutnya aliran masuk portofolio asing ke pasar keuangan domestik.

Transmisi kebijakan moneter berjalan baik. Suku bunga pasar uang (IndONIA) bergerak di sekitar BI-Rate, yaitu 6,17% pada 30 September 2024. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan pada tanggal 27 September 2024 tercatat masing-masing 6,69%, 6,78%, dan 6,80%, tetap menarik untuk mendukung aliran masuk modal asing. Imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 2 tahun dan tenor 10 tahun, per 30 September 2024, menurun masing-masing menjadi 6,32% dan 6,45%. Sementara itu, likuiditas perbankan memadai sejalan dengan implementasi bauran kebijakan Bank Indonesia, termasuk Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Likuiditas yang memadai serta efisiensi perbankan dalam pembentukan suku bunga yang semakin baik melalui penerapan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), berdampak positif pada suku bunga perbankan yang tetap terjaga. Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada September 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,75% dan 9,2%, relatif stabil dibandingkan dengan level bulan sebelumnya.

Pertumbuhan kredit pada September 2024 tetap kuat, mencapai 10,85% (yoy). Dari sisi penawaran, kuatnya pertumbuhan kredit didukung oleh minat penyaluran kredit yang terjaga, berlanjutnya realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, dan dukungan KLM Bank Indonesia. Hingga minggu keempat September 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp256,45 triliun, yaitu kepada kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp119 triliun, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp110,2 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp24,6 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp2,7 triliun. Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Hilirisasi Minerba dan Pangan, UMKM,



Press Conference Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Tahun 2024 di Jakarta

Sektor Otomotif, Perdagangan dan Listrik, Gas dan Air (LGA), serta sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga. Secara sektoral, pertumbuhan kredit pada mayoritas sektor ekonomi tetap kuat, terutama pada sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, Industri, Pertambangan, dan Pengangkutan. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit investasi, masing-masing sebesar 10,01% (yoy), 10,88% (yoy), dan 12,26% (yoy) pada September 2024. Pembiayaan syariah tumbuh sebesar 11,37% (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh 5,04% (yoy), membaik dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ke depan, pertumbuhan kredit untuk keseluruhan 2024 diperkirakan tetap berada pada kisaran 10-12%.

Ketahanan sistem keuangan terjaga baik. Likuiditas perbankan tetap memadai, tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) pada September 2024 yang tinggi sebesar 25,40%. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan pada Agustus 2024 tercatat sebesar 26,69% dan tergolong kuat dalam menyerap risiko serta mendukung pertumbuhan kredit. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) perbankan pada Agustus 2024 terjaga rendah, sebesar 2,26% (bruto) dan 0,78% (neto). Ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga, sebagaimana hasil *stress test* perbankan terkini. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi

kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan III 2024 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Dari sisi nilai besar, transaksi BI-RTGS meningkat 16,0% (yoy) sehingga mencapai Rp 45.252 triliun. Dari sisi ritel, volume transaksi BI-FAST tumbuh 61,10% (yoy) sehingga mencapai 924,89 juta transaksi. Transaksi *digital banking* tercatat 5.666,28 juta transaksi atau tumbuh sebesar 34,43% (yoy), sementara transaksi Uang Elektronik (UE) tumbuh 29,11% (yoy) sehingga mencapai 4.001,11 juta transaksi. Transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM/D turun 8,59% (yoy) menjadi 1.738,53 juta transaksi. Transaksi kartu kredit tumbuh 14,84% (yoy) mencapai 116,97 juta transaksi. Transaksi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) tumbuh pesat sebesar 209,61% (yoy), dengan jumlah pengguna mencapai 53,3 juta dan jumlah *merchant* 34,23 juta. Sementara dari pengelolaan uang Rupiah, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 9,96% (yoy) sehingga menjadi Rp 1.057,4 triliun.

Stabilitas sistem pembayaran tetap terjaga, ditopang oleh infrastruktur yang berdaya tahan dan interkoneksi sistem pembayaran yang meningkat. Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI) tetap terjaga dengan baik. Dari sisi struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran dan perluasan ekosistem ekonomi keuangan digital (EKD) terus meningkat. Transaksi pembayaran

berbasis Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) juga meningkat sejalan adopsi SNAP yang meluas. Bank Indonesia senantiasa menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, Terpencil (3T).

2.3. Kelembagaan

Tantangan global dan domestik yang masih mengemuka, termasuk isu siklus ekonomi dan potensi kerentanan sektor keuangan, akselerasi megatren digital, serta berbagai isu dari sisi politik dan hukum, menghadirkan tantangan yang perlu terus dicermati. Sejalan dengan lingkungan strategis eksternal dan tuntutan *stakeholder* yang semakin tinggi terhadap Bank Indonesia sebagai implikasi dari penguatan mandat dalam UU P2SK, terdapat beberapa tantangan terkait pengelolaan kelembagaan Bank Indonesia yang perlu diperhatikan dalam upaya mewujudkan kelembagaan yang bertata kelola secara baik dan profesional. Tantangan pada area kelembagaan dimaksud antara lain mencakup aspek pengembangan SDM, *streamlining* proses bisnis, dan penguatan organisasi dalam rangka mendukung bauran kebijakan Bank Indonesia. Di samping itu, terdapat tantangan dalam pengelolaan *external institution* dimana Bank Indonesia akan terus mengupayakan pemenuhan mandat transparansi untuk meminimalisasi potensi terjadinya asimetri perspektif antara Bank Indonesia dan publik terhadap kebijakan dan pelaksanaan tugas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Di tengah tuntutan terhadap peningkatan peran bank sentral yang semakin besar, kompleks, dan dinamis, penerbitan UU P2SK menjadi tonggak reformasi di sektor keuangan untuk menjawab tuntutan tersebut. Tujuan penerbitan UU P2SK adalah untuk meningkatkan

kontribusi sektor keuangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Penerbitan UU P2SK memperkuat landasan hukum bagi mandat, kebijakan, dan kelembagaan Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mengawal perekonomian nasional. UU P2SK mempertegas tujuan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan, serta perluasan mandat terkait dukungan kebijakan Bank Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam UU P2SK juga diatur penguatan kewenangan Bank Indonesia guna mendukung pelaksanaan tugas tersebut, antara lain dalam pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, inklusi ekonomi, inklusi keuangan dan keuangan berkelanjutan, serta inovasi teknologi sistem keuangan, termasuk dalam kaitannya dengan perkembangan aset kripto. Selain itu, UU P2SK juga semakin menegaskan pentingnya penerapan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional serta dukungan kelembagaan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia dimaksud.

Selanjutnya, di tengah *polarized* dan *digitalized modern world*, serta pergeseran demografi yang semakin nyata, transformasi perlu diperkuat untuk menjaga kredibilitas kebijakan dan kelembagaan dalam mewujudkan visi Bank Indonesia. Digitalisasi juga dibutuhkan dalam rangka membangun ekosistem proses kerja di Bank Indonesia antara lain untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan kapabilitas infrastruktur teknologi untuk memitigasi risiko siber yang semakin tinggi. Untuk itu, transformasi digital Bank Indonesia dilakukan melalui adopsi teknologi digital terkini dalam rangka mendukung pelaksanaan transformasi Bank Indonesia secara keseluruhan guna mencapai visi menjadi bank sentral digital terdepan.



Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo



BAB 3

Respons Kebijakan Bank Indonesia



Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulanan di Jakarta

3.1. Stance Kebijakan Bank Indonesia

Bauran kebijakan Bank Indonesia selama tahun 2024 diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan, bersinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional. Dalam kaitan ini, hingga Agustus 2024, kebijakan moneter difokuskan pada menjaga stabilitas (*pro-stability*), baik dari sisi pengendalian inflasi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Pemerintah yaitu $2,5 \pm 1\%$ pada 2024 dan 2025, maupun dari sisi stabilitas nilai tukar Rupiah. Sejak September 2024, kebijakan moneter mulai diseimbangkan untuk menjaga stabilitas (*pro-stability*) dan mendorong pertumbuhan (*pro-growth*). Sementara itu, keempat kebijakan lain, yaitu kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, dan ekonomi keuangan inklusif dan hijau, tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*).

3.2. Respons Bauran Kebijakan Bank Indonesia

Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan. Di bidang moneter, Bank Indonesia selama triwulan III 2024 menurunkan BI-Rate sebanyak satu kali yakni pada September 2024 sebesar 25bps menjadi 6,00%. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, pada Oktober 2024, Bank Indonesia mempertahankan

suku bunga kebijakan pada level yang sama, yakni 6,00%. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter dalam jangka pendek difokuskan pada stabilitas nilai tukar Rupiah karena meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan dengan tetap memperhatikan prospek inflasi, nilai tukar Rupiah, dan pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus memperkuat strategi OM *pro-market* untuk menarik berlanjutnya aliran masuk modal asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dan efektivitas transmisi kebijakan moneter dengan: (i) menjaga struktur suku bunga di pasar uang Rupiah untuk daya tarik imbal hasil bagi aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik; (ii) mengoptimalkan SRBI, SVBI, dan SUVBI; (iii) memperkuat strategi transaksi *term-repo* dan *swap valas* yang kompetitif; dan (iv) memperkuat peran *Primary Dealer* (PD) untuk semakin meningkatkan transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi repo antarpelaku pasar. Bank Indonesia juga terus memperkuat strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas pada transaksi *spot* dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), serta transaksi SBN di pasar sekunder.

Di bidang makroprudensial, Bank Indonesia melaksanakan strategi untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Pada triwulan III 2024, respons kebijakan makroprudensial Bank Indonesia antara lain:

- a) Penguatan implementasi kebijakan makroprudensial longgar, dengan:
 - i) Memperkuat Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan melalui *refocusing* pada sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja;
 - ii) Mempertahankan: (i) Rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB) sebesar 0%; (ii) Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94%; (iii) Rasio *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi sebesar 100% dan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor paling rendah sebesar 0%, berlaku efektif 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025; serta (iv) Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5% dengan fleksibilitas repo sebesar 5%, dan rasio PLM Syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 3,5%; dan
- b) Penguatan publikasi asesmen transparansi SBDK dengan pendalaman pada suku bunga kredit berdasarkan sektor prioritas yang menjadi cakupan KLM.

Di bidang sistem pembayaran, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran.

Pada triwulan III 2024, respons kebijakan sistem pembayaran yang ditempuh antara lain:

- a) Meningkatkan resiliensi infrastruktur SPBI;
- b) Penguatan inovasi dan akseptasi layanan pembayaran digital serta inklusi ekonomi dan keuangan UMKM termasuk literasi dan perlindungan konsumen melalui penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024;
- c) Pelaksanaan *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 yang berfokus pada aspek pengembangan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri, termasuk penguatan struktur industri melalui peningkatan implementasi sertifikasi kompetensi di bidang sistem pembayaran;
- d) Perluasan akseptasi digital melalui edukasi kepada *merchant* QRIS terkait penggunaan QRIS antarnegara, edukasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah serta perluasan digitalisasi transaksi Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024; dan
- e) Memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI, antara lain dengan melanjutkan kerja sama kelembagaan dalam pengedaran uang Rupiah ke daerah 3T (Terluar,



Opening Ceremony FEKDI x KKI 2024 di Jakarta

Terdepan, Terpencil) melalui kegiatan kas keliling, kas titipan, dan Ekspedisi Rupiah Berdaulat.

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) ditempuh melalui program GNPIP di berbagai daerah dalam TPIP dan TPID. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal juga diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan momentum pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan KSSK untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha. Selain itu, Bank Indonesia juga memperkuat dan memperluas kerja sama internasional di area kebanksentralan, termasuk melalui konektivitas sistem pembayaran dan transaksi menggunakan mata uang lokal, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.







BAB 4

Transformasi Bank Indonesia

Bank Indonesia memperkuat transformasi yang telah ditempuh sejak tahun 2018 sebagai wujud dukungan terhadap implementasi UU P2SK. UU P2SK memberikan landasan hukum yang kuat bagi mandat, kebijakan, dan kelembagaan Bank Indonesia dalam mengawal perekonomian nasional. Pada prinsipnya, hal-hal yang tertuang dalam UU P2SK telah sejalan dengan praktik yang telah dilakukan Bank Indonesia saat ini. Namun, upaya transformasi tetap diperlukan dalam rangka membangun bank sentral yang kredibel, profesional, bertatakelola, akuntabel, dan transparan, sebagai tindak lanjut amanat UU P2SK.

Transformasi di area kebijakan, organisasi dan proses kerja, SDM dan budaya kerja, serta digital terus dipertajam dalam rangka meningkatkan kredibilitas kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia. Fokus transformasi antara lain mencakup 3 (tiga) agenda utama. Pertama, mengintegrasikan *digital business process* kebijakan, kelembagaan, dan SDM ke dalam suatu *digital business platform* dan didukung pemanfaatan *artificial intelligent* (AI) secara *straight-through* dan *end-to-end*. Kedua, pengembangan operasi moneter (OM) *Pro-Market* yang terintegrasi dengan pengembangan PUVA, surveilans, dan *digital workplace* (DWP) untuk pelaksanaan kebijakan. Ketiga, penyusunan BSPI *Next Phase* melalui pengembangan lima inisiatif, yaitu infrastruktur, industri, inovasi dan akseptasi, internasional, dan Rupiah Digital.

4.1. Transformasi Kebijakan

Bank Indonesia melanjutkan penguatan bauran kebijakan yang mengintegrasikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mencapai tujuan sebagaimana amanat UU. Tantangan perekonomian yang semakin kompleks, termasuk lingkungan strategis internal maupun eksternal, memerlukan transformasi berupa penguatan kerangka kerja Bauran Kebijakan Bank Indonesia (BKBI) yang terintegrasi dalam mencapai tujuan Bank Indonesia. BKBI akan memperjelas integrasi kerangka kerja yang saling melengkapi dan memperkuat antarkebijakan utama, yang terdiri dari kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan makroprudensial, dengan ditopang oleh kebijakan pendukung. Integrasi ini konsisten dengan pencapaian tujuan Bank Indonesia, yakni mencapai stabilitas nilai Rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penguatan kerangka kebijakan dilakukan beriringan dengan *business process re-engineering* (BPR) serta digitalisasi kebijakan dan proses kerja, agar mampu menjawab

kebutuhan dan tantangan ke depan. Hal ini ditempuh guna mewujudkan organisasi dengan proses bisnis yang lebih sederhana, ringkas, dan standar, serta proses kerja yang *agile* dan sejalan dengan kebutuhan di era digital.

Penguatan kerangka kerja BKBI tersebut antara lain dilakukan melalui penyempurnaan ketentuan Bank Indonesia. Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 4 Tahun 2024 tentang BKBI. Penerbitan ketentuan ini dilanjutkan dengan penyempurnaan landasan hukum mengenai kerangka kerja pada masing-masing kebijakan utama, yakni PBI Kebijakan Moneter, PBI Kebijakan Makroprudensial, dan PBI Kebijakan Sistem Pembayaran. Di samping itu, Bank Indonesia juga sedang menyusun penguatan ketentuan kebijakan pendukung yang terdiri dari ekonomi dan keuangan daerah, pasar uang dan pasar valuta asing, inklusi keuangan dan hijau, ekonomi dan keuangan syariah, internasional, serta perlindungan konsumen yang selaras dengan PBI BKBI dimaksud.

4.1.1. Transformasi di Bidang Moneter

Bank Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter dalam memastikan terkendalinya inflasi serta stabilitas nilai tukar Rupiah. Upaya tersebut dilakukan secara konsisten dengan mengoptimalkan pelaksanaan OM *pro-market* yang terintegrasi guna mengembangkan pasar uang dan pasar valas serta mendukung upaya menarik *portfolio inflows*.

Sepanjang triwulan III 2024 Bank Indonesia melanjutkan berbagai upaya dalam rangka mengintegrasikan pengelolaan moneter dengan pengembangan pasar keuangan melalui instrumen OM *pro-market* sebagai berikut:

a. Penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI)

Bank Indonesia terus mengoptimalkan instrumen OM *pro-market* melalui penerbitan SRBI untuk mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter, memperdalam pasar uang, dan mendukung stabilisasi nilai tukar rupiah. SRBI merupakan surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga milik Bank Indonesia. Selain sebagai salah satu instrumen OM, SRBI juga menjadi alternatif instrumen di pasar uang dan menjadi sarana dalam menarik aliran masuk modal asing ke dalam negeri. Sampai dengan triwulan III 2024, total *outstanding* SRBI mencapai Rp927,61 triliun. Total volume transaksi di pasar sekunder

sejak penerbitan SRBI telah mencapai Rp1.331,35 triliun atau 143,52% dari *outstanding* SRBI. Kepemilikan nonresiden telah mencapai Rp254,22 triliun atau 27,41% dari *outstanding* SRBI. Hal ini mengindikasikan bahwa penerbitan SRBI disambut baik oleh investor serta dapat menarik aliran masuk modal asing.

Dalam rangka mengembangkan pasar uang dan pasar valas yang modern dan maju serta meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, Bank Indonesia menginisiasi transaksi OM melalui *dealer* utama di PUVA sejak tanggal 17 Mei 2024. Penggunaan *dealer* utama dalam transaksi OM dimulai dari lelang penerbitan SRBI. Penguatan implementasi *dealer* utama terus dilakukan untuk mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valas serta penerapan OM *pro-market*, dengan mendorong peningkatan pemenuhan kewajiban *dealer* utama di pasar uang antara lain transaksi SRBI di pasar sekunder dan transaksi *repurchase agreement* (repo) antarpelaku pasar.

b. Penerbitan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI)

Bank Indonesia juga menerbitkan SVBI dan SUVBI dalam rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan moneter. Karakteristik SVBI dan SUVBI yang “*pro-market*” diharapkan dapat mengakselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas Indonesia serta mendukung upaya menarik *portfolio inflows* yang pada akhirnya memperkuat pencapaian stabilitas nilai tukar rupiah. SVBI adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing milik Bank Indonesia. Sementara itu, SUVBI adalah sukuk dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga dalam valuta asing berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia. SVBI dan SUVBI diterbitkan dengan tenor paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan, dengan suku bunga SVBI dan tingkat imbalan SUVBI mempertimbangkan harga pasar (*market rate*). SVBI dan SUVBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder oleh residen dan nonresiden.

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia melakukan asesmen pengayaan fitur instrumen Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) dalam rangka memperkuat pelaksanaan OM Pro Market dan mendukung pendalaman pasar uang syariah. Sampai dengan

akhir triwulan III 2024, telah dilakukan lelang SVBI sebanyak 44 kali dengan total nominal penerbitan sebesar USD14,89 miliar dan total posisi (*outstanding*) sebesar USD3,254 miliar. Di pasar sekunder, SVBI telah diperdagangkan sebesar USD61 juta, termasuk transaksi yang dilakukan dengan nonresiden. Sementara itu, lelang SUVBI telah dilakukan sebanyak 22 kali dengan total nominal penerbitan (sejak diterbitkan) sebesar USD1,80 miliar USD dan total posisi (*outstanding*) sebesar USD230 juta.

4.1.2. Transformasi di Bidang Makroprudensial

Pengembangan *Supervisory Technology* (Suptech)

Bank Indonesia melakukan penguatan pengawasan terintegrasi secara *end-to-end* melalui pengembangan *Suptech* dalam rangka memastikan pelaksanaan Bauran Kebijakan Bank Indonesia berjalan efektif dan optimal sesuai sasaran. Pengembangan *Suptech* dilaksanakan secara berkelanjutan untuk menciptakan pengawasan yang lebih *agile* dan responsif dalam menjawab tantangan dari pelaksanaan transformasi Bank Indonesia. Dalam upaya mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan turut menjaga stabilitas sistem keuangan, telah disusun *roadmap* pengembangan *suptech data collection* dan *data analytics*. Pengembangan kedua aspek tersebut dilakukan untuk menangkap dinamika kompleksitas sistem keuangan dan perubahan model bisnis yang terjadi baik dalam level individu pelaku maupun industri secara menyeluruh.

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia telah melakukan pengembangan lanjutan *suptech analytics* untuk mengidentifikasi risiko pada sistem keuangan. Pengembangan *suptech analytics* yang dilakukan antara lain mencakup alat proyeksi arus kas perbankan berdasarkan perilaku historis dengan pemanfaatan *Artificial Intelligence* (AI), *network analysis* untuk mengidentifikasi dan memantau perkembangan struktur dan interkoneksi pelaku pasar keuangan dan penyedia jasa sistem pembayaran, serta pengembangan *suptech* lanjutan terhadap *early warning tools* dalam mendeteksi potensi tekanan likuiditas melalui penyempurnaan model untuk meningkatkan akurasi interpretasi. Di samping itu, pengembangan *suptech* juga dilakukan terhadap *behavior analysis* yang dapat mendukung asesmen terhadap proyeksi pertumbuhan kredit bank dalam kondisi *baseline* maupun berdasarkan hasil *stress testing* sebagai salah satu upaya pencapaian kredit yang optimal. Pengembangan *suptech analytics* dimaksud diharapkan dapat berkontribusi dalam proses identifikasi risiko sistemik dan pemantauan perilaku entitas dalam sistem keuangan serta asesmen

terintegrasi. Selain itu, telah dilakukan pengembangan lanjutan *surveillance mobile application* yang berfungsi sebagai *platform* untuk menyajikan data dan informasi pengawasan secara lebih interaktif, dinamis, dan terkini. Aplikasi tersebut telah terintegrasi dengan *digital workplace* (DWP) sehingga dapat mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih efisien.

4.1.3. Transformasi di Bidang Sistem Pembayaran

1) Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran

Bank Indonesia terus memperkuat infrastruktur sistem pembayaran yang berdaya tahan dan terintegrasi guna mendukung ekosistem ekonomi keuangan digital nasional. Pengembangan infrastruktur sistem pembayaran terus dilanjutkan untuk memfasilitasi kebutuhan transaksi lintas negara (*cross-border*) yang lebih cepat, mudah, murah, dan andal. Infrastruktur sistem pembayaran diimplementasikan melalui: (i) penguatan stabilitas, skalabilitas, dan sinergi infrastruktur sistem pembayaran ritel dan *wholesale*; (ii) pengembangan BI-Payment Clear untuk memperkuat manajemen risiko dan pemenuhan integritas transaksi; (iii) pengembangan BI-RTGS Generasi III; dan (iv) pengembangan infrastruktur data melalui pengembangan Payment ID, sistem data *capturing*, dan BI-Payment Info.

Pada triwulan III 2024, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran difokuskan pada penguatan stabilitas, skalabilitas, dan sinergi infrastruktur sistem pembayaran ritel dan *wholesale*. Perkembangan transaksi menggunakan infrastruktur sistem pembayaran terus tumbuh positif. Perkembangan positif ini tidak terlepas dari dukungan Bank Indonesia yang menyediakan berbagai kemudahan. Implementasi BI-FAST yang didukung dengan fitur serta merta (*real time*) dan beroperasi tanpa henti (24/7) terus diperluas. Hal ini termasuk kepesertaan yang terbuka, opsi penyediaan infrastruktur secara independen maupun bersama (*sharing*), penetapan batas maksimal transaksi sebesar Rp250 juta per transaksi, serta skema harga BI-FAST sebesar maksimal Rp2.500 per transaksi kepada nasabah pengirim dengan biaya Bank Indonesia ke peserta pengirim sebesar Rp19 per transaksi. Pada triwulan III 2024, transaksi BI-FAST tumbuh positif 54% (yoy) mencapai Rp2.424,51 triliun.

Pada triwulan III 2024, pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang mencakup infrastruktur ritel, *wholesale* dan pusat data masih berada pada

tahap konsepsi dan eksplorasi. Pada tahap ini, Bank Indonesia melakukan kajian menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap aspek pengembangan dapat mendukung stabilitas, keamanan, dan efisiensi sistem pembayaran nasional. Tahap konsepsi ini melibatkan analisis kebutuhan pasar, pengujian konsep teknis, serta identifikasi risiko dan tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi. Bank Indonesia juga menjalin komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan industri guna mendapatkan masukan yang relevan dan membangun sinergi yang lebih kuat dalam mendukung keberlanjutan sistem pembayaran yang andal dan inovatif.

2) Penataan Struktur Industri Sistem Pembayaran

Kebijakan sistem pembayaran dalam BSPI 2025 telah mendorong transformasi digital perbankan secara progresif. Hampir seluruh bank umum di Indonesia telah membuka kanal *mobile digital* yang terhubung dengan QRIS untuk melayani kebutuhan transaksi masyarakat. QRIS kini berhasil menghubungkan 31,65 juta UMKM di seluruh Indonesia dari berbagai sektor dengan layanan keuangan digital domestik maupun lintas negara (Thailand, Malaysia dan Singapura). Arah Kebijakan Struktur Industri Sistem Pembayaran ke depan ditujukan untuk mendorong konsolidasi struktur industri melalui penataan akses dan *entry policy* sesuai profil risiko pelaku, penguatan manajemen risiko, dan reformasi regulasi. Konsolidasi struktur diperlukan guna memperkuat kapasitas industri dalam pengendalian risiko sekaligus memperkuat daya saing industri sistem pembayaran.

Penguatan struktur industri dalam rangka implementasi BSPI 2030 dilakukan melalui peningkatan implementasi sertifikasi kompetensi di bidang sistem pembayaran dan penyusunan kriteria kepesertaan industri. Aspek Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur Teknologi (TIKMI) digunakan sebagai kriteria dalam klasifikasi proses *entry* (persetujuan), asesmen dan evaluasi kinerja, serta *exit policy* kepesertaan Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) pada infrastruktur sistem pembayaran. Interkoneksi antarpelaku dalam infrastruktur sistem pembayaran Bank Indonesia juga terus menguat. Interkoneksi BI-RTGS meningkat seiring akselerasi transaksi sistem pembayaran. Interkoneksi BI-FAST juga terus meningkat terutama melalui bank-bank besar, dengan dominasi pada Penyelenggaraan Sistem Pembayaran (PSP) Utama, didukung naiknya partisipasi PSP Non Utama. Hal ini terlihat dari

transaksi pembayaran berbasis SNAP yang terus tumbuh positif dan mendorong interkoneksi antar pelaku sistem pembayaran dan pelaku Ekonomi Keuangan Digital. Sampai dengan triwulan III 2024 terdapat 69 dari 71 Penyedia Jasa Pembayaran (PJP)

Penyedia Layanan (97%) yang dapat menyelesaikan integrasi SNAP. Pengguna layanan yang telah diintegrasikan mencapai 86% dari seluruh pengguna non-UMKM/non-Nirlaba.

BOKS 1. Peluncuran *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030



Pembukaan FEKDI x KKI 2024 dan Peluncuran *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 di Jakarta

Dalam lima tahun terakhir transformasi digital nasional mengalami akselerasi secara pesat. Pengembangan ekonomi dan keuangan digital melalui *Blueprint* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2019-2025 telah mencatatkan berbagai pencapaian, termasuk peningkatan jumlah pengguna QRIS yang mencapai lebih dari 50 juta, sebagian besar di antaranya adalah UMKM, serta pertumbuhan pesat transaksi BI-FAST. Selain itu, terdapat pencapaian berupa elektronifikasi program sosial pemerintah, peluncuran Kartu Kredit Indonesia yang mendukung kelancaran transaksi keuangan pemerintah, dan reformasi regulasi untuk memperkuat industri pembayaran nasional.

Sebagai kelanjutan dari BSPI 2025, Bank Indonesia meluncurkan BSPI 2030 pada 1 Agustus 2024, bertepatan dengan penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI 2024) di Jakarta Convention Centre (JCC). Peluncuran BSPI 2030 yang mengangkat tema "Mengakselerasi Ekonomi Digital Nasional untuk Generasi Mendatang" tersebut disaksikan oleh Presiden RI, Joko Widodo dan sejumlah *stakeholder*. Peluncuran tersebut menjadi wujud komitmen bersama untuk mengakselerasi transformasi digital ke depan, sekaligus sebagai bentuk selebrasi atas kemajuan pesat digitalisasi di Indonesia.

Sistem pembayaran nasional yang terus berkembang pesat masih menghadapi tantangan, terutama dengan semakin dinamisnya ekonomi keuangan digital (EKD) seiring percepatan digitalisasi, inovasi pembayaran yang berfokus pada konsumen, dan meningkatnya interkoneksi lintas negara. Tantangan ini memerlukan respons strategis melalui penguatan infrastruktur yang tangguh, struktur industri yang mampu mengelola risiko *shadow banking*, serta kolaborasi antara Bank Indonesia dan industri untuk mendorong inovasi, memperkuat literasi keuangan, dan perlindungan konsumen.

BSPI 2030 mengusung 5 (lima) visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2030 sebagai panduan arah kebijakan Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran dalam merespons dinamika EKD di masa depan seiring dengan perubahan lingkungan strategis. Pertama, mendukung integrasi ekonomi keuangan digital nasional. Kedua, mendukung digitalisasi perbankan sebagai lembaga utama dalam ekonomi keuangan digital. Ketiga, menjamin *interlink* antara *fintech* dengan perbankan. Keempat, menjamin keseimbangan antara inovasi dengan *consumers protection*, integritas dan stabilitas serta persaingan usaha yang sehat. Kelima, menjamin kepentingan nasional dalam ekonomi keuangan digital antar negara.

Visi SPI 2030 tersebut akan dicapai melalui 5 (lima) inisiatif utama: (i) modernisasi infrastruktur pembayaran ritel, *wholesale* dan data; (ii) konsolidasi industri pembayaran nasional; (iii) inovasi dan akseptasi digital; (iv) perluasan kerjasama internasional; dan (v) pengembangan Rupiah digital. Implementasi akan dilaksanakan baik secara langsung oleh Bank Indonesia sesuai tugas dan kewenangannya, maupun secara kolaboratif dengan Kementerian/Lembaga terkait dan industri.

Pengembangan infrastruktur akan berfokus pada penguatan stabilitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang andal dan modern. Penguatan dan konsolidasi industri akan menitikberatkan pada penataan struktur industri dan penguatan manajemen risiko untuk memperkuat struktur dan ketahanan industri sistem pembayaran nasional serta reformasi regulasi. Penguatan inovasi dan akseptasi digital diarahkan untuk mendorong inovasi sistem pembayaran yang seimbang dengan prinsip manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Penguatan kerjasama internasional diarahkan untuk mendukung interoperabilitas sistem pembayaran dengan negara-negara mitra, memastikan pembayaran lintas batas (*cross-border payments*) berjalan lancar dan berintegritas, serta mengedepankan kepentingan nasional. Terakhir, pengembangan Rupiah Digital diarahkan untuk memastikan kesiapan ekosistem sistem pembayaran dalam menghadapi era *virtual economy* di masa mendatang.

3) Pengembangan Inovasi dan Perluasan Akseptasi

Bank Indonesia terus berupaya untuk mendukung inovasi dan akseptasi di industri sistem pembayaran. Standardisasi merupakan langkah penting dalam mewujudkan “Satu Bahasa” untuk ekosistem sistem pembayaran digital, yang terus diperluas melalui inisiatif seperti perluasan QR Code Indonesian Standard (QRIS) Antarnegara dan SNAP yang mendukung implementasi QRIS antarnegara. Implementasi QRIS antarnegara memungkinkan pengguna atau nasabah lembaga keuangan melakukan pembayaran ritel antarnegara dengan mudah dan lancar menggunakan aplikasi pembayaran yang dimiliki. Inisiatif pengembangan tersebut merupakan bagian dari implementasi BSPI 2025, yang telah dilanjutkan menjadi BSPI 2030. Arah strategis perluasan inovasi dan akseptasi ke depan adalah membangun kolaborasi antara Bank Indonesia dengan industri dalam mendorong inovasi dan akseptasi

BSPI 2030 merupakan wujud nyata upaya Bank Indonesia untuk menjaga kesinambungan transformasi digital nasional khususnya di area sistem pembayaran. Melalui BSPI 2030, Bank Indonesia mendorong inklusi keuangan melalui layanan yang mudah diakses, aman, dan terjangkau, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan dengan infrastruktur pembayaran dan keamanan siber yang andal.

Dalam jangka panjang, BSPI 2030 diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, memperkuat sistem pembayaran nasional, dan menjaga stabilitas keuangan. Dengan transaksi lintas negara yang lebih efisien, BSPI 2030 memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem ekonomi global dan mendukung transformasi digital nasional.



secara seimbang dengan perlindungan konsumen, integritas, stabilitas dan persaingan usaha yang sehat. Tujuan ini akan dicapai melalui tiga besaran kebijakan, yaitu: (1) mendorong inovasi layanan pembayaran; (2) memperkuat literasi dan akseptasi digital masyarakat; dan (3) memperkuat aspek manajemen risiko dan perlindungan konsumen. Ketiga besaran strategi ini akan diimplementasikan dalam wadah yang kolaboratif antara Bank Indonesia dengan industri.

Pada triwulan III 2024, pengembangan inovasi fitur dan layanan instrumen pada kanal pembayaran antara lain meliputi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah dan QRIS Tap NFC yang dilakukan sebagai solusi pembayaran yang lebih praktis dan efisien. Progres pengembangan QRIS Tap NFC telah memasuki tahap penyusunan standar bersama industri. Selain itu, dalam rangka memperkuat transformasi digital dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional,



FEKDI x KKI 2024 Casual Talk The Digital Leap: Paving The Way for Economic & Finance Transformation di Jakarta

telah diselenggarakan FEKDI x KKI pada Agustus 2024. Perhelatan FEKDI x KKI 2024 menjadi ajang selebrasi pencapaian berbagai inisiatif inovasi digital, antara lain dalam bentuk kompetisi inovasi digital yang dikemas dalam BI Hackathon, QRIS Jelajah Indonesia sebagai terobosan kampanye akseptasi dan literasi digitalisasi di seluruh Indonesia melalui 46 kantor perwakilan Bank Indonesia, serta pengembangan KKI Segmen Pemerintah fitur *Online Payment Virtual Card Tokenization*.

4) Pengembangan Konektivitas Sistem Pembayaran Lintas Negara

Bank Indonesia terus melanjutkan komitmen untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas melalui kesepakatan kerja sama dengan beberapa bank sentral. Kerja sama dilakukan dalam rangka mewujudkan konektivitas pembayaran lintas batas yang lebih cepat, murah, transparan, dan inklusif. Kerja sama tersebut juga berpotensi membuka akses pasar bagi para pelaku usaha Indonesia ke kawasan. Bank Indonesia akan terus melakukan perluasan kerja sama *Regional Payment Connectivity* (RPC) dengan negara lainnya. Ke depan arah strategis dari inisiatif internasional ditujukan untuk mendorong interkoneksi lintas negara beserta perluasannya dalam koridor yang menjamin kepentingan nasional. Inisiatif ini akan diwujudkan melalui dua besaran kebijakan yaitu: (i) memperluas cakupan kerjasama QRIS antar negara; dan (ii) mempersiapkan infrastruktur sistem pembayaran nasional untuk siap terkoneksi antar negara. Prinsip yang terkandung dalam kerangka RPC akan menjadi

landasan bagi inisiatif ini dalam mengimplementasikan kedua besaran kebijakan tersebut.

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia terus memperluas kerja sama untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas. Perluasan kerja sama QRIS antarnegara dilakukan dengan empat negara yaitu Korea Selatan, Uni Arab Emirates (UAE), Jepang, dan India. Dengan Korea Selatan, telah dilakukan penandatanganan amandemen Nota Kesepahaman (NK) antara Bank Indonesia dan Bank of Korea (BoK) pada 15 Juli 2024, di Penang, Malaysia. Kesepakatan tersebut menandai dimulainya kerja sama antara BI dan BoK dalam mengimplementasikan konektivitas pembayaran berbasis QR Code yang didukung sinergi erat pelaku industri kedua negara. Inisiasi kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan tahap uji coba sebelum implementasi dilakukan secara penuh. Kerja sama sistem pembayaran berbasis QR Code ini sekaligus menjadi wujud nyata implementasi dari *G20 Roadmap for Enhancing Cross-border Payments*.

Selain itu, pengembangan *fast payment* juga menjadi prioritas untuk menciptakan transaksi ritel antarnegara yang *real-time*, terjangkau, dan selalu tersedia (24/7), sehingga memperkuat arus keuangan global secara efisien. Untuk mendukung kebutuhan transaksi skala besar, Bank Indonesia juga memperkuat *wholesale payment* dengan meningkatkan kapabilitas sistem RTGS (*Real-Time Gross Settlement*) agar terintegrasi dengan sistem pembayaran internasional. Strategi dimaksud bertujuan untuk menciptakan ekosistem pembayaran

yang lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi lintas batas melalui konektivitas yang lebih kuat dan berkelanjutan.

5) Pengembangan Rupiah Digital

Bank Indonesia terus melanjutkan eksplorasi dan eksperimentasi terkait pengembangan Rupiah Digital melalui berbagai langkah strategis. Pengembangan Rupiah Digital akan diarahkan pada eksperimentasi lanjutan dengan fokus pada replikasi fungsi pasar *wholesale* dan pendalaman pasar keuangan. Tujuan ini dicapai melalui besaran strategi sebagai berikut: (i) eksperimentasi penerbitan (*issuance*), pemindahan (*transference*), dan penarikan (*redemption*) *securities ledger*; (ii) eksperimentasi pemanfaatan sekuritas digital dalam *use case* OM dan transaksi keuangan lainnya; serta (iii) eksplorasi pemanfaatan keunggulan *programmability*, *composability*, dan *tokenization* untuk pendalaman pasar keuangan.

Salah satu langkah penting yang telah dilakukan adalah peluncuran Laporan Konsultasi Publik, yang merupakan kompilasi dari semua masukan masyarakat terkait konsep pengembangan Rupiah Digital sebagaimana tertuang dalam *Consultative Paper* (CP) Rupiah Digital Tahap I. Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia telah menyelesaikan *Proof of Concept* (PoC) *Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger*, serta melakukan *benchmarking* dan penajaman topik dalam rangka mendukung Proyek Garuda. Saat ini, Bank Indonesia tengah mengkaji desain *Central Bank Digital Currency* (CBDC) untuk memastikan penerapan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan pasar domestik.

4.1.4. Transformasi di Bidang Kebijakan Pendukung

1) Reformasi Regulasi di Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA)

Bank Indonesia terus memperkuat pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang dan pasar valuta asing melalui reformasi pengaturan di pasar uang dan pasar valuta asing yang sejalan dengan amanat UU P2SK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penguatan kewenangan dalam pengaturan, pengembangan, dan pengawasan PUVA tersebut sejalan dengan upaya Bank Indonesia untuk mewujudkan PUVA yang modern dan maju sebagaimana dimuat dalam *Blueprint* Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025. PUVA yang modern dan maju akan berkontribusi dalam pengembangan dan pendalaman pasar keuangan, yang selanjutnya akan mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi nasional.

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia melakukan reformasi pengaturan pasar uang dan pasar valas melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PBI PUVA) yang mengatur secara menyeluruh (*end-to-end*) mengenai aspek produk, *pricing*, pelaku pasar, dan infrastruktur pasar keuangan. PBI PUVA disusun secara *principle-based*, sehingga diharapkan lebih adaptif (*agile*) terhadap dinamika pasar dan kebijakan Bank Indonesia, serta selaras dengan kebutuhan industri (*industry friendly*), mengakomodasi inovasi dengan memperhatikan aspek digitalisasi, inklusif dan mendukung keuangan berkelanjutan, serta memenuhi *international best practices*.

Sepanjang triwulan III 2024, Bank Indonesia juga telah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) sebagai peraturan pelaksanaan dari PBI PUVA. Peraturan tersebut adalah PADG Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty* (PADG CCP), PADG Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing (PADG Tavas), dan PADG Nomor 13 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang (PADG Transaksi PU). Ketiga PADG dimaksud mengatur aspek *product*, *pricing*, dan infrastruktur yang berperan penting dalam pencapaian mandat Bank Indonesia dalam mengatur, mengembangkan, dan mengawasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing serta selaras dengan arah transformasi Bank Indonesia.

Pada aspek *product*, ketentuan dimaksud mengatur mengenai jenis transaksi di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, penyelesaian transaksi, penerapan dan implementasi *close-out netting*, konsultasi dalam penggunaan *smart contract* dalam rangka mendukung perkembangan digitalisasi terhadap transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing. Pada aspek *pricing*, pengaturan harga acuan dalam PADG Transaksi PU berupa *Indonesia Overnight Index Average* (IndONIA), *IndONIA Index* dan *Compounded IndONIA* yang dapat digunakan oleh Pelaku Pasar dalam penerbitan Instrumen Pasar Uang, transaksi Pasar Uang, serta penerbitan instrumen keuangan dan/atau transaksi keuangan lainnya. Sedangkan dalam PADG Transaksi Pasar Valuta Asing, pengaturan harga acuan berkaitan dengan penggunaan kurs acuan berupa *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR) dan kurs acuan non-USD/IDR.

PADG CCP mengatur aspek penyelenggaraan CCP meliputi fungsi, tugas dan kewajiban serta peranan CCP sebagai Infrastruktur Pasar Keuangan Sistemik, termasuk mekanisme perizinan CCP, konektivitas CCP dengan sistem dan/atau infrastruktur pasar keuangan lainnya. Penerbitan PADG CCP diharapkan



Penandatanganan MoU Cross Border QR Payment Linkage antara Bank Indonesia (BI) dan Bank of Korea (BoK) di Penang, Malaysia

dapat mendukung penyelenggaraan CCP di Indonesia senantiasa selaras dengan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku antara lain *principles for financial market infrastructures*. PADG CCP juga mengatur mengenai fungsi lain dari CCP sebagai *tri-party agent*, yaitu CCP yang bertindak sebagai agen bagi para pelaku transaksi setelah pelaksanaan transaksi keuangan (*post-trade*).

Bank Indonesia juga memperkuat pengaturan terkait kerja sama lintas negara dalam transaksi ekonomi dan keuangan menggunakan mata uang lokal (*local currency transaction/LCT*) melalui penerbitan PADG Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Transaksi Bilateral Antara Indonesia dan Korea Selatan menggunakan Rupiah dan Won (PADG LCT Korea). PADG LCT Korea merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Bank Indonesia dengan Bank of Korea guna mendorong transaksi bilateral antarpelaku bisnis Indonesia dengan Korea Selatan. PADG dimaksud mengatur tentang pelaku transaksi LCT Korea, transaksi keuangan dan kegiatan keuangan yang dapat difasilitasi dengan skema dan *framework* LCT termasuk mekanisme dan tata cara dalam pelaksanaan transaksi keuangan dan/atau kegiatan keuangan, serta pelaporan terkait pelaksanaan LCT Korea.

Langkah reformasi regulasi PUVA juga diterapkan pada PUVA berdasarkan prinsip syariah. Hal ini untuk mendukung amanat UU P2SK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan PUVA. Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia melakukan penyusunan pokok pengaturan ketentuan

pelaksanaan PBI No. 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing berupa PADG Transaksi Pasar Uang Syariah dan Pasar Valuta Asing Syariah.

2) Pengembangan Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA)

a) Pengembangan Produk dan *Pricing* Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Langkah reformasi pengaturan PUVA diiringi dengan upaya Bank Indonesia untuk terus mengoptimalkan pengembangan berbagai instrumen moneter *pro-market*. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat upaya pendalaman pasar uang dan pasar valas serta mendukung aliran masuk modal asing ke dalam negeri. Pengembangan pasar uang dan pasar valas terus dilanjutkan dengan fokus pada aspek *product, pricing, pelaku, dan infrastruktur* (3P+1I) dalam rangka mewujudkan pasar uang Rupiah dan valas yang modern, likuid, efisien, transparan, dan berintegritas melalui pengembangan instrumen-instrumen sebagai berikut:

i) Pengembangan Instrumen Repo

Bank Indonesia melanjutkan implementasi *dealer* utama di PUVA yang sejalan dengan akselerasi integrasi pengelolaan moneter dan pengembangan PUVA. Sejak 17 Mei 2024, Bank Indonesia telah menetapkan 18 bank sebagai *dealer* utama PUVA dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter sekaligus mendorong pengembangan PUVA yang lebih likuid, dalam,

inklusif, dan kontributif terhadap stabilitas moneter dan sistem keuangan. *Dealer* utama PUVA memiliki hak dan kewajiban dalam mendorong transaksi PUVA sebagai *market maker*, melakukan distribusi likuiditas, dan mendukung masuknya aliran dana asing (*inflow*). Pada tahap inisiasi, kewajiban *Dealer* Utama PUVA fokus pada peningkatan transparansi harga transaksi repo dan SRBI di pasar sekunder untuk mendorong terbentuknya *price discovery* dan efisiensi harga repo dan harga SRBI di pasar sekunder.

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia melakukan *monitoring* dan evaluasi kinerja *Dealer* Utama PUVA dalam rangka peningkatan peran dan kontribusi *dealer* utama PUVA. Rangkaian *focus group discussion* dilakukan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja tersebut, termasuk penyusunan strategi implementasi tahap lanjutan berupa penguatan kewajiban *dealer* utama PUVA dengan mempertimbangkan kesiapan perbankan terutama dari sisi strategi manajemen likuiditas dan risiko operasional.

Pada triwulan III 2024, Rata-Rata Harian (RRH) *outstanding repo* sebesar Rp56,8 triliun, atau mengalami moderasi dibandingkan posisi pada triwulan sebelumnya yang mencapai Rp 60,9 triliun. Namun demikian, pangsa jumlah pelaku repo terhadap total perbankan tercatat mengalami peningkatan menjadi sebesar 64% pada triwulan III 2024 dari sebelumnya sebesar 60% pada triwulan II 2024. RRH transaksi repo dengan *underlying* SRBI masih relatif terbatas, tercatat sebesar Rp1.65 triliun atau 4% dari total transaksi repo pada triwulan III 2024. Sementara itu, *spread* kuotasi *bid-ask* transaksi repo semakin menyempit pasca implementasi *dealer* utama PUVA yang menunjukkan pembentukan harga di pasar repo yang semakin efisien.

ii) Pengembangan Instrumen DNDF

Bank Indonesia terus mengembangkan DNDF sebagai salah satu instrumen lindung nilai (*hedging*) di pasar valuta asing dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar sejalan dengan arah strategi pengembangan PUVA pada BPPU 2025. Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia memperkuat pengaturan DNDF melalui penerbitan PADG Tavas sebagai bagian dari pengaturan

teknis transaksi pasar valuta asing dalam PBI PUVA. Beberapa penguatan pengaturan DNDF meliputi: (i) penerapan percepatan transaksi (*early termination*); (ii) standarisasi transaksi DNDF yang dikliringkan melalui CCP; serta (iii) fleksibilitas waktu penyampaian dokumen *underlying* transaksi. Penerapan *early termination* dan standarisasi transaksi DNDF bertujuan untuk mendukung implementasi CCP yang diluncurkan sejak 30 September 2024. Pelaksanaan kliring DNDF melalui CCP diharapkan dapat mengakselerasi perkembangan DNDF ke depan.

Strategi pengembangan DNDF non-USD juga dilakukan melalui perluasan implementasi LCT. Pada akhir September 2024, Bank Indonesia telah menerbitkan PADG LCT Korea yang memperluas *framework* LCT Indonesia dengan Korea Selatan. Pengaturan tersebut diharapkan semakin mendukung pemanfaatan DNDF non-USD sebagai instrumen lindung nilai bagi pelaku pasar di domestik. Selain dengan Korea Selatan, transaksi DNDF sudah dapat dilakukan dalam skema LCT dengan Malaysia, Jepang, dan China. Ke depan, transaksi DNDF dalam skema LCT ditargetkan dapat dilakukan dengan Thailand, Uni Emirat Arab, dan India. Dengan demikian, transaksi DNDF dalam valuta non-USD diharapkan dapat semakin berkembang sejalan dengan perkembangan skema LCT dan kerjasama internasional.

Sosialisasi dan koordinasi secara *targeted* telah dilakukan guna mendorong perkembangan implementasi kebijakan PUVA termasuk sosialisasi dan koordinasi untuk pengembangan DNDF. Pada Agustus 2024, Bank Indonesia melakukan sosialisasi *targeted* kepada korporasi potensial dengan eksposur valas yang besar untuk mendorong pemanfaatan lindung nilai termasuk DNDF. Rangkaian sosialisasi dan koordinasi juga dilakukan kepada perbankan pada September 2024, untuk meningkatkan pemahaman terkait *regulatory reform* transaksi di pasar valuta asing termasuk penguatan pengaturan DNDF. Selanjutnya, Bank Indonesia akan kembali melakukan sosialisasi *targeted* kepada pelaku potensial dan lembaga pendukung transaksi DNDF.

Upaya pengembangan DNDF juga akan diintegrasikan dengan strategi pengelolaan

moneter dan pengembangan PUVA melalui implementasi *dealer* utama. DNDF merupakan instrumen valuta asing potensial yang akan dikembangkan untuk implementasi *dealer* utama di pasar valuta asing. Untuk mendukung pengembangan tersebut, Bank Indonesia memetakan interkoneksi antar bank devisa antara lain dengan mengadakan survei *counterparty limit* dan *counterparty line* bank devisa. Hasil survei ini kemudian dikoordinasikan secara intensif dengan *stakeholder* terkait untuk mendapatkan gambaran potensi yang lebih mendalam antara lain potensi peningkatan volume transaksi, perluasan pelaku transaksi, dan transparansi pembentukan harga instrumen DNDF. Ada pun *timeline* implementasi *dealer* utama di pasar valuta asing akan mempertimbangkan kesiapan pelaku pasar, termasuk infrastruktur pendukungnya.

Pada triwulan III 2024, RRH transaksi DNDF di *market* tercatat sebesar USD 149 juta. Peningkatan pemanfaatan DNDF pada triwulan laporan didorong oleh peningkatan kebutuhan lindung nilai valas oleh para pelaku pasar khususnya pelaku asing sejalan dengan peningkatan *capital inflow* yang didukung dengan beberapa inisiatif pengembangan DNDF oleh Bank Indonesia.

iii) Reformasi Suku Bunga Rupiah

Bank Indonesia berupaya memastikan kelancaran proses transisi reformasi suku bunga rupiah di pasar domestik. Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia selaku *administrator* dari *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) telah menetapkan penghentian secara permanen publikasi JIBOR pada seluruh tenor terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026. Penetapan tanggal penghentian publikasi JIBOR tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi pelaku pasar untuk menggunakan acuan suku bunga rupiah yang berbasis transaksi, yaitu IndONIA. Sejalan dengan pengumuman Bank Indonesia terkait penghentian publikasi JIBOR tersebut, *National Working Group on Benchmark Reform* (NWGBR), yang beranggotakan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan dan Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO) juga mempublikasikan Panduan Transisi Pengakhiran JIBOR. Penerbitan panduan ini

diharapkan dapat mendukung kelancaran proses transisi JIBOR, serta membantu pelaku usaha dan seluruh *stakeholder* memahami proses reformasi referensi suku bunga rupiah dari JIBOR menuju IndONIA. Selanjutnya, NWGBR akan melakukan sosialisasi secara intensif mengenai agenda transisi JIBOR pasca Bank Indonesia mempublikasikan waktu penghentian publikasi JIBOR dan NWGBR menerbitkan panduan transisi pengakhiran JIBOR.

Bank Indonesia senantiasa berupaya memastikan transmisi kebijakan moneter berjalan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari pergerakan suku bunga pasar uang, perbankan, dan imbal hasil SBN yang sejalan dengan BI-Rate. *Pricing Repo* (*rate* transaksi Repo) terlihat lebih rendah daripada *rate* Pasar Uang Antar Bank (PUAB) di seluruh tenor. Hal ini sejalan dengan sifat Repo yang *collateralized* sehingga dinilai lebih aman (*secured transaction*), dibandingkan dengan transaksi interbank *call money* yang bersifat *uncollateralized*.

iv) Pengembangan Produk PUVA Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank Indonesia terus berupaya mengembangkan PUVA berdasarkan prinsip syariah untuk mendukung manajemen likuiditas dan mendorong peningkatan pembiayaan syariah serta pendalaman pasar keuangan syariah. Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia menyusun berbagai asesmen dan/atau kajian antara lain terkait: (i) indeks kedalaman pengembangan pasar uang syariah; (ii) evaluasi instrumen pasar uang syariah; dan (iii) pengayaan instrumen SUVBI.

Selanjutnya, Bank Indonesia mendorong sertifikasi treasuri syariah yang berperan penting dalam penguatan kualitas pelaku pasar agar memiliki kompetensi dan pemahaman terhadap instrumen OM syariah, transaksi PUVA syariah serta kode etik pasar sehingga dapat meningkatkan kredibilitas pasar uang dan pasar valuta asing syariah. Hal ini dilakukan melalui koordinasi dengan *Association Cambiste Internationale-Financial Market Association Indonesia* (ACI-FMA Indonesia) dan *Indonesia Islamic Global Market Association* (IIGMA) selaku asosiasi profesi tresuri syariah dalam penyelenggaraan

sertifikasi tresuri serta terlibat sebagai tenaga ahli dalam pelaksanaan uji sertifikasi profesi tresuri.

Rata-rata harian (RRH) *outstanding* pasar uang antarbank syariah pada triwulan III 2024 mencapai Rp6,52 T, meningkat dibanding RRH *outstanding* pasar uang antarbank syariah triwulan II 2024 yang sebesar Rp6,25 T. Transaksi pasar uang antarbank syariah masih didominasi oleh transaksi Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) yang mencapai Rp4,41 T atau 67,6% dari total RRH *outstanding* transaksi. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mendorong perbankan syariah untuk meningkatkan transaksi pendanaan antarbank terutama yang bersifat *secured* seperti transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA) dan repo syariah.

b) Pelaku Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing

Bank Indonesia melanjutkan upaya pengembangan pelaku PUVA dalam rangka mewujudkan pelaku PUVA yang kompeten, berintegritas, aktif, dan kolaboratif. Pengembangan kompetensi dan integritas pelaku PUVA diwujudkan melalui sinergi dan kolaborasi bersama APUVINDO. Setelah ditetapkan sebagai *self-regulatory organization* (SRO) PUVA sejak 5 Maret 2024, APUVINDO telah berperan aktif dalam mendukung program peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku PUVA. APUVINDO sebagai mitra strategis Bank Indonesia juga secara aktif mendorong pelaku PUVA untuk memenuhi kewajiban kepemilikan sertifikat tresuri sesuai jenjang jabatan dan mendaftarkan tresuri *dealernya* ke Bank Indonesia sesuai mandat UUP2SK dan PBI PUVA. Selain itu, ACI FMA Indonesia sebagai penyelenggara Sertifikasi Profesi Tresuri terus melanjutkan pelaksanaan ujian dan *refreshment* program sertifikasi bagi tresuri dealer dalam rangka mendukung kebijakan Bank Indonesia dalam mewujudkan pelaku PUVA yang kompeten dan berintegritas.

Bank Indonesia melanjutkan upaya pengembangan pelaku PUVA melalui kepemilikan sertifikasi tresuri. Sepanjang triwulan III 2024 telah dilakukan 3 (tiga) kali pembekalan sertifikasi tresuri oleh APUVINDO untuk jenjang 5 (dasar), 6 (menengah), dan 7 (lanjut). Program tersebut meliputi pelaksanaan pembekalan dalam rangka persiapan pelaksanaan sertifikasi tresuri bagi tresuri *dealer*. Selanjutnya, APUVINDO berkoordinasi erat

dengan ACI FMA Indonesia, melakukan penguatan kualitas penyelenggaraan sertifikasi profesi tresuri melalui standarisasi skema, modul, dan asesor.

Bank Indonesia memperkuat konsolidasi pelaku PUVA melalui evaluasi implementasi *dealer* utama. *Dealer* utama telah menjalankan perannya dalam melakukan redistribusi likuiditas di pasar uang, menjadi *market maker*, serta mendukung *inflow* non residen di pasar keuangan domestik. Sebagai bagian dari evaluasi implementasi *dealer* utama, pada triwulan III 2024 Bank Indonesia melakukan rangkaian *focus group discussion* untuk membahas hambatan dan isu strategis dalam implementasi *dealer* utama, termasuk rencana penguatan peran dan kewajiban *dealer* utamapada tahap selanjutnya. Penguatan peran dan kewajiban *dealer* utama direncanakan untuk efektif diimplementasikan pada triwulan IV 2024.

Bank Indonesia juga berperan aktif dalam *Global Foreign Exchange Committee* (GFXC) dalam upaya mewujudkan pengembangan PUVA yang kredibel dan berintegritas. Sebagai *associate member* GFXC, Bank Indonesia hadir dalam *bi-annual meeting* GFXC yang diselenggarakan pada 1-2 Juli 2024 di Frankfurt, Jerman bersama 20 negara anggota lainnya. Salah satu agenda pembahasan utama pada pertemuan tersebut adalah rencana pengkinian *FX Global Code* ('*The Code*'). Pengkinian '*The Code*' dilakukan secara *targeted* mencakup penguatan pada aspek transparansi data transaksi serta mitigasi dan monitoring risiko setelmen. '*The Code*' versi terbaru yang menjadi panduan penerapan kode etik global ditargetkan untuk terbit pada Desember 2024. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia telah berkoordinasi bersama APUVINDO untuk menyampaikan masukan atas usulan perubahan '*The Code*' yang juga dinilai selaras dengan Kode Etik Pasar (*Market Code of Conduct*) untuk pelaku PUVA. Ke depan, seiring dengan upaya penguatan kelembagaannya, APUVINDO juga akan berperan sebagai *public register* surat pernyataan komitmen terhadap kode etik pasar untuk pelaku PUVA.

c) Pembentukan Kelembagaan dan Pengembangan Central Counterparty untuk Transaksi Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP)

Bank Indonesia terus mendukung pembentukan dan pengembangan CCP. CCP merupakan

PENANDATANGANAN PERJANJIAN ANTAR PEMEGANG SAHAM (PAPS) KERJA SAMA PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN *CENTRAL COUNTERPARTY* (CCP)

12 AGUSTUS 2024



Penandatanganan Kerja Sama Pembentukan dan Pengembangan *Central Counterparty* (CCP) di Jakarta

infrastruktur pasar keuangan yang menyediakan jasa kliring, penjaminan, dan manajemen risiko untuk transaksi antar bank di PUVA. Bank Indonesia berkoordinasi dengan calon penyelenggara CCP untuk memastikan pengembangan CCP sesuai dengan peraturan yang berlaku dan standar internasional *Principles for Financial Market Infrastructures* (PFMI) yang dikeluarkan CPMI-IOSCO. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung tata kelola dan manajemen risiko CCP yang komprehensif. Pengembangan CCP juga dilakukan dengan memperhatikan aspek 3I (interkoneksi, interoperabilitas dan integrasi) dengan infrastruktur pasar keuangan lainnya, termasuk mendukung pengembangan Rupiah Digital dan *Digital Securities* yang akan diakomodasi pada *Central Bank Digital Currency - CBDC Platform*. Bank Indonesia terus melakukan koordinasi teknis dengan calon penyelenggara CCP, perbankan, dan penyedia *electronic trading platform* untuk menyiapkan konektivitas sistem CCP yang *straight through processing* (STP), termasuk dengan BI-RTGS dan BI-SSSS yang merupakan sistem setelmen dana dan surat berharga. Di samping itu, Bank Indonesia terus berkoordinasi dan bersinergi dengan OJK mengenai implementasi pengaturan transaksi derivatif suku bunga dan nilai tukar antar bank yang tidak dikliringkan melalui CCP (*Non-Centrally Cleared Derivative* atau NCCD)

dan *capital requirement* bank atas eksposur bank terhadap CCP yang diterbitkan oleh OJK.

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia bersinergi bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perbankan telah meluncurkan CCP di pasar uang dan pasar valuta asing, yang diselenggarakan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Peluncuran CCP yang dilaksanakan pada 30 September 2024 ini merupakan wujud dari pemenuhan amanat UU P2SK yang memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk mengatur, mengembangkan, dan mengawasi PUVA, termasuk Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK). Peluncuran ini juga merupakan pemenuhan komitmen G20 *Over the Counter (OTC) Derivatives Market Reform* serta capaian dari implementasi Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN PPPK) dan BPPU 2025. Dengan demikian, CCP siap diimplementasikan guna mengakselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, serta mendukung transmisi kebijakan moneter sehingga meningkatkan kapasitas pembiayaan perekonomian.

Bank Indonesia memberikan status *Qualifying CCP* (QCCP) kepada KPEI, yang dinilai telah memenuhi standar internasional yaitu *Principles for Financial Market Infrastructures* dan juga telah mengakomodasi penyelesaian secara

close-out netting. Pada tahap awal implementasi, CCP akan difokuskan pada instrumen DNDF dan Repo, dengan implementasi penambahan produk yang akan diperluas secara bertahap mempertimbangkan volume transaksi dan kesiapan pasar, termasuk infrastruktur. Sinergi dengan APUVINDO yang merupakan SRO PUVA dilakukan dalam rangka mendorong percepatan implementasi pengembangan dan keberlangsungan bisnis CCP sebagai IPK sistemik.

Dalam rangka memperkuat kelembagaan dan kontinuitas bisnis CCP, Bank Indonesia dan 8 (delapan) bank pemegang saham CCP telah melakukan penyertaan modal kepada KPEI sebagai CCP di pasar uang dan pasar valuta asing pada September 2024.

Realisasi penyertaan modal ini didahului oleh penandatanganan Perjanjian Antar Pemegang Saham (PAPS) tentang "Kerja Sama Pembentukan dan Pengembangan CCP" pada 12 Agustus 2024. Pihak penandatanganan pada PAPS tersebut adalah Bank Indonesia, BEI, KPEI serta 8 bank pemegang saham yang sekaligus berperan juga sebagai anggota kliring, yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), Bank CIMB Niaga, Bank Danamon, Maybank, dan Bank Permata. Penandatanganan PAPS merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (NK) yang telah ditandatangani 11 entitas yang sama pada 18 Maret 2024, yang menyepakati pendetailan klausul kerja sama pada NK.

BOKS 2. Peluncuran Central Counterparty Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (CCP PUVA)



Peluncuran Central Counterparty (CCP) di Jakarta

Bank Indonesia resmi meluncurkan *Central Counterparty* (CCP) di pasar uang dan pasar valuta asing pada 30 September 2024. Peluncuran CCP yang mengusung tema "Implementasi *Central Counterparty* untuk Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia yang Modern dan Maju" ini menjadi tonggak penting dalam modernisasi infrastruktur keuangan Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Bank Indonesia memberikan status *Qualifying CCP* (QCCP) kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) karena KPEI dinilai telah memenuhi standar internasional (*Principles for Financial Market Infrastructures*) dan mendukung penyelesaian *close-out netting*. Status QCCP merepresentasikan CCP sebagai entitas yang

memiliki izin dari regulator untuk beroperasi sebagai CCP Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (CCP PUVA).

Peluncuran CCP yang berlangsung di Bank Indonesia dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain otoritas sektor keuangan, kementerian terkait, pemegang saham CCP, penyelenggara CCP, dan pelaku pasar. Otoritas sektor keuangan dan kementerian terkait yang hadir dalam peluncuran CCP meliputi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN. Pemegang saham CCP seluruhnya hadir dalam peluncuran tersebut, meliputi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 8 (delapan) bank, yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank

Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), Bank CIMB Niaga, Bank Permata, Bank Danamon, dan Maybank. Sementara itu, KPEI hadir selaku perwakilan penyelenggara CCP. Selain itu, hadir pula sejumlah asosiasi pelaku pasar, seperti Asosiasi Pasar Uang dan Valuta Asing Indonesia (APUVINDO), ACI *Financial Market Association of Indonesia* (ACI - FMA), Perhimpunan Pedagang Surat Utang (HIMDASUN), dan Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia (PERBINA). Perwakilan penyelenggara infrastruktur pasar keuangan (IPK) yang telah beroperasi di Indonesia yaitu PT LSEG TSI dan PT Antara ETP juga turut hadir dalam peluncuran CCP tersebut.

Peluncuran CCP merupakan bentuk pemenuhan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), komitmen G20 *OTC Derivatives Market Reform, Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025*, serta Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN PPPK). CCP merupakan lembaga yang melakukan pembaruan utang (novasi) atas transaksi anggotanya dan menjalankan kliring. Dalam melakukan novasi, CCP menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi guna memitigasi risiko kredit lawan transaksinya, risiko likuiditas, dan risiko pasar terhadap naik turunnya harga di pasar.

Selanjutnya, dalam menjalankan kliring, CCP melakukan penyelesaian transaksi dengan perhitungan bersih untuk seluruh pelaku pasar (*multilateral netting*). CCP melakukan penjaminan atas penyelesaian transaksi peserta, menerapkan pengelolaan jaminan yang aman serta manajemen risiko untuk melindungi kepentingan anggota dan dirinya. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dengan menurunkan kebutuhan likuiditas anggotanya sehingga mendorong peningkatan transaksi di pasar. Pada tahap awal implementasi, CCP akan difokuskan pada instrumen DNDF dan Repo. Selanjutnya, penambahan produk akan diperluas secara bertahap dengan mempertimbangkan volume transaksi dan kesiapan pasar, termasuk infrastruktur.

Pengembangan CCP merupakan perwujudan sinergi antara Bank Indonesia dengan berbagai pemangku kepentingan. Bank Indonesia, sebagai otoritas yang mengatur CCP, bekerja sama dengan OJK selaku otoritas yang menaungi KPEI sebagai lembaga kliring dan penjaminan di pasar modal serta perbankan, BEI yang merupakan pemegang saham mayoritas KPEI, serta perbankan yang menjadi pemegang saham

sekaligus anggota CCP yang pada tahap awal diwakili oleh 8 (delapan) bank.

Sinergi bersama OJK memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan CCP dengan memberikan izin kepada perbankan untuk melakukan penyertaan modal di CCP. Selain itu, OJK menerbitkan sejumlah peraturan, termasuk ketentuan perhitungan permodalan untuk eksposur bank terhadap CCP dan persyaratan margin untuk transaksi derivatif yang tidak dikliringkan melalui CCP. Peraturan ini dirancang untuk memberikan insentif margin dan permodalan, sehingga mendorong kesiapan perbankan dalam mengkliringkan transaksinya melalui CCP.

Dari sisi permodalan, sinergi antara BEI, Bank Indonesia, dan delapan bank anggota CCP di tahap awal menjadi dimaksudkan untuk dapat memperkuat permodalan CCP sehingga meningkatkan kesinambungan bisnis KPEI sebagai CCP. Penguatan permodalan tersebut khususnya ditujukan untuk mendukung penanganan kondisi wanprestasi (*default management waterfall*) sebagai bagian dari pengelolaan risiko CCP.

Peran CCP dalam melakukan novasi, kliring, penjaminan atas penyelesaian transaksi peserta disertai pengelolaan jaminan dan manajemen risiko memiliki peran yang krusial dalam meningkatkan efisiensi dan mendorong peningkatan volume dan likuiditas transaksi pasar uang dan pasar valuta asing. Dengan keberadaan CCP, segmentasi pasar dapat diturunkan dan sebaliknya, efisiensi pasar dapat ditingkatkan sehingga mendukung transmisi kebijakan moneter dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, CCP akan mendukung implementasi Operasi Moneter *Pro-Market* untuk mengakselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas di Indonesia. Pendalaman pasar ini tidak hanya meningkatkan likuiditas, tetapi juga memperkuat kapasitas pembiayaan perekonomian yang akan memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Implementasi CCP diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan volume rata-rata harian transaksi valuta asing dari saat ini sebesar USD9 miliar (*year-to-date*) menjadi di atas USD10 miliar pada tahun 2025.

Pasar uang dan pasar valuta asing yang modern dan maju ditandai dengan volume serta likuiditas yang besar, keberagaman pelaku, serta pasar yang stabil dan efisien. Pasar yang modern dan maju juga didukung oleh infrastruktur yang saling terhubung, memiliki interoperabilitas tinggi, dan terintegrasi

dengan baik. Dalam konteks ini, implementasi CCP akan memberikan banyak manfaat dalam upaya pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing.

Keberhasilan implementasi CCP memerlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan. Dukungan

berkelanjutan diperlukan untuk memastikan CCP tetap mengikuti praktik terbaik global, sehingga mampu mencapai tujuan pendalaman pasar keuangan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar regional.

3) Penerbitan Ketentuan terkait Pelindungan Konsumen

Bank Indonesia terus mendukung dan memperkuat kebijakan pelindungan konsumen. Pelindungan konsumen dipandang sebagai suatu persyaratan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan produk dan layanan keuangan sehingga pada akhirnya mendukung tercapainya stabilitas sistem pembayaran dan stabilitas sektor keuangan. Isu pelindungan konsumen menjadi semakin penting sejalan dengan inovasi dan digitalisasi produk dan layanan di sektor pembayaran dan sektor keuangan yang di satu sisi memberikan banyak kemudahan dan efisiensi transaksi, di sisi lain menyebabkan peningkatan risiko bagi konsumen.

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia telah menerbitkan pedoman pelaksanaan edukasi dan penanganan pengaduan pelindungan konsumen, dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas Bank Indonesia terkait pelindungan konsumen khususnya dalam menangani pengaduan konsumen baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri.

4.2 Transformasi Organisasi dan Proses Kerja

Pada area organisasi dan proses kerja, fokus transformasi diarahkan untuk penguatan kerangka bauran kebijakan kelembagaan Bank Indonesia dan penyempurnaan ketentuan kelembagaan sebagai tindak lanjut UU P2SK. Upaya ini didukung oleh *streamlining* proses bisnis dan proses kerja berbasis digital. Hal ini ditempuh guna mewujudkan organisasi dengan proses bisnis yang lebih sederhana, ringkas, dan standar, serta proses kerja yang *agile* dan sejalan dengan kebutuhan di era digital.

1) Penguatan Kerangka dan Ketentuan Kelembagaan

a) Kerangka Bauran Kebijakan Kelembagaan (BKK)

Sejalan dengan penerbitan UU P2SK Pasal 58 yang semakin menegaskan pentingnya

penerapan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional serta dukungan kelembagaan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, Bank Indonesia melakukan penguatan BKK. Penguatan kerangka BKK dilakukan melalui *regulatory reform* berupa penyusunan ketentuan internal tentang BKK dan penyusunan/*revisit* ketentuan turunan lainnya di area kelembagaan.

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia tengah melakukan finalisasi atas pokok-pokok pengaturan internal tentang BKK yang mengintegrasikan bauran kebijakan kelembagaan pada tiga area, yaitu dukungan organisasi, sumber daya, dan tata kelola. Ketiga area tersebut sejalan dengan cakupan kelembagaan sebagaimana diatur dalam UU P2SK. Ketentuan internal tentang BKK menjadi dasar untuk mengintegrasikan proses BKK dengan BKBI, khususnya pada aspek manajemen strategis. Penyusunan ketentuan dimaksud dilanjutkan dengan penyempurnaan landasan hukum pada masing-masing kebijakan di area kelembagaan sebagai ketentuan turunan BKK. Hal ini bertujuan untuk memastikan keselarasan integrasi antarkebijakan dalam BKK maupun keselarasan masing-masing kebijakan di area kelembagaan dengan ketentuan BKK sebagai ketentuan induknya. BKK diterapkan melalui strategi 3P, yaitu perumusan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap masing-masing kebijakan di area kelembagaan.

b) Ketentuan mengenai Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Badan Supervisi Bank Indonesia

Bank Indonesia menyusun ketentuan mengenai organisasi, tata kerja, dan anggaran Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) dalam rangka memenuhi amanat UU P2SK khususnya Pasal 58A ayat (8). Ketentuan tersebut menjadi landasan hukum yang lebih lengkap bagi pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang BSBI ke depan.

Menindaklanjuti mandat UU P2SK tersebut, pada triwulan III 2024, Bank Indonesia telah menerbitkan PBI No.8 Tahun 2024 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Badan Supervisi Bank Indonesia yang diundangkan pada 20 September 2024. Konsep PBI tersebut sebelumnya telah disepakati bersama Komisi XI DPR RI dan dilakukan harmonisasi ketentuan bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

c) **Ketentuan mengenai Laporan Kelembagaan Bank Indonesia (LKBI)**

UU P2SK Pasal 58 Ayat (12) mengamanatkan bahwa Bank Indonesia harus menyusun ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan kinerja kelembagaan dalam Peraturan Dewan Gubernur (PDG). Ketentuan terkait laporan kinerja kelembagaan tersebut menjadi landasan bagi pelaksanaan LKBI secara *end-to-end*.

Sebagai tindak lanjut dari amanat tersebut, pada triwulan III 2024 Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan internal tentang LKBI. Ketentuan tersebut antara lain mengatur cakupan laporan yang terdiri atas laporan yang memuat pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia, kinerja program dan indikator kinerja utama Bank Indonesia, laporan yang memuat capaian kinerja Dewan Gubernur dan Anggota Dewan Gubernur, serta laporan yang memuat pelaksanaan anggaran tahunan Bank Indonesia. Ketentuan internal tentang LKBI juga mengedepankan pemanfaatan informasi digital yang optimal dalam penyusunan laporan. Ketentuan internal tersebut akan ditindaklanjuti dengan penyusunan ketentuan pelaksanaan sebagai panduan yang lebih teknis untuk menjaga standar dan kesinambungan pelaksanaan LKBI secara *end-to-end*. Melalui penerbitan ketentuan terkait LKBI, akuntabilitas dan transparansi Bank Indonesia kepada pemangku kepentingan diharapkan dapat semakin baik dan profesional.

d) **Ketentuan mengenai Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber**

Bank Indonesia menerbitkan ketentuan internal dan eksternal mengenai keamanan sistem informasi dan ketahanan siber. Peningkatan digitalisasi pada sektor keuangan tidak hanya membantu pertumbuhan ekonomi keuangan digital yang berkelanjutan, namun juga menimbulkan dampak lain berupa peningkatan

eksposur risiko siber. Insiden siber yang terjadi pada sektor keuangan dapat menimbulkan kerugian keuangan dan mengganggu stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, sebagai upaya mitigasi risiko siber, Bank Indonesia melakukan pengaturan dan pengawasan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber bagi penyelenggara sistem pembayaran, pelaku PUVA, serta pihak lain yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Hal ini juga sebagai upaya Bank Indonesia dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi keuangan digital yang berkelanjutan.

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia sedang menyusun ketentuan internal mengenai keamanan sistem informasi dan ketahanan siber. Penyusunan ketentuan tersebut merupakan lanjutan pasca penerbitan PBI tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber pada triwulan II 2024 yang mengatur tentang keamanan SI dan ketahanan siber bagi pihak eksternal.

e) **Ketentuan mengenai Pengaturan Informasi di Bank Indonesia**

Bank Indonesia sedang menyusun ketentuan internal terkait informasi Bank Indonesia sebagai bentuk *regulatory reform* pada area tata kelola dan pengelolaan informasi. Pengaturan ini diperlukan dalam rangka memenuhi mandat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan kerahasiaan informasi, yaitu UU P2SK, UU Keterbukaan Informasi Publik, dan UU Pelindungan Data Pribadi.

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia telah memetakan area pengaturan informasi dalam rangka memenuhi mandat perundang-undangan, terdiri atas manajemen informasi, keterbukaan informasi publik, dan pelindungan data pribadi. Bank Indonesia menyelaraskan seluruh area terkait pengaturan informasi dalam suatu kerangka pengaturan payung yang mencakup aspek perolehan, penanganan, dan pemanfaatan informasi. Substansi pengaturan yang *end-to-end* dan terintegrasi akan memperkuat tata kelola informasi yang selaras dengan mandat perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

2) **Penguatan dan Penyempurnaan Organisasi Bank Indonesia**

Bank Indonesia terus menjalankan mandatnya sebagaimana UU P2SK melalui penguatan visi, misi,

dan strategi Bank Indonesia. Salah satu penguatan strategi yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah penguatan fungsi organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan Bank Indonesia yang efektif, efisien, dan berkepatuhan. Penguatan fungsi organisasi Bank Indonesia senantiasa dilaksanakan dengan memperhatikan kerangka strategi masing-masing area (*strategy driven*), terjaganya kesinambungan organisasi dengan proses bisnis satuan kerja di Bank Indonesia, *best practice*, serta dukungan infrastruktur dan teknologi sesuai kebutuhan, dengan berlandaskan pada prinsip 3S (Simplifikasi, Standardisasi, dan Sistemisasi).

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia melakukan asesmen penguatan fungsi organisasi di area ekonomi keuangan inklusif dan hijau. Asesmen penguatan fungsi organisasi tersebut dilakukan sejalan dengan mandat UU P2SK dan upaya Bank Indonesia untuk mendorong pengembangan ekonomi keuangan inklusif dan hijau secara nasional. Penguatan fungsi dilakukan melalui penguatan organisasi satuan kerja yang menjalankan fungsi pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan hijau guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) No. 63 Tahun 2022 bahwa Bank Indonesia merupakan salah satu lembaga negara yang termasuk dalam kepindahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Bank Indonesia melakukan penguatan fungsi organisasi untuk mendukung pelaksanaan koordinasi dan dukungan operasional pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia di Komplek Perkantoran

Bank Indonesia (KOPERBI) IKN. Penguatan fungsi organisasi tersebut dilaksanakan melalui penugasan SDM untuk berkantor di KOPERBI IKN secara berkala. Selain itu, Bank Indonesia juga menyelaraskan *timeline* pemindahan SDM sesuai dengan rencana persiapan pemindahan Ibu Kota Negara, serta memperhatikan kesiapan infrastruktur dasar yang diperlukan.

3) *Business Process Re-engineering (BPR)*

Dalam mendukung digitalisasi di area kelembagaan, penguatan melalui *business process reengineering* (digital BPR) pada proses perumusan bauran kebijakan di Bank Indonesia dilakukan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan *platform Digital Workplace*. Proses pengambilan keputusan di Bank Indonesia telah dilakukan melalui *Digital Workplace* mulai dari tahap inisiasi, verifikasi, rekomendasi, hingga persetujuan pada Rapat Dewan Gubernur. Hal ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif, efisien, dan berkepatuhan. Implementasi *Digital Workplace* telah dilakukan sejak tahun 2023 dan akan terus diperkuat dengan pengembangan fitur untuk mendukung digital BPR.

Sejalan dengan visi organisasi untuk menjadi bank sentral digital terdepan, penguatan dan penyempurnaan *Digital Workplace* terus dilanjutkan melalui rangkaian evaluasi kebutuhan, pengujian, dan pengembangan *platform* guna mewujudkan prinsip *one input, one process, dan multi purposes*. Selain itu, untuk memudahkan pegawai dalam penggunaan *Digital Workplace*, secara berkala dilakukan sosialisasi dan pengkinian dokumen pedoman, infografis, dan



Desain Komplek Perkantoran Bank Indonesia (KOPERBI) di Ibu Kota Nusantara (IKN)

frequently asked question (FAQ) sebagai acuan proses bisnis terkini.

4.3. Transformasi SDM dan Budaya Kerja

Pelaksanaan digital BPR juga didukung penguatan aspek *people* melalui penguatan kepemimpinan, pengembangan *new capabilities*, serta penguatan *employee value proposition* (EVP). Transformasi SDM dilakukan melalui penerapan sistem kerja unggul di era digital yang didukung oleh fasilitas fisik dan digital untuk mencapai kinerja organisasi yang optimal. Sistem kerja ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja di seluruh lini organisasi. Selain itu, sistem kerja unggul di era digital diharapkan dapat memperkuat EVP Bank Indonesia yang pada akhirnya berdampak positif terhadap upaya memenuhi SDM dengan talenta terbaik dan menciptakan suksesi kepemimpinan yang berkelanjutan.

1) Penguatan Strategi Perencanaan SDM dan Suksesi Kepemimpinan

Bank Indonesia terus mendorong SDM yang berkinerja tinggi dan berakhlak mulia guna mewujudkan visi menjadi bank sentral digital terdepan. Dalam kaitan itu, Bank Indonesia mengoptimalkan strategi pengelolaan SDM yang didukung oleh *Digital Business Process* (DBP). Hal ini diharapkan dapat menghasilkan SDM yang unggul baik dari sisi kompetensi teknis maupun kompetensi perilaku, guna menciptakan calon pemimpin Bank Indonesia yang profesional dengan memiliki aspek 3-Smart, yaitu: berkompetensi (*book smart*), berpengalaman (*street smart*), dan berperilaku mulia (*spiritual smart*).

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia telah menyusun perencanaan SDM jangka menengah serta strategi pemenuhan SDM dalam rangka akselerasi pencapaian aspek 3-Smart. Dari aspek kuantitas, perencanaan SDM ditempuh melalui mekanisme *build*, *buy*, dan *borrow* dari eksternal, serta mekanisme promosi, reposisi, rotasi, maupun penugasan dari internal. Di samping itu, dari aspek kualitas, telah disusun perencanaan melalui penguatan Program Tugas Belajar (PTB) berupa target jumlah kandidat PTB dan program studi yang dituju dengan memperhatikan *skill* dan *future skill* yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia. Lebih lanjut, dalam meningkatkan asesmen perencanaan SDM Bank Indonesia, telah dilaksanakan asesmen potensi untuk seluruh pegawai pangkat Asisten Manajer dan Manajer sepanjang triwulan III 2024. Hasil asesmen potensi pegawai tersebut digunakan untuk menunjang

data pemetaan dalam rangka identifikasi *star talent* Bank Indonesia dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pengembangan pegawai untuk menciptakan *future leaders* Bank Indonesia ke depan.

2) Penguatan Strategi Pemenuhan SDM

Di tengah disrupsi inovasi era digital yang memengaruhi pola ketenagakerjaan dan keahlian baru, peningkatan pemenuhan SDM berkualitas semakin diperlukan. Bank Indonesia telah melakukan transformasi pada area pemenuhan SDM melalui penyempurnaan strategi rekrutmen dan penguatan manajemen karier pegawai. Hal ini bertujuan agar pegawai memiliki kepemimpinan yang kuat dan dapat bekerja secara optimal di era digital.

Pada triwulan III 2024, strategi pemenuhan SDM dari eksternal dilakukan dengan: (i) skema *build* melalui rekrutmen Pendidikan Calon Pegawai Muda (PCPM); (ii) skema *buy* melalui rekrutmen *pro-hire* untuk mengisi jabatan yang memerlukan kompetensi khusus; dan (iii) skema *borrow* melalui rekrutmen tenaga kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk pekerjaan yang sifatnya sementara atau *project based*. Kegiatan *open recruitment* tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemenuhan SDM yang semakin berkualitas khususnya dari sisi keilmuan digital dan mendukung persiapan suksesi kepemimpinan ke depan. Penguatan strategi rekrutmen juga dilakukan dengan memperluas kerja sama dalam menjangkau lulusan terbaik, di dalam maupun luar negeri. Pemenuhan lulusan terbaik dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) jalur *campus hiring* dalam negeri dan lembaga pengelola program pendidikan ke luar negeri seperti Chevening dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

3) Pengembangan Kapabilitas Digital SDM Bank Indonesia

Pengembangan kapabilitas digital bagi SDM merupakan bagian penting dari transformasi SDM dan budaya kerja di Bank Indonesia. Kapabilitas ini diperlukan untuk mendukung digitalisasi proses kerja dan meningkatkan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Dengan kapabilitas digital yang kuat, SDM dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas, mendorong efisiensi, dan memperkuat daya saing kelembagaan di era digital.

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia melaksanakan berbagai program pengembangan kompetensi dengan penambahan fokus pada program penguatan kapabilitas digital kebanksentralan yang mengacu

pada rancangan kurikulum Bank Sentral Digital. Program pembelajaran tersebut didukung dengan infrastruktur pembelajaran yang memadai, baik ruang kelas, pengajar/narasumber dari dalam dan luar negeri, serta platform digital untuk pembelajaran berupa *Learning Management System* (LMS) dan pengembangan *Digital/Cyber Library*. Fitur dalam platform tersebut terus dikembangkan dengan berbagai modul *e-learning* agar proses pembelajaran pegawai lebih optimal karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Program pengembangan kapabilitas *advance* lainnya juga dilakukan untuk meningkatkan kompetensi terkait ekonomi dan keuangan hijau, serta peran bank sentral dalam pengembangan keuangan berkelanjutan.

Penguatan kompetensi digital pegawai baik dari sisi konseptual, teknis, dan *ethics* dilakukan sebagai bagian dari upaya pengembangan *future skills* pegawai Bank Indonesia untuk suksesi kepemimpinan di era digital. Jalur program pendidikan di Bank Indonesia, baik calon pegawai, pegawai potensial, maupun calon pimpinan Bank Indonesia, telah mengadopsi kurikulum dengan penguatan substansi kebanksentralan, digital dan kepemimpinan. Pegawai level eksekutif (Pimpinan Satker Kantor Pusat) telah mengikuti *refreshment* program level eksekutif terkait penggunaan AI dalam organisasi. Hal ini agar level eksekutif juga memiliki pemahaman yang baik atas pemanfaatan teknologi digital termasuk *data analytics*, AI, *machine learning* dalam mendukung kredibilitas kebijakan dan kelembagaan bank sentral. Di samping itu, Bank Indonesia juga menyelenggarakan berbagai program penguatan kompetensi digital tematik, antara lain melalui *bootcamp digital* yang bekerjasama dengan perguruan tinggi nasional dan internasional.

4.4. Transformasi Digital

Transformasi digital Bank Indonesia terus dilakukan untuk mendukung pelaksanaan transformasi kebijakan dan kelembagaan guna tercapainya visi Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan. Transformasi digital dilakukan melalui perwujudan inovasi pada tiga area yang meliputi: (i) pengembangan *digital business platform* untuk mendukung digitalisasi di area Sistem Pembayaran dan Pendalaman Pasar Uang (*integrated digital payment system and finance*); (ii) pengembangan pusat data dan *artificial intelligence* (*integrated digital central bank*), untuk mendukung perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan kelembagaan; serta (iii) peningkatan kapabilitas teknologi dan pengamanan secara *end-to-end* (*integrated digital technology*).

1) Pengembangan *Digital Business Platform*

Bank Indonesia terus melakukan pengembangan *digital business platform* yang diprioritaskan pada digitalisasi sistem pembayaran dan digitalisasi proses pengambilan keputusan. Digitalisasi sistem pembayaran dilakukan melalui pengembangan perluasan cakupan sistem BI-FAST dan eksplorasi inovasi Rupiah Digital berupa Proyek Garuda. Selain itu, transformasi juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan tata kelola dalam proses pengambilan keputusan melalui platform *Digital Workplace* untuk mendukung pelaksanaan RDG yang diimplementasikan secara bertahap.

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia telah melakukan upaya pengembangan *digital business platform* sebagai berikut:

- a) Digitalisasi sistem pembayaran dilakukan melalui implementasi pengembangan dan perluasan fitur BI-FAST yang meliputi *direct debit*, *credit bulk*, dan *request for payment*.

Pengembangan dan perluasan fitur BI-FAST dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan menjaga ketersediaan layanan BI-FAST kepada masyarakat. Sampai dengan triwulan III 2024, perluasan fitur BI-FAST dipersiapkan untuk memasuki tahap *credit bulk*. Digitalisasi sistem pembayaran juga dilakukan melalui inovasi Rupiah Digital yang telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi atau *proof of concept* (PoC) untuk cakupan *wholesale cash ledger* Rupiah Digital. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi dan efisiensi sistem keuangan.

- b) Digitalisasi proses kerja dilakukan melalui pengembangan digitalisasi DMP

Dalam hal ini, telah dilakukan pengembangan platform *Digital Workplace* khususnya terkait fungsi-fungsi umum dan juga fungsi pengelolaan konten pada pelaksanaan RDG. Pengembangan lanjutan *Digital Workplace* diharapkan dapat mengakomodasi *straight through processing* antar tahapan pengambilan keputusan (*decision making process/DMP*) yang didukung oleh pemanfaatan kapabilitas *data analytics* dan *artificial intelligence* (AI). Pengembangan digitalisasi DMP untuk area kebijakan dan kelembagaan dilakukan secara bertahap dan terus diperluas hingga level satuan kerja sebagai solusi untuk mendukung terciptanya pola kerja *hybrid* yang *end-to-end*.

2) Pengembangan Pusat Data

Bank Indonesia terus melanjutkan pengembangan Pusat Data dalam rangka inovasi data dan digital untuk mendukung ekonomi digital serta mendukung proses bisnis kebijakan dan kelembagaan. Sebagai *epicentrum of change* dari transformasi digital Bank Indonesia, pengembangan pusat data dan pengelolaan informasi digital tetap berfokus pada langkah nyata untuk mewujudkan *Data-Driven Institution*, diantaranya adalah pemanfaatan AI dan *machine learning* (ML) untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Pengembangan pusat data mencakup 2 (dua) besaran tema, yaitu sebagai katalisator proses bisnis di Bank Indonesia dan penguatan kapabilitas pusat data. Kedua tema tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan pusat data secara *end-to-end* dimulai dari pengayaan konten, otomasi pengaliran dan penyiapan data, visualisasi data (*data factory*), eksplorasi dan inovasi pengolahan data baru termasuk pengembangan AI (*data innovation*), serta pengembangan *platform* dan Infrastruktur Pusat Data (*data platform*) yang seluruhnya berujung pada dukungan untuk menciptakan proses pembuatan keputusan yang lebih tepat dengan menggunakan teknologi berbasis data (*decision led intelligent*).

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia terus melanjutkan pengayaan konten dan otomasi pengaliran data dalam menyiapkan AI/ML untuk mendukung *use case* data analitik di area kebijakan dan kelembagaan. Bank Indonesia telah mengimplementasikan penerapan AI/ML yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Penerapan ini akan terus diperkuat dan diperluas seiring dengan perkembangan kebutuhan bisnis dan teknologi di Bank Indonesia.

Dari sisi teknologi, dilakukan pengembangan *platform* data secara bertahap. Saat ini sedang dikembangkan Portal Data agar hasil pengolahan data dapat diakses secara internal dan eksternal. Keberadaan teknologi tersebut bertujuan untuk melengkapi infrastruktur/*platform* data eksisting seperti *Data Lake*, *Data Catalog*, *Data Preparation*, *Data Visualization*, *Data Virtualization*, dan *Data Repository Loader and Connector*. Teknologi *Generative AI* (GenAI) juga telah diimplementasikan untuk menghasilkan narasi asesmen terhadap indikator *nowcasting* dan *forecasting*. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkaya konten data dan hasil olahan, termasuk untuk mendukung kebutuhan data statistik

dan publikasi kebijakan Bank Indonesia baik dalam bentuk visualisasi *chart* maupun dalam bentuk narasi.

3) Penggunaan Data dan AI dalam Analisis

Bank Indonesia memanfaatkan data dan AI sebagai katalisator dalam transformasi berbagai proses bisnis. Pada triwulan III 2024, Pusat Data Bank Indonesia terus memberikan layanan penyediaan data rutin berdasarkan *Advanced Release Calendar* (ARC), serta inovasi data dalam bentuk *forecasting* dan *nowcasting* yang menggunakan AI dan ML yang telah dikembangkan oleh para *engineer*, *data scientist* serta para *economist* Bank Indonesia. Pemanfaatan AI di Bank Indonesia mengacu pada prinsip VITAL (*Visualizing the outcomes, Theory understood, Algorithm fitted, dan Learn the meaning*) sehingga AI dapat digunakan secara optimal dalam implementasi proses bisnis di Bank Indonesia.

Pemanfaatan AI dan ML telah diimplementasikan pada sektor Moneter, Makroprudensial, dan Sistem Pembayaran. Pemanfaatan AI/ML dalam proses pengambilan keputusan di sektor Moneter dilakukan melalui pengembangan dalam bentuk *forecasting* dan *nowcasting* model prediksi ekonomi yang lebih akurat. Model prediksi dimaksud antara lain proyeksi untuk inflasi (*core* dan *volatile food*), PDB (komponen konsumsi rumah tangga, perumahan dan perlengkapan, serta transport dan komunikasi), nilai tukar, *yield USD*, dan *portfolio inflows*. Pada sektor Makroprudensial, AI/ML membantu menemukan pola atau tren terkait kredit total, kredit konsumsi, kredit modal kerja, *non performing loan*, *interest coverage ratio*, suku bunga kredit dan *yield SBN* untuk melengkapi wawasan asesmen makroprudensial. Sementara itu, pada sektor Sistem Pembayaran, AI dapat menganalisis data dalam skala besar (*big data*) seperti analisis transaksi berbasis simpanan, berbasis uang elektronik, dan berbasis kartu kredit, termasuk interkoneksi antarpelaku transaksi.

Penguatan juga dilakukan dari sisi otomasi aliran data melalui *straight through processing* sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Melalui *straight through processing*, data diperoleh secara langsung dari sumber terkait, disiapkan dan diolah di Pusat Data hingga didiseminasikan dalam berbagai bentuk *output*. Seluruh kapabilitas ini juga dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan pada BKK yang saat ini telah menyelesaikan tahapan *piloting* sebagai *quick win*. Pengembangan ini dilanjutkan secara bertahap untuk mendukung integrasi *Strategic*

Management, Strategic Finance dan Strategic Risk dalam tata kelola kelembagaan Bank Indonesia.

4) Peningkatan Kapabilitas Infrastruktur Teknologi

Bank Indonesia mendorong peningkatan kapabilitas infrastruktur teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan kualitas Sistem Informasi (SI) dalam mendukung pelaksanaan tugas. Peningkatan kapabilitas infrastruktur teknologi juga dilakukan untuk memitigasi potensi risiko ketahanan dan keamanan siber melalui adopsi teknologi terkini, sertifikasi, dan penguatan monitoring infrastruktur teknologi. Penerapan inovasi baru maupun peremajaan infrastruktur teknologi eksisting terus dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas infrastruktur teknologi.

Pada triwulan III 2024, peningkatan kapabilitas infrastruktur teknologi terus dilakukan untuk

meningkatkan kapabilitas dan kualitas sistem informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Salah satu upaya yang terus dilakukan adalah mengidentifikasi dan memitigasi ancaman siber serta memperkuat *monitoring tools* perangkat infrastruktur teknologi. Penerapan inovasi teknologi khususnya ditujukan untuk meningkatkan kualitas, stabilitas dan ketersediaan layanan SI Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia terus melakukan penguatan *data center* (DC) melalui penambahan kapasitas ruangan dan penguatan fasilitas pendukung DC dengan mengacu pada standar internasional. Bank Indonesia juga mempersiapkan infrastruktur teknologi SI untuk pembangunan KOPERBI di IKN melalui penyiapan perangkat Jaringan Komunikasi Data (JKD) dan perangkat kerja SI (*End User Devices*).





Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Barat



BAB 5

Capaian Kinerja Bank Indonesia Triwulan III 2024

Di tengah beratnya tantangan perekonomian global dan domestik, serta tuntutan implementasi dari amanat UU P2SK, Bank Indonesia dapat mencapai berbagai target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan memberikan dampak yang signifikan dan bermakna bagi perekonomian Indonesia. Capaian ini menunjukkan efektivitas respons kebijakan Bank Indonesia yang sejalan dengan perkembangan ekonomi dan lingkungan strategis terkini, didukung oleh penajaman sejumlah agenda transformasi, baik di area kebijakan maupun kelembagaan. Selain itu, upaya menjaga kredibilitas kelembagaan melalui penguatan kerangka dan implementasi sistem tata kelola yang baik dan profesional juga turut mendukung pencapaian kinerja Bank Indonesia. Pencapaian kinerja Bank Indonesia sepanjang triwulan III 2024 tecermin pada capaian IKU Bank Indonesia dalam 12 Program Strategis (PS) sebagai berikut:

PS 01 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan untuk mencapai stabilitas nilai Rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia terus berupaya untuk mendorong efektivitas transmisi kebijakan moneter. Salah satu upaya yang dilakukan, yakni melalui penguatan *framework* bauran kebijakan ekonomi dan moneter yang mendukung efektivitas bauran kebijakan Bank Indonesia. Penguatan *framework* pengelolaan moneter juga diintegrasikan dengan

pengembangan pasar uang. Hal ini dilakukan dalam rangka memperkuat pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar sesuai fundamental untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

1) Inflasi yang rendah dan stabil melalui pengendalian inflasi inti sebagai akuntabilitas Bank Indonesia

Inflasi inti pada triwulan III 2024 terjaga pada level rendah sebesar 2,09% (yoy), masih berada dalam rentang sasaran target $2,5 \pm 1\%$. Ke depan, inflasi inti diperkirakan tetap terjaga seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkau dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespons permintaan domestik, *imported inflation* yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Di samping itu, inflasi inti yang terjaga juga merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan GNPIP di berbagai daerah. Kebijakan Bank Indonesia dan sinergi tersebut dilakukan dalam rangka memastikan inflasi



Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Sulampua di Gorontalo

tetap terkendali dalam kisaran sasarannya di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.

Bank Indonesia menetapkan kebijakan suku bunga secara *forward looking* dan *pre-emptive* untuk memastikan inflasi terjaga dalam kisaran sasarannya. Pada September 2024, Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga kebijakan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00%. Keputusan ini konsisten dengan arah kebijakan moneter untuk memastikan tetap rendahnya prakiraan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 di dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$, penguatan dan stabilitas nilai tukar Rupiah, dan perlunya upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, kebijakan moneter masih difokuskan pada stabilitas nilai tukar Rupiah karena meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan koordinasi pengendalian inflasi pangan dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah). Dengan konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia serta eratnya pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) melalui penguatan GNPIP, inflasi IHK pada triwulan III 2024 tercatat sebesar 1,84% (yoy), tetap terjaga dalam kisarannya dan lebih rendah daripada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,51% (yoy). Bank Indonesia terus berkomitmen memperkuat efektivitas kebijakan moneter guna menjaga inflasi tahun 2024 dan 2025 terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, dengan tetap mendukung upaya penguatan pertumbuhan ekonomi.

2) **Terjaganya nilai tukar Rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar yang tecermin pada rerata nilai tukar Rupiah triwulanan dalam kisaran yang *tolerable***

Pada triwulan III 2024, nilai tukar Rupiah menguat didukung oleh bauran kebijakan moneter Bank Indonesia, meningkatnya aliran masuk modal asing, dan mulai meredanya ketidakpastian pasar keuangan global. Semakin jelasnya ekspektasi penurunan FFR yang lebih cepat dan lebih besar dari prakiraan serta diikuti dengan penurunan *yield US Treasury* tenor 2 (dua) dan 10 (sepuluh) tahun mendorong peningkatan aliran masuk modal asing dan penguatan mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan perkembangan ini, nilai tukar Rupiah pada akhir triwulan III 2024 menguat 0,78% dibandingkan dengan posisi akhir Agustus 2024. Penguatan Rupiah ini tercatat lebih tinggi daripada apresiasi mata uang regional seperti Won Korea dan Rupee India yang menguat sebesar 0,32% dan 0,13%.

Ke depan, nilai tukar Rupiah diperkirakan stabil sejalan dengan menariknya imbal hasil, rendahnya inflasi, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian. Seluruh instrumen moneter akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi OM *pro-market* melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI, untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk modal asing dan mendukung penguatan nilai tukar Rupiah. Bank Indonesia memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk memperoleh informasi terkini mengenai kondisi likuiditas di pasar valas dan memperoleh umpan balik dari pelaku pasar.

3) **Tercapainya suku bunga pasar uang sesuai dengan suku bunga acuan yang ditetapkan Rapat Dewan Gubernur**

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia mengendalikan suku bunga antara lain melalui pelaksanaan OM kontraksi dan ekspansi, serta penguatan proyeksi likuiditas harian. Sejalan dengan pengendalian yang dilakukan oleh Bank Indonesia, suku bunga pasar uang (IndONIA) bergerak dalam kisaran BI-Rate, yaitu 6,17% pada tanggal 30 September 2024. Sementara itu, suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9 dan 12 bulan pada 27 September 2024 sebesar 6,69%, 6,78% dan 6,81%, menurun dibandingkan hasil lelang pada 28 Juni 2024 sebesar 7,32%, 7,43% dan 7,53%. Penurunan suku bunga SRBI dilakukan sejalan dengan penurunan BI-Rate dengan tetap mendorong efektivitas SRBI sebagai instrumen operasi moneter yang *pro-market*. Langkah ini juga mendukung penguatan struktur suku bunga untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan mendorong aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, pengendalian tingkat suku bunga dilakukan melalui penguatan strategi transaksi *term repo* dan *swap* valas yang kompetitif untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan.

4) **Tercapainya kecukupan cadangan devisa sesuai target yang ditetapkan Rapat Dewan Gubernur**

Pada triwulan III 2024, posisi cadangan devisa mencapai 149,9 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal, stabilitas makroekonomi, dan sistem keuangan.

Bank Indonesia terus menyempurnakan pengaturan dalam pengelolaan cadangan devisa dalam rangka mendukung kecukupan cadangan devisa. Penyempurnaan pengaturan dilakukan terhadap kebijakan strategis, kebijakan operasional maupun penyempurnaan tata cara pelaksanaan proses bisnis. Bank Indonesia juga senantiasa meningkatkan efisiensi proses bisnis dengan mengoptimalkan digitalisasi, khususnya untuk pemantauan kecukupan cadangan devisa. Di samping itu, koordinasi secara berkala dengan Pemerintah dan bank sentral lain di kawasan melalui program Kerjasama Keuangan Internasional (KKI) dalam rangka pengelolaan cadangan devisa juga terus dilakukan. Ke depan, Bank Indonesia memandang jumlah cadangan devisa akan tetap memadai untuk mendukung kebijakan moneter dan memenuhi kewajiban internasional seiring kondisi ekonomi yang terjaga.

5) Ketersediaan data dan statistik yang Lengkap, Akurat, Terkini, dan Utuh (LAKU) untuk perumusan kebijakan Bank Indonesia dan publikasi

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia menerbitkan rata-rata 53 publikasi statistik setiap bulan melalui *website* Bank Indonesia dan 30 data dan/atau statistik yang disampaikan secara langsung kepada lembaga internasional. Publikasi tersebut antara lain: (i) Laporan Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) periode triwulan II 2024; (ii) Posisi Investasi Internasional (PII) Indonesia periode triwulan II 2024; (iii) Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) periode Mei-Juli 2024; (iv) Perkembangan Uang Beredar periode Juli-September 2024; (v) Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) periode Juni-Agustus 2024; (vi) Statistik Keuangan Daerah (SEKDA) periode Juni-Agustus 2024 untuk 34 Provinsi di Indonesia; (vii) Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) periode Juni-Agustus 2024; serta (viii) Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia (SPIP) periode Juni-Agustus 2024.

Bank Indonesia juga menyampaikan data dan statistik secara langsung kepada lembaga/fora internasional sebagai pemenuhan komitmen Indonesia dalam *global surveillance*. Data dan statistik yang disampaikan antara lain: (i) kepada BIS, yaitu *Credit and Money*, *Balance of Payments and International Trade*, dan *Locational Banking Statistics* (LBS), *Debt Securities Statistics*, dan *Red Book Statistics*; (ii) kepada IMF, yaitu *Balance of Payments* (BOP), *International Investment Position* (IIP), *Exchange Rates*, *International Reserves and Foreign Currency Liquidity* (IRFCL), *Coordinated Portfolio Investment Survey* (CPIS), *Coordinated Direct Investment Survey* (CDIS), *Financial*

Soundness Indicators (FSI), *Money and Banking* (SRF), *Analytical Accounts of the Banking Sectors* dan *Analytical Accounts of the Central Bank*; (iii) kepada OECD, yaitu *Consumer Opinion Surveys*, *Business Tendency Survey*, *Interest Rates*, dan *Monetary Aggregates*; (iv) kepada World Bank, yaitu *Quarterly External Debt Statistics*; serta (v) kepada ASEAN Secretariat, yaitu *Extended Balance of Payment Services* (EBOPS).

Bank Indonesia juga memublikasikan laporan hasil survei secara luas dalam rangka menyediakan berbagai indikator makroekonomi sebagai acuan bagi *stakeholder*. Laporan hasil survei yang dipublikasikan tersebut antara lain Survei Konsumen (SK), Survei Penjualan Eceran (SPE), Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Survei Harga Properti Residensial (SHPR), Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan, Perkembangan Properti Komersial (PPKom), Survei Perbankan (SBank), serta *Prompt Manufacturing Index* (PMI)-Bank Indonesia.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan standar publikasi statistik serta ketersediaan data yang berkualitas, termasuk menjaga konsistensi publikasi, Bank Indonesia secara berkesinambungan terus menjalin komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan K/L, industri, akademisi, lembaga internasional, bank sentral, ataupun *stakeholder* lain secara luas.

PS 02 Memperkuat sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia terus melakukan penguatan asesmen, rekomendasi, dan koordinasi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan Pemerintah yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, baik pada level nasional maupun regional. Hasil dari sinergi tersebut berkontribusi pada: (i) inflasi yang terkendali di dalam rentang sasaran nasional; (ii) transaksi berjalan yang sehat dan mendukung stabilitas eksternal; (iii) pencapaian target inflasi dan pertumbuhan ekonomi; serta (iv) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung sasaran pencapaian *high income country*.

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan

reformasi struktural Pemerintah sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

6) **Terjalannya koordinasi dengan Pemerintah untuk mendukung pengendalian inflasi dan reformasi struktural**

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat, Daerah, dan mitra strategis lainnya terus memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi melalui TPIP dan TPID, termasuk melalui penguatan program GNPIP, untuk memastikan inflasi tetap rendah dan terkendali dalam kisaran sasarannya. Sinergi antarpihak yang semakin kuat mendukung penurunan inflasi IHK pada triwulan III 2024 dan terjaga dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Sepanjang triwulan III 2024, berbagai upaya sinergi terus dilakukan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah dalam pengendalian inflasi, terutama inflasi pangan, sehingga dapat mendukung penurunan inflasi *volatile food* menjadi berada di bawah 5% (yoy). Bank Indonesia bersama dengan K/L anggota TPIP serta berbagai mitra strategis terus bersinergi dalam sejumlah kegiatan TPIP antara lain: (i) pemantauan risiko inflasi hingga akhir tahun 2024; (ii) pembahasan prospek dan risiko inflasi tahun 2025; serta (iii) pembahasan awal penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi Nasional periode 2025-2027 guna mengawal pencapaian sasaran inflasi di tengah berbagai tantangan struktural maupun siklikal ke depan. Pasca kegiatan sinergi dimaksud, telah dihasilkan 3 tindak lanjut pengendalian inflasi termasuk pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di beberapa daerah.

Pada 28 Agustus 2024, Bank Indonesia bersama Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) TPIP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) Pengendalian Inflasi dengan tema "Penguatan Infrastruktur dan Teknologi untuk Pengamanan Produksi dan Efisiensi Rantai Pasok Menuju Ketahanan Pangan Nasional". Sejumlah kesepakatan pada Rakorpusda tersebut, yakni: (i) memperkuat infrastruktur irigasi pertanian dan penelitian untuk akselerasi inovasi teknologi pertanian; (ii) mengendalikan alih fungsi lahan pertanian dengan memastikan ketersediaan lahan pertanian yang seimbang untuk memenuhi ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian *existing* dan baru; (iii) memperkuat integrasi transportasi dan konektivitas melalui peningkatan konektivitas sarana prasarana distribusi pangan serta peningkatan efisiensi logistik secara nasional maupun intradaerah; dan (iv) memperkuat koordinasi penyediaan data pangan melalui peningkatan kualitas akurasi data pangan dan penguatan sinergi untuk penyusunan data neraca pangan daerah. Sepanjang triwulan III 2024, Bank Indonesia juga melaksanakan beberapa Rapat Koordinasi (Rakor) TPIP dan TPID di daerah yaitu di wilayah Jawa pada 14 Agustus 2024 dan di wilayah Sulampua pada 26 September 2024. Rakor TPIP dan TPID dilaksanakan dalam rangka memperkuat komitmen dan mengakselerasi implementasi program unggulan pengendalian inflasi daerah secara *targeted*, masif, dan terintegrasi. Kegiatan rakor TPIP dan TPID tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan dengan memerhatikan karakteristik



Seminar Nasional 2024: Implementasi Hilirisasi Pangan di Daerah di Medan



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Satuan Tugas Nasional Local Currency Transaction (LCT) di Jakarta

penyebab inflasi di masing-masing wilayah antara lain terkait peningkatan produktivitas pangan, penguatan ekosistem pangan yang terintegrasi, serta efisiensi rantai pasok.

Ke depan, Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk memperkuat sinergi bersama TPIP, TPID, dan mitra strategis lainnya serta mendukung upaya pengendalian inflasi khususnya inflasi pangan dan menjaga ekspektasi inflasi melalui penguatan implementasi GNPIP berupa fasilitasi pasar murah, koordinasi penguatan KAD, dan penguatan komunikasi kebijakan pengendalian inflasi.

Bank Indonesia melanjutkan sinergi kebijakan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya di sektor manufaktur melalui program kerja sama dan perpanjangan Nota Kesepahaman (NK). Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam Rapat Koordinasi Eselon I pada 9 Agustus 2024 telah menyepakati 14 (empat belas) program kerja sama pada tahun 2024. Program kerja tersebut difokuskan pada upaya memperkuat strategi peningkatan daya saing dan nilai tambah industri antara lain melalui: (i) pengembangan kebijakan hilirisasi pangan dan mineral, serta industri prioritas lain; (ii) keberlanjutan kolaborasi dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas industri yang inklusif, melalui pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM)/Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) manufaktur; (iii) penguatan perumusan strategi pembiayaan yang berkelanjutan untuk memperkuat pengembangan sektor industri prioritas; serta (iv) optimalisasi pemanfaatan digital dan data/informasi untuk memperluas kapasitas sektor industri. Sebagai bentuk implementasi dari kesepakatan

program kerja sama dimaksud, telah dilakukan serangkaian kegiatan sinergi antara Bank Indonesia dan Kemenperin, yaitu: (i) diseminasi hasil studi Bank Indonesia “Strategi Kebijakan Perluasan Hilirisasi Pangan”; (ii) fasilitasi peningkatan kapasitas IKM/UMKM melalui pengembangan klaster untuk mendukung pengembangan hilirisasi pangan, keikutsertaan IKM/UMKM pada FEKDI x KKI 2024 guna meningkatkan akses pasar, dan penyelenggaraan *workshop e-smart* IKM untuk meningkatkan literasi digital; dan (iii) pelaksanaan kegiatan koordinasi Satuan Gugus Tugas Nasional LCT untuk mendukung peningkatan pemanfaatan LCT dalam transaksi perdagangan dan investasi. Lebih lanjut, untuk menjaga kesinambungan sinergi antara Bank Indonesia dengan Kemenperin, telah dilakukan adendum terhadap NK Bank Indonesia dan Kemenperin tentang Kerja Sama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Kementerian Perindustrian. Adendum tersebut menjadi landasan untuk perpanjangan masa berlaku NK selama 1 (satu) tahun ke depan hingga September 2025. Mengacu pada berbagai kesepakatan program kerja dan serangkaian kegiatan sinergi antara Bank Indonesia dan Kemenperin dimaksud, telah diperoleh 10 rekomendasi baru dan/atau tindak lanjut rekomendasi sebelumnya untuk mendorong kinerja industri manufaktur. Ke depan, Bank Indonesia dan Kemenperin akan terus melakukan sinergi dalam rangka memperkuat daya saing sektor manufaktur nasional, menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sepanjang triwulan III 2024, sinergi lintas K/L terus dilakukan termasuk melalui Sekretariat Bersama

(Sekber) Pariwisata. Sinergi ditempuh untuk memantau kemajuan tindak lanjut kesepakatan Rapat Koordinasi *High Level* Sekber Pariwisata 2024 (Rakor HL) dan langkah penguatan yang diperlukan untuk akselerasi kinerja pariwisata nasional. Rakor Sekber Pariwisata tingkat eselon I pada 31 Juli 2024, 30 Agustus 2024, dan 3 September 2024 menghasilkan 39 kesepakatan yang harus ditindaklanjuti oleh K/L terkait. *Deliverables* yang telah diselesaikan yakni: (i) pengkinian asesmen dan pengukuran indikator penerapan pariwisata berkualitas (*Quality Tourism/QT*) di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) tahun 2024; (ii) pelaksanaan *International Quality Tourism Conference (IQTC)* 2024 dan *readiness dialogue* WEF pada 29-30 Agustus 2024 di Bali; (iii) penambahan rute penerbangan untuk mendukung wisatawan mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus); (iv) penyelesaian beberapa ruas jalan tol pendukung koridor perjalanan wisnus; dan (v) pelaksanaan kolaborasi berbagai dukungan pengembangan Desa Wisata dan UMKM pendukung pariwisata-ekonomi kreatif. Sinergi tersebut juga memantau kemajuan langkah penguatan pariwisata, khususnya dalam rangka pengembangan pariwisata berkualitas di destinasi, antara lain melalui pengesahan Perpres Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur, pembahasan rencana

peraturan terkait penguatan dukungan pendanaan untuk pariwisata berkualitas, serta rencana peraturan terkait penerapan pariwisata berkualitas di Bali.

7) Terjalannya sinergi kebijakan moneter-fiskal untuk menjaga stabilitas makro dan pertumbuhan ekonomi

Bank Indonesia dan Pemerintah terus melanjutkan sinergi kebijakan moneter dan fiskal. Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia telah menyampaikan 11 pandangan kepada Pemerintah mengenai evaluasi dan proyeksi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar Rupiah, dan inflasi, serta respons bauran kebijakan Bank Indonesia, untuk mendukung penetapan asumsi dasar ekonomi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) oleh Pemerintah. Pandangan Bank Indonesia tersebut antara lain disampaikan pada rapat kerja Badan Anggaran dan Komisi XI DPR-RI.

Selain itu, sebagai upaya mendukung sinergi kebijakan moneter dan fiskal, Bank Indonesia senantiasa memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, termasuk K/L melalui peningkatan kualitas layanan kebanksentralan serta penyelenggaraan Forum Harmonisasi (Forhar). Salah satu upaya penguatan koordinasi dan peningkatan kualitas layanan diwujudkan melalui penyelenggaraan *Central Banking Services Festival (CBFest)* sebagai bentuk manifestasi transformasi di bidang pendukung kebijakan utama melalui *showcase* dan publikasi layanan kebanksentralan.

BOKS 3. CBFest 2024: Embracing Innovation for the Future of Central Banking Services



Pembukaan *Central Banking Services Festival (CBFest)* 2024 di Jakarta

Penguatan sinergi antar-institusi menjadi kunci utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. *Central Banking Services Festival (CBFest)* merupakan ajang tahunan yang terus berkembang dan hadir

dengan tema yang disesuaikan dengan dinamika lingkungan strategis terkini. Setiap tahunnya, CBFest menjadi wadah bagi peningkatan substansi dan konteks layanan bank sentral yang sejalan dengan dinamika perekonomian global antara lain mencakup



Penandatanganan Nota Kesepahaman (NK) antara Bank Indonesia dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta

transaksi keuangan pemerintah dan perbankan, operasional treasury, hingga layanan perizinan terpadu.

Mengusung tema *“Embracing Innovation for The Future of Central Banking Services”*, CBFest 2024 yang berlangsung pada 28-29 Agustus di Jakarta berfokus pada inovasi dan digitalisasi, termasuk pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* untuk mendukung seluruh pilar layanan kebanksentralan. Penyelenggaraan CBFest 2024 dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari K/L Pemerintah, lembaga keuangan, hingga bank sentral negara lain. CBFest 2024 diisi dengan *Central Banks Dialogue (CB Dialogue)* sebagai forum diskusi strategis untuk memperkuat kolaborasi antar bank sentral dalam menghadapi tantangan global.

Pada CBFest 2024 juga dilakukan penandatanganan NK antara Bank Indonesia dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Kesepahaman ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang kedua lembaga, sekaligus memberikan dampak strategis yang signifikan. Pertama, sinergi kebijakan investasi dengan kebijakan makroekonomi, moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran bertujuan menjaga persepsi positif terhadap stabilitas dan prospek ekonomi nasional. Langkah ini memperkuat kepercayaan pelaku pasar domestik dan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Kedua, kolaborasi dalam mempromosikan investasi di tingkat global, nasional, dan daerah menjadi strategi untuk menarik aliran modal baru. Sinergi ini memungkinkan

Indonesia untuk memperluas cakupan investasi pada sektor-sektor prioritas, termasuk teknologi, hilirisasi, dan energi baru-terbarukan. Ketiga, penyelarasan perizinan di sektor keuangan dan investasi lainnya berfungsi menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya saing Indonesia, sekaligus mempercepat implementasi berbagai proyek strategis.

Keberadaan NK tersebut juga memperkuat landasan hubungan antara Bank Indonesia dan Kementerian Investasi, sekaligus membuka peluang kerja sama yang lebih luas melalui sinergi perijinan terkait sektor keuangan, pengembangan proyek prioritas hilirisasi dan energi baru-terbarukan, kemitraan dalam bidang penanaman modal, serta pengembangan sumber daya manusia. Bank Indonesia menekankan bahwa modernisasi proses bisnis kini menjadi prioritas. Dengan mengadaptasi teknologi terbaru, Bank Indonesia dapat meningkatkan fleksibilitas terhadap instrumen pasar uang dan valuta asing, memperkuat tata kelola untuk meningkatkan *traceability* dan audit atas seluruh transaksi, hingga pembukuan yang bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan kelembagaan.

Melalui penguatan sinergi ini, Indonesia semakin siap menghadapi dinamika perekonomian global, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai negara dengan daya saing tinggi di kancah internasional. Kolaborasi yang erat antara institusi diharapkan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih kokoh, berkelanjutan, dan inklusif.

CBFest 2024 menjadi momentum bagi Bank Indonesia untuk merumuskan solusi masa depan layanan bank sentral yang lebih inovatif dan responsif. Hal ini merupakan wujud nyata transformasi Bank Indonesia dalam memberikan layanan kebanksentralan yang

prima untuk mendukung pencapaian visi Bank Indonesia menjadi bank sentral digital terdepan dengan tata kelola yang kuat yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara *emerging markets* untuk Indonesia maju.

PS 03 Menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta surveilans makroprudensial untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia mengimplementasikan kebijakan dan surveilans makroprudensial secara *forward looking* dan inovatif. Hal ini tecermin pada: (i) kisaran pertumbuhan kredit yang sesuai dengan prakiraan makroekonomi; (ii) terjaganya risiko likuiditas 30 bank besar; serta (iii) peningkatan inklusi ekonomi, inklusi keuangan dan keuangan berkelanjutan. Implementasi kebijakan tersebut dimaksudkan untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan dengan tetap memitigasi dan mengelola risiko sistemik, serta mendorong inklusi ekonomi, inklusi keuangan, dan keuangan berkelanjutan.

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mengimplementasikan kebijakan dan surveilans makroprudensial secara *forward looking* dan inovatif sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

8) Tercapainya kisaran pertumbuhan kredit/pembiayaan yang sesuai dengan prakiraan makroekonomi

Pada triwulan III 2024, pertumbuhan kredit perbankan tercatat sebesar 10,85% (yoy), lebih tinggi daripada periode yang sama tahun 2023 sebesar 8,96% (yoy). Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit didorong oleh minat penyaluran kredit yang meningkat, berlanjutnya realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan, dan dukungan KLM Bank Indonesia. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didorong oleh kinerja usaha korporasi yang terjaga. Secara sektoral, pertumbuhan kredit pada sebagian besar sektor ekonomi tetap kuat, khususnya pada sektor Jasa Dunia Usaha, Perdagangan, Industri, Pertambangan, dan Pengangkutan. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit terjadi pada kredit modal kerja, kredit konsumsi, dan kredit investasi. Ke depan, pertumbuhan kredit diperkirakan terus berlanjut terutama didorong oleh penguatan implementasi KLM.

Bank Indonesia terus memperkuat implementasi kebijakan makroprudensial longgar untuk mendorong

pertumbuhan kredit/pembiayaan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Hingga September 2024, Bank Indonesia telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp256,1 triliun, yaitu kepada kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp118,6 triliun, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp110,5 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp24,4 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp2,6 triliun. Insentif KLM tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas, yaitu Hilirisasi Minerba dan Pangan, UMKM, Sektor Otomotif, Perdagangan dan LGA, serta sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu, Bank Indonesia juga mempertahankan rasio CCyB sebesar 0%, RIM pada kisaran 84-94%, rasio *Loan to Value* (LTV)/*Financing to Value* (FTV) paling tinggi sebesar 100% dan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor paling rendah 0%, serta Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 5% dengan fleksibilitas *repo* sebesar 5% dan rasio PLM syariah sebesar 3,5% dengan fleksibilitas *repo* sebesar 3,5%. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makroprudensial akomodatif dan mempererat sinergi dengan Pemerintah, KSSK, perbankan, serta dunia usaha agar dapat mendukung peningkatan kredit/pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

9) Terjaganya risiko likuiditas 30 Bank Besar (BB)

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia turut mendukung terjaganya ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, di tengah masih berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global. Perbankan terpantau mampu melanjutkan intermediasi dengan tetap menjaga likuiditas. Hal ini tecermin pada indikator rasio Alat Likuid per Dana Pihak Ketiga pada 30 BB yang mencapai 22,96%. Perkembangan tersebut sejalan dengan kenaikan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) di tengah berlanjutnya akselerasi penyaluran kredit yang diperkuat oleh *stance* kebijakan OM *pro-market* yang mendukung pengelolaan likuiditas dengan tetap mendorong pendalaman pasar uang melalui perbankan. Ke depan, Bank Indonesia akan terus menjaga kecukupan likuiditas sehingga dapat

menopang penyaluran kredit/pembiayaan perbankan secara optimal serta memperkuat sinergi dengan KSSK untuk memitigasi berbagai risiko ekonomi akibat dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global yang berpotensi mengganggu ketahanan sistem keuangan domestik.

Bank Indonesia senantiasa mendorong intermediasi yang optimal melalui pelaksanaan surveilans dan pengawasan yang mendukung pencapaian sasaran kebijakan makroprudensial seiring dengan implementasi UU P2SK. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap sistem keuangan dengan menggunakan pendekatan *Dynamic Systemic Risk Surveillance* (DSRS) yang bersifat *integrated* dengan mempertimbangkan hasil pengawasan pada pilar moneter-market dan sistem pembayaran. Pengawasan bersifat menyeluruh terhadap seluruh elemen sistem keuangan, baik individual maupun industri, termasuk infrastruktur yang mendukung kelancaran sistem keuangan yang dapat berpengaruh terhadap potensi terjadinya risiko sistemik. Pengawasan DSRS diselaraskan dengan penilaian Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur Teknologi (TIKMI), baik kepada objek pengawasan di pilar moneter dan *market* maupun sistem pembayaran. DSRS diperkuat aspek *risk appetite* dan perilaku bank dalam menganalisis pembiayaan/intermediasi disertai *forward looking analysis* untuk melihat pencapaian target intermediasi dengan mempertimbangkan dampak terhadap risiko kredit, likuiditas, dan permodalan. Pendekatan pengawasan DSRS didukung *tools* pengawasan, antara lain *interconnectedness*, *stress test*, dan *contagion analysis*, dengan pemanfaatan teknologi dalam mendukung pelaksanaan surveilans dan pengawasan (*Suptech*).

10) Pangsa kredit yang inklusif dan/atau hijau

Bank Indonesia terus mendorong pembiayaan kepada UMKM dalam rangka mendorong inklusi ekonomi dan keuangan. Pada triwulan III 2024, kredit UMKM tumbuh sebesar 5,04% (yoy) yang utamanya bersumber dari Usaha Kecil dan Mikro. Perkembangan akses pembiayaan kepada UMKM yang masih tetap tumbuh positif tersebut didukung upaya intermediasi oleh perbankan dan Institusi Keuangan Non-Bank (IKNB). Peran IKNB, terutama Perusahaan Pembiayaan dan *fintech*, turut mendorong upaya inovasi pembiayaan kepada UMKM melalui kanal digital sehingga turut menjadi katalisator peningkatan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang pada triwulan III 2024 mencapai 33,55%. Bank Indonesia terus berupaya mendorong kontribusi bank secara optimal dalam

pemenuhan RPIM diantaranya melalui pemberian insentif KLM kepada bank penyalur kredit/pembiayaan untuk disalurkan ke sektor-sektor prioritas, termasuk UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan pencapaian RPIM bank serta pembiayaan ultramikro (UMi).

Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan K/L terkait dalam pengembangan model bisnis dan fasilitasi *business matching* pembiayaan UMKM. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dalam rangka mendorong akselerasi pengembangan ekonomi keuangan inklusif dan hijau dalam rangka peningkatan kapasitas dan produktivitas UMKM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dengan sinergi yang erat antara Bank Indonesia dengan K/L, serta Lembaga Keuangan, dalam pameran KKI 2024 tercatat adanya komitmen *Business Matching* pembiayaan sebesar Rp188,2 miliar (antara 180 UMKM dengan 15 Lembaga Keuangan). Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga memberikan apresiasi kepada bank yang mendukung pembiayaan inklusif.

PS 04 Memperkuat sinergi kebijakan serta pengawasan makroprudensial dengan KSSK dan otoritas terkait untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia terus melakukan penguatan sinergi kebijakan dan pengawasan makroprudensial antara Bank Indonesia dengan KSSK dan otoritas lain. Sinergi kebijakan makroprudensial yang dilakukan mampu mendukung pertumbuhan kredit yang seimbang dan berkualitas. Selain itu, sinergi dalam pelaksanaan surveilans juga mendukung ketahanan sistem keuangan, termasuk pencegahan dan penanganan krisis. Selain itu, sinergi kebijakan dan pengawasan dilakukan untuk mendorong peningkatan pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan.

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan serta pengawasan makroprudensial dengan KSSK dan otoritas terkait sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

11) Terjalinnnya sinergi kebijakan untuk mendukung intermediasi yang seimbang dan berkualitas

Bank Indonesia terus bersinergi dengan OJK melalui harmonisasi kebijakan dan pengaturan untuk mendukung intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.

7 Tahun 2024 dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 7 Tahun 2024 mengenai Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (RPLN). RPLN merupakan rasio kewajiban jangka pendek terhadap modal Bank yang dihitung secara harian. Penyempurnaan pengaturan instrumen dimaksud merupakan upaya mendorong intermediasi yang seimbang, yaitu mengoptimalkan utang luar negeri bank dan kewajiban bank lainnya dalam valuta asing sebagai salah satu sumber pendanaan Bank. Pengembangan RPLN dilakukan dengan mempertimbangkan siklus keuangan dan ekonomi untuk memperkuat ketahanan sektor keuangan sebagai bagian dari mitigasi risiko sistemik yang timbul dari dinamika aliran modal asing. RPLN juga merupakan instrumen yang bersifat kontrasiklikal melalui penerapan batasan RPLN sebesar 30% ditambah dan/atau dikurangi parameter kontrasiklikal. Melalui fitur tersebut, pendanaan luar negeri jangka pendek dapat dikelola baik dari sisi risiko maupun manfaatnya mengikuti kebutuhan perekonomian dan perkembangan kondisi sistem keuangan.

Penyusunan ketentuan tersebut telah melalui tahapan harmonisasi bersama OJK. Harmonisasi rancangan ketentuan dilakukan baik dalam bentuk pertemuan koordinasi maupun pemberian tanggapan tertulis untuk rancangan PBI dan rancangan PADG. Masukan dari OJK tersebut memberikan pandangan yang lebih luas dari aspek mikropprudensial, sehingga diharapkan proses transmisi untuk mendorong intermediasi yang seimbang dan berkualitas dapat berjalan lebih efektif.

12) Terjalinnnya sinergi kebijakan untuk mendukung ketahanan sistem keuangan, termasuk pencegahan dan penanganan krisis

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi lintas otoritas sektor keuangan melalui KSSK. Pada 29 Juli 2024, Bank Indonesia bersama lembaga anggota KSSK menyelenggarakan Rapat Berkala KSSK III 2024. Rapat Berkala diawali dengan rangkaian *focus group discussion* (FGD) bersama *chief economist* dan *policy dialogue* lintas K/L untuk *sharing* pandangan mengenai *outlook* perekonomian dan kebijakan di masing-masing lembaga. Rapat Berkala KSSK III 2024 menyimpulkan bahwa stabilitas sistem keuangan (SSK) Indonesia pada triwulan III 2024 masih terjaga, didukung oleh kondisi makroekonomi dan sektor keuangan yang stabil. Pada 23 Agustus 2024, Bank Indonesia bersama lembaga anggota KSSK bersinergi melaksanakan Simulasi Krisis Nasional (Simkrisnas) untuk menguji kerangka Protokol Manajemen Krisis (PMK) KSSK, terutama dalam konteks penilaian kondisi krisis sistem keuangan

dan penyampaian rekomendasi langkah-langkah penanganan krisis sistem keuangan.

Selain itu Bank Indonesia, OJK, dan LPS telah menyepakati penyempurnaan NK terkait integrasi pelaporan pada tanggal 22 Juli 2024. Hal ini dilandaskan pada peningkatan irisan tugas dan kewenangan antar lembaga sebagai konsekuensi penguatan mandat Bank Indonesia, OJK, dan LPS dalam UU P2SK. Dengan penyempurnaan NK dimaksud, penguatan integrasi pelaporan diharapkan dapat menjadi sarana bagi pelaporan perbankan yang lebih efisien, berkualitas tinggi, dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan. Selain itu, integrasi pelaporan juga diharapkan dapat semakin efektif mendukung perumusan kebijakan di masing-masing lembaga dan berkontribusi positif bagi perekonomian nasional. Sampai dengan triwulan III 2024, Bank Indonesia sudah menindaklanjuti 5 kesepakatan dengan K/L sebagai bagian dari sinergi untuk mendukung ketahanan sistem keuangan.

13) Terjalinnnya sinergi kebijakan dalam rangka mendorong pembiayaan inklusif dan/atau keuangan berkelanjutan

Bank Indonesia turut memperkuat koordinasi dengan *stakeholder* dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan berkelanjutan. Koordinasi dilakukan oleh Bank Indonesia antara lain dengan: (i) Dewan Standar Keberlanjutan (DSK) untuk mempersiapkan adaptasi standar pengungkapan keberlanjutan global di Indonesia; serta (ii) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemkenko Marves), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) untuk menyiapkan Kalkulator Hijau sebagai infrastruktur keuangan berkelanjutan bagi perbankan dan dunia usaha. Selain itu, Bank Indonesia berpartisipasi aktif dalam *Task Force* Penyempurnaan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI).

PS 05 Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, pengelolaan uang Rupiah, dan percepatan ekonomi keuangan digital untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia terus melakukan penguatan dan implementasi kebijakan Sistem Pembayaran, termasuk dalam pengelolaan uang Rupiah. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai stabilitas Sistem Pembayaran melalui digitalisasi Sistem Pembayaran untuk efisiensi transaksi dan ekosistem ekonomi keuangan digital (EKD),

terselenggaranya sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan andal, serta tersedianya uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya.

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, pengelolaan uang Rupiah, dan percepatan ekonomi keuangan digital untuk memelihara stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

14) Infrastruktur Sistem Pembayaran yang terintegrasi, interkoneksi, dan interoperabilitas, serta aman dan handal

Tingkat kestabilan dan tingkat ketersediaan layanan infrastruktur sistem pembayaran, baik untuk transaksi nilai besar maupun ritel, masih tetap terjaga. Secara umum, tingkat kestabilan dan ketersediaan layanan seluruh Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, yaitu BI-RTGS, SKN BI dan BI-FAST, hingga saat ini masih berjalan dengan baik dalam melayani kebutuhan transaksi masyarakat. BI-FAST merupakan perwujudan komitmen Bank Indonesia dalam melakukan modernisasi infrastruktur ritel yang bersifat *national driven*, memiliki fitur *real-time*, dan beroperasi tanpa henti (24/7), serta memungkinkan transfer dana dengan biaya rendah.

Pada triwulan III 2024, total volume transaksi BI-FAST tercatat sebesar 925 juta transaksi dengan total nominal transaksi sebesar Rp2.424,51 triliun, atau masing-masing meningkat sebesar 61% (yoy) dan 54% (yoy). Sejak pertama diluncurkan, BI-FAST telah melayani total volume transaksi sebesar 5,15 miliar transaksi dengan total nominal sebesar Rp14.056 triliun. Di samping itu, jumlah peserta BI-FAST sampai dengan triwulan III 2024 telah mencapai 126 peserta, yaitu 122 Bank, 3 Lembaga selain Bank (LSB), dan 1 pihak lain yang disetujui Bank Indonesia. Kehadiran BI-FAST juga telah mendorong akselerasi digitalisasi perbankan di Indonesia yang ditunjukkan dengan semakin tersedianya berbagai kanal pembayaran digital baik dalam bentuk *mobile banking* maupun *internet banking* oleh perbankan di Indonesia.

15) Terwujudnya ketahanan industri Sistem Pembayaran untuk mendorong industri Sistem Pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif berdasarkan praktik pasar yang sehat, efisien, dan wajar

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia terus berupaya menjaga ketahanan industri sistem pembayaran agar tetap kuat dengan tingkat ketersediaan layanan

sistem pembayaran oleh industri yang terjaga dengan baik. Terkait hal tersebut, Bank Indonesia melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap industri sistem pembayaran dan memastikan kepatuhan pelaku industri terhadap ketentuan. Bank Indonesia juga secara berkelanjutan mewujudkan kerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan industri dalam rangka terus meningkatkan kualitas implementasi manajemen risiko serta standar keamanan sistem informasi dari produk dan layanan jasa pembayaran, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Tingkat *availability* infrastruktur TI pendukung layanan Sistem Pembayaran terjaga sejalan dengan sistem pendukung Sistem Pembayaran untuk mengatasi gangguan pada layanan Sistem Pembayaran yang dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat dengan tingkat rerata *availability* infrastruktur teknologi informasi yang terjaga. Penyelenggara Sistem Pembayaran terus melakukan langkah-langkah mitigasi dan perbaikan antara lain berupa peremajaan internal *firewall*, pengadaan perangkat PAM, serta penerapan *tools* keamanan siber.

Dalam rangka *reinforcement* ketentuan, Bank Indonesia secara rutin melakukan sosialisasi kepada industri Sistem Pembayaran. Pada 26 Agustus 2024, Bank Indonesia mengadakan sosialisasi Sistem Pembayaran kepada seluruh PJP dan Penyedia Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) dengan tema *Enhancing Fraud Detection Systems (FDS) to Strengthen Cybersecurity Resilience in the Payment System Industry*, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait penguatan *Fraud Detection System* (FDS) dan PBI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran, Pelaku PUVA, serta Pihak Lain yang Diatur dan Diawasi Bank Indonesia, sehingga ke depan dapat meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa pembayaran.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan *surveilans* pada area Sistem Pembayaran, secara rutin Bank Indonesia juga melakukan *close monitoring* terhadap Penyelenggara Sistem Pembayaran agar layanan Sistem Pembayaran tidak digunakan untuk memfasilitasi aktivitas ilegal, khususnya perjudian *online*, melalui pelaksanaan *cyber patrol*. *Cyber patrol* tersebut merupakan patroli yang dilakukan Bank Indonesia dalam rangka mempercepat identifikasi *websitedan/ataurekeningyangterindikasiterlibatdalam* perjudian *online*, untuk kemudian dikomunikasikan kepada PJP/PIP terkait secara rutin. Selanjutnya, PJP/

Launching Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah Online Payment Virtual Card Tokenization dan Soft Launching QRIS Tap Berbasis NFC



Launching Kartu Kredit Indonesia segmen Pemerintah Online Payment Virtual Card Tokenization dan Soft Launching QRIS Tap Berbasis NFC di Jakarta

PIP melakukan verifikasi terhadap *website* dan/atau rekening tersebut serta menindaklanjutinya melalui penutupan/pemblokiran rekening dan melaporkan *website* tersebut ke Kementerian terkait untuk dilakukan penutupan.

16) Dukungan instrumen pembayaran digital untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia mendorong perkembangan transaksi, pengguna, dan *merchant* QRIS agar terus berakselerasi dan melampaui target. Total pengguna QRIS secara keseluruhan tercatat sebanyak 53,30 juta. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah *merchant* QRIS menjadi 34,23 juta. Akselerasi QRIS juga terus berlanjut dengan kenaikan volume transaksi mencapai 228,77% (yoy) dan nominal transaksi mencapai 209,61% (yoy), sehingga sampai dengan triwulan III 2024 volume transaksi QRIS mencapai 4,08 miliar transaksi.

Dalam mendukung perkembangan transaksi pembayaran digital tersebut, Bank Indonesia terus mendorong digitalisasi instrumen dan kanal sistem pembayaran untuk perluasan ekonomi dan keuangan digital serta penguatan stabilitas sistem dan layanan pembayaran. Upaya ini dilakukan antara lain melalui:

- a) Akselerasi QRIS berupa: (i) perluasan kerjasama QRIS Antarnegara dengan Jepang, Korea Selatan, India, dan UAE; (ii) pemanfaatan teknologi QRIS Tap Berbasis NFC pada KKI segmen ritel, dan peningkatan efisiensi setelmen QRIS; (iii) mengkaji penyesuaian kebijakan tarif MDR QRIS secara

progresif dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi; serta (iv) perluasan akseptasi QRIS melalui sosialisasi secara *targeted* kepada komunitas prioritas dan bersinergi dengan inisiatif lainnya, antara lain melalui penyelenggaraan FEKDI X Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan QRIS Jelajah Indonesia;

- b) Penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah berupa implementasi fitur *online payment*, koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, serta melalui program edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif dengan daya jangkauan yang lebih luas dan pengembangan KKI segmen ritel;
- c) Memperkuat implementasi BSPI 2030 yang berfokus pada aspek pengembangan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri; dan
- d) Mendorong konsolidasi struktur industri dalam ekosistem EKD dalam rangka memperkuat interkoneksi antar pelaku dan memitigasi risiko *shadow banking*.

17) Terpeliharanya kelancaran dan efisiensi transaksi lintas negara

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia terus melanjutkan komitmen untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas. Pada triwulan III 2024, perluasan kerja sama untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas dilakukan melalui penandatanganan adendum NK terkait pembayaran berbasis QR code antara Bank

Indonesia dan Bank of Korea (BoK) pada 15 Juli 2024. Penandatanganan dilakukan di sela-sela pertemuan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan ASEAN ke-11 di Penang, Malaysia. Kesepakatan tersebut menandai dimulainya kerja sama antara Bank Indonesia dan BoK dalam mengimplementasikan konektivitas pembayaran berbasis QR code yang didukung sinergi erat pelaku industri kedua negara. Di samping itu, perluasan kerja sama juga dilakukan melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Bank Indonesia dengan Bank Sentral Uni Emirat Arab (CBUAE) pada 17 Juli 2024. Kerja sama ditujukan untuk menghubungkan sistem pembayaran kedua negara guna memfasilitasi sistem pembayaran yang lebih cepat, efisien, transparan, dan terjangkau, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan ekonomi di kedua negara.

18) Pengembangan Rupiah Digital *Wholesale Central Bank Digital Currency* (CBDC) sesuai rencana

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia terus melakukan eksplorasi dan uji coba dalam proses pengembangan Rupiah Digital dengan berbagai langkah strategis. Bank Indonesia telah menyelesaikan *Proof of Concept* (PoC) *Wholesale Rupiah Digital Cash Ledger* melalui *benchmarking* dan penajaman topik. Penyusunan PoC dilakukan dalam rangka mendukung Proyek Garuda yang merupakan inisiatif yang memayungi eksplorasi desain CBDC Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga tengah mempelajari desain CBDC yang tepat untuk memastikan penerapan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan pasar domestik.

19) Ketersediaan Rupiah untuk mendukung kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia terus berkomitmen untuk menjamin ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup, pecahan yang sesuai, dan kualitas yang prima di seluruh wilayah NKRI. Sebagai manifestasi upaya tersebut, Bank Indonesia memperkuat kegiatan layanan kas kepada perbankan dan masyarakat. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya Bank Indonesia untuk terus menjaga ketersediaan uang Rupiah di seluruh wilayah NKRI yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

Khusus untuk wilayah 3T telah dilaksanakan upaya untuk terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas layak edar melalui kas keliling, distribusi ke kas titipan, dan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) yang berhasil dilaksanakan pada 225 wilayah 3T di wilayah NKRI. ERB merupakan bentuk sinergi antara Bank Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam kegiatan layanan kas di wilayah 3T. Pelaksanaan kegiatan layanan kas, ERB juga dirangkaikan dengan kegiatan kampanye “Cinta, Bangga, Paham Rupiah (CBP)” untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak merusak Rupiah dengan melipat, mencoret, menstapler, meremas, atau membasahi uang Rupiah. Kegiatan dimaksud diharapkan dapat ikut menjaga ketersediaan uang layak edar (ULE) diseluruh wilayah NKRI. Di samping itu, Bank Indonesia kembali menyelenggarakan *flagship event* kegiatan edukasi CBP



Pelepasan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2024 di Maluku

Rupiah dengan tema Rupiah *Ambassador of Indonesia* pada 16-18 Agustus 2024 di Istora Gelora Bung Karno Senayan yang bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap Rupiah.

Bank Indonesia terus berkomitmen untuk menyediakan ULE bagi masyarakat yang tecermin pada tingkat standar kelayakan uang Rupiah (*soil level*). Berdasarkan hasil survei pada semester I tahun 2024, tercatat *soil level* uang pecahan besar (UPB) dan pecahan kecil (UPK) masing-masing pada tingkat 9,6 dan 7,3.

Dalam upaya mewujudkan komitmen terhadap uang yang layak edar, Bank Indonesia melakukan kegiatan pengolahan dan pemusnahan terhadap uang tidak layak edar, termasuk melalui kegiatan meracik. Terkait hal ini, Bank Indonesia menginisiasi pengolahan limbah racik uang kertas (LRUK) dengan metode *Waste to Energy* (WTE) atau disebut sebagai program Pengelolaan

Uang Rupiah (PUR) yang lebih ramah lingkungan. Pada triwulan III 2024, kegiatan tersebut telah mencakup kerjasama pemanfaatan LRUK selain untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), antara lain antara KPwBI Provinsi Jambi dan PT. Perkebunan Nusantara IV Regional IV untuk penggunaan LRUK sebagai bahan bakar alternatif dalam produksi minyak kelapa sawit, serta antara KPwBI Provinsi Sulawesi Selatan dengan PT. Semen Tonasa dalam rangka pemanfaatan LRUK sebagai bahan bakar produksi semen. Selain itu, telah dilakukan pula kegiatan *proof of concept* (PoC) berupa uji bakar oleh beberapa KPwBI di lokasi PLTU guna menguji performa LRUK dalam kegiatan operasional pembangkit listrik. KPwBI tersebut yaitu KPwBI Provinsi Gorontalo di PLTU Anggrek, Gorontalo Utara serta KPwBI Provinsi NTT di PLTU Bolok, Kabupaten Kupang.

BOKS 4. Festival Rupiah Berdaulat (FERBI) 2024



Pembukaan Festival Rupiah Berdaulat (FERBI) 2024 di Jakarta

Memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia, Bank Indonesia kembali menggelar Festival Rupiah Berdaulat Indonesia (FERBI) 2024 pada 12-18 Agustus 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Festival yang telah memasuki tahun ketiga ini menjadi bagian dari edukasi Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah, sekaligus perayaan kebanggaan nasional dengan tema "Rupiah, *Ambassador of Indonesia*". Tema ini menegaskan peran Rupiah sebagai simbol persatuan dan representasi keragaman budaya Indonesia. FERBI 2024 tidak hanya menjadi ajang edukasi tetapi juga kolaborasi, menggandeng berbagai institusi dan pemangku kepentingan. Partisipasi dari TNI

Angkatan Laut, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perum Peruri, Komunitas Numismatik, hingga PT Jalin Pembayaran Nusantara. Hal ini memperkuat kesan inklusivitas dari perhelatan tersebut sekaligus mencerminkan semangat gotong royong dalam memperkokoh posisi Rupiah sebagai simbol kebangsaan.

FERBI 2024 mengajak masyarakat untuk mengeksplorasi sejarah, proses pengelolaan, dan nilai strategis Rupiah. Melalui pameran dan berbagai program interaktif, literasi masyarakat terhadap Rupiah ditingkatkan dengan fokus pada tiga pilar utama CBP Rupiah. Pertama, Rupiah adalah simbol kedaulatan negara yang harus dijaga



dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia (Cinta). Kedua, Rupiah mencerminkan identitas dan simbol negara yang memuat lambang Garuda Pancasila dan frasa NKRI (Bangga). Ketiga, Rupiah adalah jendela Indonesia karena desain uang Rupiah menggambarkan perjalanan sejarah bangsa, keragaman budaya dan kekayaan bangsa (Paham). Sebagai wujud implementasi CBP Rupiah tersebut, perlu ditanamkan kecintaan Rupiah dengan mengenali karakteristik dan desain Rupiah, memperlakukan Rupiah secara tepat, dan menjaga Rupiah dari kejahatan uang palsu atau dengan cara mengenali, merawat, dan menjaga Rupiah.

PS06 Memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas terkait untuk percepatan ekonomi dan keuangan digital serta pengelolaan uang Rupiah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Bank Indonesia terus melakukan penguatan sinergi kebijakan dan pengawasan Sistem Pembayaran antara Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas lain. Sinergi kebijakan dilakukan untuk mendorong percepatan ekonomi dan keuangan digital serta dalam rangka pengelolaan uang Rupiah. Selain itu, sinergi juga dilakukan dalam rangka pengawasan ekonomi dan keuangan digital serta penerapan prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT). Hal ini dilakukan guna mewujudkan: (i) efisiensi transaksi dan ekosistem EKD; (ii) terselenggaranya sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan andal; serta (iii) tersedianya uang Rupiah yang berkualitas dan terpercaya.

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memperkuat sinergi kebijakan dan pengawasan Bank Indonesia dengan Pemerintah, KSSK, dan otoritas terkait untuk percepatan ekonomi dan keuangan digital serta pengelolaan uang Rupiah sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

FERBI 2024 juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga eksistensi Rupiah. Hal ini dilakukan dengan mengenali karakteristik desain Rupiah, seperti fitur keamanannya untuk melawan pemalsuan. Ditekankan pula mengenai perlunya merawat Rupiah agar tetap layak digunakan serta menggunakan Rupiah sebagai alat pembayaran utama, simbol kedaulatan negara, dan alat pemersatu bangsa.

FERBI 2024 menegaskan bahwa Rupiah bukan sekadar alat transaksi, melainkan simbol kekuatan ekonomi dan identitas bangsa. Pemahaman terhadap peran Rupiah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan fungsinya sebagai alat penyimpan nilai menjadi bagian penting dari edukasi yang ditanamkan melalui FERBI 2024. Masyarakat diajak untuk bertransaksi, berbelanja, dan berhemat menggunakan Rupiah dengan bijak, sesuai kemampuan, sebagai bentuk kebanggaan dan tanggung jawab bersama. Festival ini merupakan lebih dari sekadar perayaan, melainkan komitmen nyata untuk mempererat kecintaan terhadap Rupiah, menanamkan rasa nasionalisme, dan meningkatkan literasi masyarakat. Dengan Rupiah sebagai simbol kedaulatan dan alat pemersatu bangsa, Indonesia diharapkan semakin kokoh dalam menghadapi tantangan global.

20) Terjalinnnya sinergi dalam rangka mendukung percepatan ekonomi dan keuangan digital

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia terus mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran untuk efisiensi transaksi dan perluasan ekosistem EKD. Program sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dilakukan dalam berbagai program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP), diantaranya dalam transaksi Pemerintah Daerah (Pemda), sektor transportasi, dan penyaluran bantuan sosial. Selanjutnya, pada 23 September 2024 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Rakornas P2DD) tahun 2024 yang dihadiri oleh pimpinan K/L anggota Satgas P2DD dan seluruh Kepala Daerah selaku Ketua TP2DD, dengan mengusung tema "Digitalisasi Transaksi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah". Selain itu, Bank Indonesia bekerjasama dengan kementerian terkait dalam mengembangkan KKI segmen pemerintah yang ditujukan untuk mendukung digitalisasi transaksi belanja pemerintah. Pada triwulan III 2024, program digitalisasi Pemerintah Daerah terus menunjukkan peningkatan dimana hingga September 2024 jumlah Pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota, yang memenuhi kriteria "digital" telah mencapai 87,9%.

- 21) Terjalannya sinergi kebijakan terkait penerapan prinsip Anti Pencucian Uang/Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) dan pengawasan Sistem Pembayaran untuk mendorong stabilitas sistem pembayaran

Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran berkomitmen penuh dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM). Komitmen tersebut selaras dengan visi SPI 2025, yang telah dilanjutkan dengan SPI 2030, yaitu menjamin keseimbangan antara inovasi sistem pembayaran dengan integritas sistem keuangan melalui penerapan Prinsip APU/PPT/PPSPM. Bank Indonesia berkontribusi penuh untuk melaksanakan berbagai rencana aksi *Mutual Evaluation by the Financial Action Task Force* (ME FATF), di antaranya melalui penguatan kerja sama internasional dengan otoritas mitra mengenai penerapan APU-PPT.

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia terus melanjutkan *monitoring* dan evaluasi dalam rangka pemenuhan Rencana Aksi Strategi Nasional (Renaksi Stranas) TPPU dan TPPT. Disamping itu, Bank Indonesia juga terus bersinergi dengan K/L terkait dalam rangka penerapan prinsip APU-PPT serta pengawasan Sistem Pembayaran dan telah menghasilkan 2 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Upaya tersebut dilakukan bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri, antara lain dengan melakukan *joint audit* bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta pengawasan dan surveilans terkait kepatuhan penerapan APU PPT oleh PJP Lembaga Selain Bank (LSB) dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB). Selain itu, Bank Indonesia telah melaksanakan kegiatan *capacity building* kepada pihak pelapor terkait *overview* analisis transaksi *fraud* yang terjadi di industri, yang selaras dengan Stranas terkait pemahaman risiko TPPU. Dalam rangka penguatan kapabilitas internal untuk melakukan pengawasan atas implementasi Program APU-PPT, Bank Indonesia bekerja sama dengan PPATK menyelenggarakan kegiatan *capacity building* kepada Pengawas Sistem Pembayaran baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri. Kegiatan dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas pengawas terkait risiko TPPU dan TPPT, terutama tindak pidana yang berisiko tinggi.

PS 07 Mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang dan pasar valas untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta memperkuat sinergi dengan otoritas terkait untuk pengembangan pasar keuangan dan pembiayaan ekonomi

Bank Indonesia terus mendorong pasar uang Rupiah dan valas yang modern, likuid, efisien, transparan, dan berintegritas. Pasar uang dan pasar valas yang modern dan maju adalah dasar untuk mendukung efektivitas kebijakan moneter, stabilitas keuangan, dan sinergi pembiayaan ekonomi nasional.

Pada triwulan III 2024 Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mengatur, mengawasi, dan mengembangkan pasar uang dan pasar valas untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta memperkuat sinergi dengan otoritas terkait untuk pengembangan pasar keuangan dan pembiayaan ekonomi sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

- 22) Pasar uang Rupiah dan valas yang variatif, likuid, efisien, transparan, dan berintegritas untuk mendukung efektivitas transmisi kebijakan Bank Indonesia

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia melanjutkan upaya pengembangan transaksi *repo* melalui implementasi *dealer* utama. Bank Indonesia secara berkala melakukan *monitoring* dan evaluasi atas kinerja *dealer* utama sejak ditetapkan pada 17 Mei 2024. Pada tahap awal implementasi, *dealer* utama diwajibkan untuk menyampaikan kuotasi harga *repo* secara 2 (dua) arah di berbagai tenor dalam rangka mendorong *price discovery* transaksi *repo*. Pada triwulan III 2024, pangsa *outstanding* transaksi *repo* terhadap total *outstanding* transaksi pasar uang Rupiah sebesar 54% atau relatif tidak berbeda dengan triwulan II 2024 yang sebesar 55%. Namun demikian, jumlah pelaku *repo* meningkat dari 67 bank di triwulan II 2024 menjadi 69 bank di triwulan III 2024. Adapun rata-rata harian (RRH) transaksi DNDF di *market* pada periode laporan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya didorong oleh peningkatan kebutuhan lindung nilai valas oleh para pelaku pasar khususnya pelaku asing sejalan dengan peningkatan *capital inflow* yang didukung dengan beberapa inisiatif pengembangan DNDF oleh Bank Indonesia. Ke depan, Bank Indonesia akan terus melanjutkan pengembangan DNDF melalui penguatan pengaturan, serta sosialisasi dan koordinasi *targeted* dengan pelaku potensial.

- 23) Infrastruktur pasar uang yang integrasi, interkoneksi dan interoperabilitas, serta aman dan andal

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia meneruskan upaya pencapaian inisiatif utama dalam pengembangan infrastruktur pasar keuangan melalui *Central Counterparty* (CCP), *Electronic Trading Platform Multimatching System* (ETP MS) untuk transaksi *Repo* dan DNDF yang dilaksanakan secara bertahap, serta perbitan ketentuan terkait yang mendukung implementasi CCP dan ETP MMS. Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia bersinergi dengan Otoritas Jasa

Kuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan perbankan membentuk, mengembangkan, dan meluncurkan CCP. Peluncuran CCP ini adalah wujud dari pemenuhan amanat UU PPSK yang memberikan mandat kepada Bank Indonesia untuk mengatur, mengembangkan, dan mengawasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, termasuk Infrastruktur Pasar Keuangan (IPK). Pada tahap awal implementasi, CCP akan difokuskan pada instrumen DNDF dan *Repo*, dengan implementasi penambahan produk yang akan diperluas secara bertahap mempertimbangkan volume transaksi dan kesiapan pasar, termasuk infrastruktur.

Dalam rangka akselerasi persiapan implementasi ETP MMS sebagai sarana transaksi PUVA sesuai tahapan pengembangan, Bank Indonesia melanjutkan koordinasi secara intensif dengan calon penyelenggara ETP MMS, CCP, maupun pelaku pasar. Hal ini untuk memastikan kesiapan penyelenggara dalam mengembangkan sistem secara bertahap, termasuk pengembangan model bisnis yang bersifat *straight through processing*. Interkoneksi ETP MMS dengan CCP sebagai sarana kliring dan manajemen risiko yang terintegrasi memungkinkan pelaku pasar keuangan bertransaksi secara *seamless*. Proses transaksi dapat terotomasi secara *end-to-end* dan meminimalkan adanya intervensi manual. Hal ini pada akhirnya akan menciptakan efisiensi pelaksanaan transaksi yang mendukung pengembangan pasar keuangan di Indonesia.

Bank Indonesia juga telah menerbitkan beberapa ketentuan untuk mendukung implementasi CCP dan ETP MMS sebagai salah satu infrastruktur pasar uang. Adanya pengaturan tersebut diharapkan dapat mewujudkan PUVA yang lebih tertata dan berfungsi secara baik (*well functioning money market and foreign exchange market*). Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan infrastruktur pasar uang untuk memastikan agar CCP dan ETP MMS tersebut diselenggarakan dengan memenuhi prinsip keamanan, efektivitas, efisiensi, dan keandalan. Selain itu, penyelenggaraan CCP dan ETP MMS harus memperhatikan aspek interkoneksi, interoperabilitas, dan integrasi dengan infrastruktur pasar keuangan lainnya, serta selaras dengan prinsip dan/atau standar internasional yang berlaku.

- 24) Sinergi Bank Indonesia dengan otoritas terkait untuk mendukung pembiayaan perekonomian dan pengelolaan risiko pasar keuangan

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia melanjutkan sinergi dengan Kemenkeu, OJK, dan LPS dalam Forum

Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK) guna mendorong pembiayaan perekonomian serta koordinasi pengawasan pasar keuangan dalam rangka pengelolaan risiko pasar keuangan. Selama triwulan III 2024, koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK terus dilakukan terkait kebijakan dan tindak lanjut pengawasan PUVA, termasuk sinergi pelaksanaan pemeriksaan terhadap perbankan dalam rangka penguatan implementasi kebijakan pendalaman pasar keuangan. Sinergi dilakukan dalam rangka penyusunan asesmen terhadap CCP dan pedoman *stress test* sesuai dengan risiko yang dihadapi oleh CCP. Koordinasi juga dilakukan dalam rangka persiapan pengalihan pengaturan dan pengawasan transaksi *futures* PUVA dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sesuai dengan mandat UU P2SK.

Sinergi antara Bank Indonesia bersama Kemenkeu, OJK, dan LPS juga diperkuat dalam rangka mempersiapkan dan melaksanakan program Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (Like It) tahun 2024. Like It merupakan program prioritas FK-PPPK yang pertama kali dilakukan pada Agustus 2021 sebagai upaya memperluas basis investor ritel domestik terutama yang berasal dari generasi muda. Pada triwulan III 2024, rangkaian kegiatan Like It #1 dimulai oleh Kementerian Keuangan dengan tema “*Smart Investing for a Better Tomorrow: Youth and Sustainable Finance for the SDG*”. Rangkaian Like It selanjutnya akan dilaksanakan oleh OJK dan Bank Indonesia pada triwulan IV 2024.

Lebih lanjut, Bank Indonesia terus melakukan penguatan koordinasi dan sinergi bersama OJK dan LPS dengan *International Swaps and Derivatives Association (ISDA)* dalam rangka memperoleh status *Clear Netting Jurisdiction*. Koordinasi dimaksudkan untuk menyamakan arah pembentukan peraturan agar sejalan dengan *internasional best practices* dalam implementasi *close-out netting* di Indonesia. Hasil koordinasi dan komunikasi antarpihak tersebut dituangkan dalam peraturan masing-masing lembaga sesuai dengan kewenangan masing-masing agar terdapat ketentuan teknis mengenai *close-out netting* yang memadai dan mengakomodasi kebutuhan pasar dalam transaksi pasar keuangan.

PS 08 Merumuskan kebijakan dan melaksanakan program Bank Indonesia serta memperkuat sinergi untuk meningkatkan inklusi ekonomi keuangan, keuangan berkelanjutan, dan perlindungan konsumen baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah



Opening Ceremony Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) di Kendari

Bank Indonesia terus mendorong peningkatan inklusi ekonomi keuangan, ekonomi keuangan syariah, termasuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia, serta penguatan perlindungan konsumen. Hal ini dilakukan sebagai kontribusi Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sepanjang triwulan III 2024 Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan kebijakan dan melaksanakan program Bank Indonesia serta memperkuat sinergi untuk meningkatkan inklusi ekonomi keuangan, keuangan berkelanjutan, dan perlindungan konsumen, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

25) Kontribusi Bank Indonesia dalam mendorong pembiayaan syariah

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia melanjutkan upaya untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan syariah melalui sinergi dan kolaborasi dengan K/L terkait dan industri keuangan syariah baik yang berasal dari sektor keuangan sosial maupun keuangan komersial. Sinergi dan kolaborasi dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) 2024 yang merupakan bagian dari kegiatan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF). Sebagai upaya untuk meningkatkan pembiayaan syariah di daerah, rangkaian BPS 2024 juga dilakukan oleh KPwBI melalui kegiatan *business linkage* di event Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah (Fesyar) wilayah Kawasan Timur Indonesia dan wilayah Jawa yang telah dilakukan masing-masing pada tanggal 7 - 10 Juli 2024 dan 13-15 September 2024. Rangkaian kegiatan BPS 2024 terdiri dari *linkage* pembiayaan syariah, *linkage* penjualan produk halal, *showcasing business/financial*

deals dan *exhibition* dan puncaknya pada acara ISEF 2024 di Jakarta.

Bank Indonesia terus mendorong produk perbankan syariah yang menonjolkan keunikan perbankan syariah dengan mengembangkan model bisnis pembiayaan melalui skema *investment account*. Upaya pengembangan model bisnis *investment account* terus dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi dengan OJK, industri perbankan syariah, dan *stakeholder* lainnya. Pada triwulan III 2024, telah dilakukan pembahasan potensi insentif pajak untuk produk *Sharia Restricted Investment Account* (SRIA) bersama OJK sebagai upaya untuk mendorong implementasi SRIA pada bank syariah. Seluruh upaya ini telah berkontribusi pada angka pertumbuhan pembiayaan syariah yang tercatat masih tumbuh tinggi sebesar 11,29% (yoy) di triwulan III 2024.

Bank Indonesia juga terus aktif mendorong pengembangan keuangan sosial syariah sebagai alternatif sumber pembiayaan melalui integrasi keuangan komersial dan sosial syariah serta mendorong implementasi peran bank syariah sebagai *nazhir/pengelola wakaf*. Promosi atau kampanye pembiayaan keuangan syariah terus dilakukan di berbagai kesempatan seperti pelaksanaan lelang wakaf atau Gerakan Sadar Wakaf di Fesyar Sumatera, Fesyar KTI dan Fesyar Jawa yang dilakukan melalui optimalisasi *platform* SatuWakaf Indonesia. Selain itu, dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengambilan kebijakan pengembangan keuangan sosial syariah Bank Indonesia menginisiasi pengembangan *database* zakat, infaq, sodaqoh, wakaf (ZISWAF) yang terintegrasi berkolaborasi dengan Kementerian Agama, Badan Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia. Pada triwulan III 2024, proses pengembangan *database* ZISWAF dilakukan melalui

Aktivasi KKI***Building Trends in Inclusive Economy:
Integrating Sustainability
into Fashion***Talkshow FEKDI x KKI: *Building Trends in Inclusive Economy: Integrating Sustainability into Fashion* di Jakarta

berbagai diskusi dengan Kementerian Agama yang membahas urgensi pengembangan *database* ZISWAF.

26) Terlaksananya program inklusi ekonomi keuangan dan keuangan berkelanjutan

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia senantiasa mengembangkan berbagai inisiatif dalam mencapai inklusi ekonomi keuangan dan keuangan berkelanjutan. Beragam inisiatif yang dilakukan oleh Bank Indonesia ditujukan untuk mengakselerasi UMKM naik kelas dan berdaya saing meliputi serangkaian program, antara lain: (i) UMKM Go Export; (ii) UMKM Go Digital; (iii) UMKM yang menerapkan *digital farming*; (iv) UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan; (v) UMKM yang masuk dalam *database* UMKM potensial dibiayai; serta (vi) kelompok subsisten yang mengalami peningkatan tahapan pengembangan. Dukungan akselerasi UMKM berdaya saing secara kontinu dilakukan melalui fasilitasi perluasan akses pasar untuk meningkatkan omzet dan komitmen *business matching* ekspor, serta fasilitasi akses pembiayaan.

Sebagai wujud selebrasi atas kemajuan pesat digitalisasi Indonesia, sekaligus komitmen bersama untuk akselerasi transformasi digital ke depan, serta kolaborasi dan inovasi untuk ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan inklusif, telah diselenggarakan Karya Kreatif Indonesia (KKI) yang disinergikan dengan FEKDI. Selain itu, dalam upaya mendorong UMKM Go Export, telah dilakukan serangkaian kegiatan kurasi nasional untuk produk UMKM komoditas kopi, wastra, dan produk turunan di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kawasan Timur Indonesia. Dukungan akselerasi ekspor UMKM secara

kontinu dilakukan oleh Bank Indonesia, baik melalui fasilitasi keikutsertaan UMKM pada kegiatan promosi perdagangan domestik dan internasional maupun melalui keikutsertaan dalam Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional. KKI X FEKDI yang telah diselenggarakan pada 1 - 4 Agustus 2024 telah berhasil mencatat capaian omzet dan *business matching* sebesar Rp576 miliar (atau meningkat 28%, yoy).

Bank Indonesia juga terus berupaya mempersiapkan UMKM yang bertransformasi menuju hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada triwulan III 2024, telah dilaksanakan *talkshow* dengan tema “*Building Trends in Inclusive Economy: Integrating Sustainability Into Fashion*” dan *fashion show* dengan tema “Asa Wastra Membumi”.

Bank Indonesia turut melaksanakan program fasilitasi UMKM dalam rangka mendukung terwujudnya peningkatan akses pembiayaan kepada UMKM. Fasilitasi UMKM dilakukan secara *end-to-end process* melalui peningkatan literasi pencatatan keuangan usaha secara digital dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK), penyediaan/update *database* profil UMKM potensial dibiayai (BISAID), dan pelaksanaan fasilitasi *business matching* pembiayaan yang diwujudkan melalui Gerakan “AKUBISA” – Akses Keuangan UMKM melalui *Business Matching* (BM) dan Literasi untuk peningkatan daya saing. Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia telah mengimplementasikan Gerakan AKUBISA yang meliputi pelaksanaan rangkaian kegiatan fasilitasi *business matching* pembiayaan, serta fasilitasi edukasi

dan literasi keuangan melalui penyediaan *booth area* interaksi dan *booth* AKUBISA dalam rangkaian FEKDI x KKI 2024. Kegiatan ini melibatkan 13 lembaga keuangan dan 79 UMKM binaan dari berbagai instansi, seperti PHRI, Kemenparekraf, Kemenperin, dan asosiasi lainnya. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan fasilitasi *business matching* dalam rangka FEKDI x KKI 2024 berhasil menghubungkan total 180 UMKM dengan komitmen pembiayaan mencapai Rp188,19 miliar atau meningkat 27% dari tahun sebelumnya.

Bank Indonesia juga telah melaksanakan *Training of Trainers* (ToT) kepada 782 pendamping dan pembina UMKM baik dari internal Bank Indonesia yang tersebar di 46 KPwBI, pembina UMKM dari K/L dan Perguruan Tinggi, serta pengkinian Profil UMKM Potensial Dibiayai (BISAID) terhadap *database* yang telah terhimpun sebanyak 2.727 UMKM di seluruh wilayah Indonesia dan pengembangan modul BISAID yang menambahkan fitur *business matching* Pembiayaan secara digital. Bank Indonesia juga melakukan penguatan ekosistem produk halal melalui berbagai program untuk mencapai inklusi ekonomi keuangan dan keuangan berkelanjutan, antara lain: (i) Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA) sektor *food* dan *modest fashion*; (ii) pengembangan model bisnis

dan ekosistem; (iii) *linkage* antar pelaku usaha syariah; (iv) fasilitasi sertifikasi halal dan inovasi sistem untuk halal *traceability*; serta (v) fasilitasi akses pasar *online* dan *offline*.

Sebagai upaya untuk memperluas *modest fashion* Indonesia, dilakukan berbagai rangkaian promosi perdagangan di dalam maupun luar negeri. Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia memperluas *modest fashion* Indonesia melalui keikutsertaan dalam berbagai rangkaian promosi perdagangan di dalam maupun luar negeri. Pada Agustus 2024, Bank Indonesia ikut serta dalam pelaksanaan Indonesia *International Modest Fashion* di Istanbul dan Paris. Selain itu, pada 8-10 Juli 2024 dan 14-15 September 2024, Bank Indonesia juga menyelenggarakan *Modest Fashion Competition* sebagai rangkaian kegiatan Fesyar di wilayah KTI dan Jawa. Pelaksanaan berbagai rangkaian promosi ini diharapkan dapat mendorong *branding* Indonesia sebagai pusat *modest fashion* dunia sehingga terjadi percepatan penetrasi pasar produk *modest fashion* Indonesia. Berbagai program fasilitasi UMKM yang dilakukan Bank Indonesia hingga triwulan III 2024 telah menciptakan 8.208 UMKM berdaya, saing serta mendukung perluasan akses pasar dan pembiayaan UMKM baik konvensional maupun syariah senilai Rp 1.225 miliar.

BOKS 5. Penyelenggaraan FEKDI x KKI 2024



Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI) 2024 di Jakarta

Kolaborasi Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI x KKI) 2024 sebagai perhelatan sinergi Bank Indonesia bersama Pemerintah, otoritas, asosiasi/industri, dan pelaku usaha telah menghasilkan inovasi yang mendukung akselerasi ekonomi dan keuangan digital, mendukung inklusi keuangan digital, memperluas edukasi, meningkatkan

omzet dan mendorong UMKM *Go Export*. FEKDI x KKI 2024 adalah kolaborasi perdana dua event tahunan Bank Indonesia, dengan FEKDI sebagai gelaran keempat sejak 2021 bersama Kemenko Perekonomian dan KKI sebagai gelaran kesembilan sejak 2016 bersama Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Mengusung tema "Sinergi Memperkuat Ekonomi dan Keuangan Digital serta Inklusif untuk Pertumbuhan



Berkelanjutan", FEKDI x KKI 2024 melibatkan berbagai kementerian/lembaga (K/L), asosiasi, industri, UMKM, akademisi, dan masyarakat. Acara ini diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) pada 1–4 Agustus 2024.

Perhelatan FEKDI x KKI 2024 merupakan forum kolaborasi Bank Indonesia bersama Pemerintah, Kementerian/Lembaga, asosiasi/industri, dan pelaku usaha untuk memperkuat transformasi ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif dan berkelanjutan. FEKDI x KKI 2024 merupakan manifestasi dari konsistensi, inovasi, dan sinergi kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan digital dengan upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) secara *end to end*. Visi dan misi Bank Indonesia dalam menjawab tantangan ekonomi keuangan digital ke depan tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

FEKDI x KKI 2024 diselenggarakan untuk menunjukkan digitalisasi sebagai *game changer* dalam pengembangan UMKM agar naik kelas, *go digital*, dan *go global*. Mengawali pembukaan FEKDI x KKI 2024, tampil Pagelaran Karya Kreatif produk wastra unggulan karya UMKM dari daerah Sumatera bagian Utara yang mengangkat tema Hamajuon Nagari (Kemajuan Negeri). Acara ini juga dirangkaikan dengan *showcasing* berbagai inovasi produk digital, pameran produk UMKM premium dan inovatif, seminar, *talkshow*, *user experience*, serta *launching* inisiatif digitalisasi pembayaran nasional. FEKDI x KKI 2024 juga dilakukan dalam rangka (i) peningkatan kapasitas akselerasi digital UMKM; (ii) kolaborasi untuk meningkatkan inovasi dan nilai tambah produk UMKM serta mendukung aspek keberlanjutan yang inklusif dan hijau; (iii) perluasan pasar *business-to-business* dengan menghadirkan *potential buyer/aggregator ekspor*; (iv) pameran produk UMKM premium binaan Bank Indonesia dan kementerian/lembaga yang dikurasi

khususnya wastra, pakaian jadi, aksesoris, home decor, makanan minuman, serta kopi dan teh; serta (v) promosi ragam budaya dan wisata nusantara.

Dalam rangkaian acara FEKDI x KKI 2024, diselenggarakan pagelaran karya kreatif muda bertema "Wastra Masa Kini". Pagelaran ini menjadi ajang apresiasi kepada talenta muda melalui kompetisi yang menampilkan 30 busana *ready to wear* karya 15 desainer dari sekolah vokasi menggunakan wastra khas daerah asal para peserta tersebut. Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada UMKM terinovatif dan penghargaan *lifetime achievement* kepada UMKM dengan omzet penjualan terbesar serta menjadi *role model* pengembangan UMKM sejak tahun 2020. Penyerahan penghargaan tersebut diharapkan dapat memacu para pelaku UMKM agar semakin produktif, inovatif, dan resilien, sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada kesempatan ini Bank Indonesia juga melakukan penyerahan apresiasi kepada para pemenang Hackathon Bank Indonesia serta QRIS Jelajah Indonesia 2024. Para pemenang tersebut telah menghasilkan inovasi solusi digital untuk pengembangan ekonomi dan keuangan digital nasional serta model baru kampanye perluasan digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia.

Sepanjang penyelenggaraan FEKDI x KKI 2024, telah berhasil diperoleh omzet penjualan di lokasi pameran sebesar Rp15,3 miliar, dan penjualan *online* sebesar Rp83,9 miliar. Capaian tahun ini secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan total omzet KKI 2023 yaitu penjualan *offline* sebesar Rp18,8 miliar dan penjualan *online* Rp 72,4 miliar. Selain itu, KKI 2024 juga mencatat kegiatan *business matching* (BM) ekspor yang mencapai Rp264,7 miliar yang terdiri dari realisasi ekspor dan penandatanganan kesepakatan bisnis. Pencapaian tersebut meningkat 26% dibandingkan pencapaian BM ekspor pada KKI 2023. BM ekspor mempertemukan UMKM binaan Bank Indonesia dan Kementerian/Lembaga yang telah berorientasi ekspor dengan 22 pembeli potensial dan aggregator ekspor dari 11 negara (Indonesia, Jepang, Singapura, Malaysia, Cina, Mesir, Hongkong, UAE, Australia, Belanda, dan Prancis).

FEKDI x KKI 2024 merupakan persembahan Bank Indonesia untuk memperkuat ekonomi dan keuangan digital serta inklusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui FEKDI x KKI 2024, Bank Indonesia mengajak berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung konsistensi, inovasi, dan sinergi pengembangan ekonomi dan keuangan digital dalam pengembangan UMKM untuk bersama berkontribusi nyata bagi perekonomian nasional.

27) Terwujudnya kebijakan dan program perlindungan konsumen nasional

Bank Indonesia telah melakukan serangkaian kegiatan pada triwulan III 2024 sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan konsumen. Peningkatan literasi konsumen dilakukan secara masif dan terstruktur melalui Gerakan Bersama Edukasi Pelindungan Konsumen (GEBER PK) dengan K/L terkait seperti OJK, Kemenkominfo, serta asosiasi dan industri. Edukasi dilakukan melalui media sosial dan radio dengan jumlah *viewers* mencapai 121 juta orang. Kerjasama edukasi pelindungan konsumen juga dilakukan bersama PMO Prakerja (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) dengan mewajibkan penerima Prakerja untuk mengakses video edukasi dengan jumlah peserta mencapai 1 juta orang.

Lebih lanjut, inisiatif program pelindungan konsumen merupakan bentuk penguatan edukasi PK yang juga dijalankan secara *offline* melalui beragam sosialisasi PK kepada masyarakat di berbagai daerah. Sampai dengan September 2024, jumlah peserta edukasi *offline* sebanyak 6.293 peserta dengan tingkat pemahaman 4,86. Selain itu, kampanye GEBER PK berhasil menjangkau 121 juta *viewers* dan *listeners* konten edukasi PK selama periode April hingga September 2024.

Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi keuangan inklusif dan pelindungan konsumen juga dilakukan dengan melibatkan KPwBI di berbagai wilayah, antara lain Bali, Bangka Belitung, Cirebon, D.I. Yogyakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kediri, Kepulauan Riau, Lampung, Malang, Maluku, Purwokerto, Sibolga, Solo, Sulawesi Utara, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, dan Tasikmalaya. Secara keseluruhan sampai dengan triwulan III 2024, kegiatan edukasi pelindungan konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia bersama *stakeholder* telah diikuti oleh 69.956 peserta.

28) Terjalinnnya koordinasi dengan otoritas/lembaga dalam inklusi ekonomi keuangan, keuangan berkelanjutan, dan pelindungan konsumen baik konvensional maupun syariah

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan otoritas/lembaga terkait dalam rangka mendukung program inklusi ekonomi keuangan dan pelindungan konsumen. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

- a) Program GEBER PK mengusung prinsip satu tema, satu waktu, multikanal, dan serentak,

melalui diseminasi konten edukasi kontribusi bersama dengan tema bulanan, yang merupakan kesepakatan BI, OJK, Kemkominfo, Asosiasi, dan mitra industri. Inisiatif GEBER PK dilakukan sebagai implementasi strategi edukasi PK yang mengedepankan kolaborasi lintas mitra, serta diseminasi konten edukasi secara luas melalui media sosial dan media radio. *Pilot project* kolaborasi edukasi PK bersama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan PT Pos (BOSPEKA) dilakukan melalui penyediaan layanan bagi calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), PMI Purna, dan keluarga. Layanan yang diberikan mencakup edukasi PK dan literasi keuangan, pelatihan keterampilan, pendapatan tambahan, program Kartu Prakerja, serta konsultasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). BOSPEKA telah berjalan sejak bulan Juli 2024 pada 10 lokasi Kantor Pos, berkolaborasi dengan PT. Pos Indonesia. Selain itu, juga dilakukan kolaborasi dengan PT. Taman Wisata Candi Borobudur untuk edukasi PK dan pemberdayaan bagi 1.943 UMKM anggota Koperasi Medang Kamulan Borobudur. Hasil evaluasi *pilot project* BOSPEKA akan direplikasi ke 4.300 titik Kantor Pos seluruh Indonesia secara bertahap hingga tahun 2029.

- b) Kolaborasi edukasi PK antara Bank Indonesia dan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dilakukan dalam bentuk penayangan video induksi PK mengenai tips aman bertransaksi yang wajib ditonton oleh penerima Program Kartu Prakerja, serta pelaksanaan survei tingkat pemahaman. Inisiasi tersebut telah diikuti oleh 1,1 juta peserta baru Program Kartu Prakerja tahun 2024.
- c) Kolaborasi bersama asosiasi untuk edukasi anti judi *online* (judol). Konten edukasi yang diangkat antara lain pengelolaan keuangan secara bijak melalui ragam alternatif investasi resmi dan dampak negatif dari praktik judol. Kampanye edukasi yang mengangkat tema "Generasi Hebat Anti Judol" dan "Masa Depan Lebih Baik Tanpa Judol", dilakukan pada periode Agustus hingga Oktober 2024 dengan memanfaatkan kanal media sosial.
- d) Implementasi program Forum Harmonisasi (FORHAR) Bank Indonesia dengan Kemenkeu dalam bentuk perluasan akses pembiayaan UMKM kepada penerima pembiayaan UMi melalui pemanfaatan SIAPIK. Implementasi program telah dilaksanakan di wilayah Lamongan dan Kupang.

Bank Indonesia juga melakukan koordinasi dengan otoritas/lembaga terkait untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia telah menandatangani NK dengan Badan Wakaf Indonesia dan Perjanjian Kerja sama (PKS) dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ruang lingkup PKS tersebut mencakup berbagai inisiatif dan kegiatan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk penyusunan fatwa/opini, edukasi eksyar, dan kegiatan kolaborasi lainnya. Berdasarkan berbagai kegiatan koordinasi di atas, hingga triwulan III 2024 telah dihasilkan 7 kesepakatan/program dengan K/L terkait dalam rangka mendorong inklusi ekonomi keuangan dan perlindungan konsumen.

Selanjutnya Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan sejumlah Halal Center, diantaranya Pusat Pengkajian dan Pengembangan Jaminan Produk Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Halal Science Center Institut Pertanian Bogor (IPB), dan berbagai Halal Center lainnya yang tersebar di beberapa daerah. Bank Indonesia juga berkolaborasi bersama mitra strategis lainnya yaitu 8 komunitas perempuan dan asosiasi pelaku usaha melalui penguatan SDM Halal. Kegiatan yang dilakukan antara lain *workshop* dan sertifikasi terhadap Pendamping Proses Produk Halal (PPH), serta juru sembelih halal, sehingga dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha, khususnya UMKM. Koordinasi serta kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi peningkatan kapasitas dan akselerasi sertifikasi halal di berbagai wilayah. Program ini juga mendapatkan dukungan penuh dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta *stakeholder* daerah lainnya yang turut serta dalam memfasilitasi proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha di wilayah mereka. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan dapat lebih banyak produk yang berhasil memperoleh sertifikat halal sehingga mengakselerasi pencapaian produk dengan sertifikat halal di Indonesia.

Hasil koordinasi intensif bersama berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah memberikan hasil yang signifikan. Hingga triwulan III tahun 2024, telah diterbitkan 28.187 sertifikat halal untuk berbagai jenis produk. Selain itu, terdapat 170 juru sembelih halal yang telah tersertifikasi untuk memenuhi kebutuhan juru sembelih profesional di berbagai rumah potong hewan. Meningkatnya jumlah produk dan juru sembelih halal yang tersertifikasi diharapkan dapat memberi dampak positif pada daya saing produk halal Indonesia, baik di pasar nasional maupun internasional.

PS 09 Merumuskan kebijakan dan melaksanakan kerjasama internasional dengan bank sentral, organisasi, dan lembaga internasional untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta bersinergi dengan pemerintah dan otoritas lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional

Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan internasional untuk mendukung stabilitas makroekonomi, sistem pembayaran, dan sistem keuangan nasional. Melalui kebijakan internasional yang strategis seperti mendorong transaksi berbasis mata uang lokal, memperkuat jaring pengaman keuangan internasional, menjaga kepercayaan lembaga internasional, dan menjalin sinergi kerjasama global, Bank Indonesia turut memastikan perekonomian Indonesia tetap tangguh di tengah tantangan global. Komitmen ini tak hanya mendukung stabilitas makroekonomi, sistem pembayaran, dan keuangan, tetapi juga mengukuhkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam arsitektur keuangan dunia.

Sepanjang triwulan III 2024, Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan kebijakan dan melaksanakan kerjasama internasional dengan bank sentral, organisasi, dan lembaga internasional untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia serta bersinergi dengan pemerintah dan otoritas lain dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional, sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

29) Terjaganya persepsi positif lembaga internasional dan lembaga rating terhadap perekonomian Indonesia

Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global dan konvergensi kebijakan moneter negara maju, Bank Indonesia terus melakukan berbagai strategi yang proaktif dan kredibel untuk menjaga persepsi positif lembaga internasional dan pemeringkat terhadap perekonomian Indonesia. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong peningkatan arus masuk modal asing melalui investasi portofolio (PI) dan investasi asing langsung (FDI).

Dari sisi investasi portofolio, strategi menarik *portfolio capital inflows* ditempuh melalui penguatan *investor outreach* dengan prinsip 3T. Pertama, "*targeted*" yang artinya bahwa sasaran investor difokuskan pada investor pemilik SBN/SRBI terbesar, dan/atau investor dengan *Assets Under Management* (AUM) besar, dan/atau investor potensial. Kedua, "*thematic*" yang fokus pada penguatan strategi komunikasi kepada investor melalui penyampaian *key message* yang tepat untuk merespons *burning issues* terkini sehingga risiko *asymmetric information* dapat dimitigasi dengan tepat.

Penyusunan *key message* dilakukan melalui sinergi dan koordinasi aktif dengan K/L terkait untuk memastikan keselarasan data dan informasi yang akan disampaikan. Ketiga, “*transparent*” yang menekankan penguatan diseminasi data dan informasi antara lain melalui penerbitan *Presentation Book* secara rutin dengan materi yang selalu disesuaikan dengan *burning issues* terkini.

Pada sisi FDI, Bank Indonesia terus melakukan penguatan strategi promosi investasi dan perdagangan agar lebih *targeted* dengan mengoptimalkan tiga pilar yaitu: a) penguatan rancangan strategi promosi investasi dan perdagangan yang diselenggarakan dengan Asta Cita (antara lain kegiatan promosi fokus pada sektor prioritas, meningkatkan lapangan kerja dan kewirausahaan, dan industri kreatif) termasuk dengan memanfaatkan peluang dari kerja sama internasional (FTA); b) optimalisasi *market intelligence* KPwLN untuk penguatan sisi *demand* (investor/buyer potensial); c) sinergi penguatan sisi *supply* antara lain *product*, *pricing*, *quality* dan kontinuitas produk UMKM, maupun proyek investasi yang *clean and clear* untuk ditawarkan. Penguatan persepsi positif investor sektor riil juga ditempuh melalui penyampaian *key message* oleh pimpinan Bank Indonesia dan otoritas pemerintah Indonesia pada saat kegiatan promosi.

Pada triwulan III 2024, pengelolaan persepsi positif ekonomi Indonesia berhasil dikawal dengan baik di bawah kepemimpinan Bank Indonesia sebagai Sekretariat *Investor Relations Unit* (IRU) Nasional. Hal tersebut ditunjukkan dari publikasi hasil asesmen dari lembaga pemeringkat *Standard & Poor's* pada 30 Juli 2024 yang kembali mempertahankan *Sovereign Credit Rating* (SCR) Indonesia di level BBB dengan *outlook* stabil. Hasil asesmen positif juga diberikan dari lembaga pemeringkat *Rating & Investment Information* di level BBB+ dengan *outlook* positif yang diperoleh pada 30 September 2024. Afirmasi ini mencerminkan kepercayaan internasional yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap solid, ketahanan eksternal dan beban utang Pemerintah yang terjaga, didukung oleh sinergi kebijakan moneter, fiskal dan struktural. Keberhasilan mempertahankan peringkat kredit Indonesia menunjukkan kepercayaan internasional yang tinggi terhadap stabilitas makroekonomi dan ketahanan sistem keuangan Indonesia, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh baik. Hal ini juga didukung oleh sinergi yang solid antara Bank Indonesia, Pemerintah, dan Otoritas Jasa Keuangan dalam meningkatkan keyakinan pada *credit worthiness*

Indonesia. Berbagai langkah strategis yang proaktif dan kredibel untuk menjaga persepsi positif lembaga internasional dan pemeringkat terhadap perekonomian Indonesia di atas telah menghasilkan 8 laporan dari lembaga internasional, lembaga pemeringkat, dan investor global yang memiliki *tone* positif.

Bank Indonesia juga berperan aktif dalam memperkuat persepsi positif investor global terhadap perekonomian Indonesia. Sepanjang triwulan III 2024, Bank Indonesia terus aktif dalam berbagai bentuk komunikasi dan *engagement* untuk menjaga persepsi positif investor asing terhadap ekonomi Indonesia antara lain melalui penyelenggaraan *Investor Conference Call* (ICC) bersama Kementerian Keuangan RI setiap bulan. Selain itu, Bank Indonesia secara konsisten juga melakukan pertemuan terjadwal, tematik, dan transparan dengan berbagai investor strategis di luar negeri, khususnya wilayah AS dan Eropa. Upaya ini diharapkan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan investor sekaligus memitigasi informasi asimetris, yang selanjutnya akan meningkatkan aliran masuk modal asing, memperkuat ketahanan sektor eksternal, dan mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

Persepsi positif internasional terhadap Indonesia merupakan hasil dari sinergi yang kuat dalam implementasi *Investor Relations* antara Bank Indonesia dan otoritas terkait, yang dianggap terbaik di antara negara *peers*. Pada 10 Juli 2024, Indonesia kembali meraih peringkat *top tier* di antara 50 negara *emerging market* dalam hal pelaksanaan *investor relations*, menurut *Principles Consultative Group* (PCG) dari *The Institute of International Finance* (IIF).

Bank Indonesia juga secara aktif mendukung dan memfasilitasi kegiatan promosi investasi dan perdagangan internasional melalui integrasi fungsi *Investor Relation Unit* (IRU), *Regional Investor Relation Unit* (RIRU), dan *Global Investor Relation Unit* (GIRU) secara *synergized*, *targeted*, dan *outcome oriented*. Selama triwulan III 2024, Bank Indonesia memfasilitasi 21 kegiatan promosi yang terdiri dari 9 promosi investasi dan 12 promosi perdagangan. Kegiatan promosi tersebut antara lain *Indonesian International Modest Fashion Festival* (IN2MF) Istanbul dan Indonesia Festival Wonderful Nusantara, dalam bentuk forum bisnis, pameran, dan pertemuan bilateral. Promosi investasi dilakukan untuk mempromosikan 44 proyek investasi *ready to offer* (IPRO) di sektor pariwisata, kawasan industri, penyediaan air, energi terbarukan, infrastruktur, properti/komersial, manufaktur, *livestock*, dan agrikultur yang tersebar di 9 provinsi. Sementara



Executives' Meetings of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP) Working Group On Banking Supervision (WGBS) ke-56 di Bali

itu, promosi perdagangan dilakukan untuk produk unggulan dari 50 UMKM binaan Bank Indonesia di 23 provinsi dengan jenis produk perhiasan, kopi, makanan dan minuman olahan, fashion dan aksesoris, kerajinan, serta *home decor*. Sebagai bentuk inovasi pada kegiatan fasilitasi promosi di luar negeri, Bank Indonesia memfasilitasi *trading hub* yang merupakan *platform* untuk fasilitasi promosi, distribusi, dan ekspansi produk UMKM ke pasar internasional melalui jaringan bisnis dan infrastruktur yang terintegrasi di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia di luar negeri.

Selain lembaga pemeringkat, persepsi positif terhadap perekonomian Indonesia juga ditunjukkan dengan telah dipublikasikannya satu laporan yang berimbang untuk perekonomian Indonesia dari *International Monetary Fund* (IMF), yaitu laporan *Article IV Consultation* tahun 2024. IMF menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian eksternal, dengan inflasi yang terjaga dalam kisaran target yang ditetapkan, dan sektor keuangan yang memeperlihatkan ketahanan yang baik.

30) Terdukungnya kebijakan utama dan kepentingan Bank Indonesia/Republik Indonesia melalui kebijakan dan kerja sama internasional

Bank Indonesia senantiasa memperjuangkan kepentingan Bank Indonesia dan/atau ekonomi Republik Indonesia melalui diplomasi dan/atau negosiasi di forum/lembaga/kerja sama internasional. Pada triwulan III 2024, posisi/*stances* Indonesia telah diterima di berbagai forum/lembaga/kerja sama internasional yang mencakup area stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, sistem

pembayaran/digital, keuangan berkelanjutan, dan inklusi ekonomi. Posisi/*stances* Indonesia disampaikan antara lain pada rangkaian pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (*Finance Ministers and Central Bank Governors' Meeting/FMCBG*) Negara G20 di Rio de Janeiro, Brasil, tanggal 22-26 Juli 2024. Di forum tersebut, Bank Indonesia menekankan pentingnya koordinasi kebijakan dalam mengatasi tantangan global.

Bank Indonesia juga berpartisipasi aktif pada forum kerja sama internasional di kawasan regional, seperti rangkaian *Executives' Meetings of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP) Governors' Meeting* ke-29 pada 15 Juli 2024, *EMEAP Working Group on Banking Supervision (WGBS) ke-56* di Bali tanggal 29 - 30 Agustus 2024, serta *EMEAP Deputies' Meeting* ke-67 pada 27 September 2024. Dalam pertemuan tersebut, Bank Indonesia berperan sebagai Ketua Forum EMEAP WGBS periode 2024-2026 serta menyampaikan berbagai inisiatif penting, antara lain penerapan *LCT Framework* dan AI. Pertemuan EMEAP WGBS menghasilkan berbagai inisiatif utama pada 3 (tiga) area yang meliputi keuangan berkelanjutan, kebijakan makroprudensial, dan upaya pemulihan resolusi perbankan.

Bank Indonesia juga berperan sebagai *Chairs* bersama *State Bank of Vietnam (SBV)* pada pertemuan *ASEAN Senior Level Committee (SLC) ke-28* pada 20 September 2024 di Da Nang, Vietnam yang di antaranya mengangkat tema perkembangan kondisi perekonomian dan kebijakan, serta inisiatif integrasi keuangan di bawah ASEAN. Bank Indonesia juga turut berpartisipasi aktif dalam forum ASEAN+3 yang utamanya mengangkat tema penguatan jaring

pengaman keuangan regional, yaitu *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM).

Bank Indonesia berperan strategis dalam pertemuan *Bank for International Settlement* (BIS) *Asian Consultative Council* (ACC) *Meeting. Chairmanship* Bank Indonesia dalam BIS ACC *Meeting* pada September 2024 berhasil mendorong tiga agenda yang menjadi prioritas *Chairmanship* di BIS ACC, yaitu (i) bauran kebijakan/*integrated policy framework/macro financial stability framework*. Hasil studi mengenai "*Inflation, external financial conditions and macro-financial stability frameworks in Asia-Pacific*" dari *Working Group* terkait yang telah menjadi masukan bagi G20 dan IMF; (ii) digitalisasi dan *cross border payment*; dan (iii) *green/sustainable finance*, di antaranya pembentukan ACC *Climate Network*.

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama dengan bank sentral di kawasan. Bank Indonesia bersama *Bank for International Settlements* (BIS), Bank Negara Malaysia (BNM), *Bangko Sentral ng Pilipinas* (BSP), *Monetary Authority of Singapore* (MAS), dan *Bank of Thailand* (BoT) pada 1 Juli 2024 telah menuntaskan *blueprint* Tahap 3 *Proyek Nexus* yang bertujuan untuk meningkatkan *domestic instant payment interconnections* secara global. Selain itu, pada 15 Juli 2024, Bank Indonesia telah menandatangani MoU dengan Bank of Korea untuk memperkuat kolaborasi dalam pembayaran antarnegara berbasis QR Code.

Bank Indonesia juga terus mempererat kolaborasi di bidang keuangan internasional guna memperkuat kerangka jaring pengaman keuangan global. Kolaborasi khususnya dilakukan melalui proses pembaruan perjanjian *Local Currency Bilateral Swap Arrangement* (LCBSA) Bank Indonesia-Bank Negara Malaysia (BNM) dan perpanjangan perjanjian *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) Bank Indonesia-Bank of Japan (BOJ). LCBSA Bank Indonesia dan BNM merupakan perjanjian bilateral yang memungkinkan pertukaran valuta asing berupa mata uang lokal antara Bank Indonesia dan BNM, untuk kemudian dipertukarkan kembali pada saat jatuh tempo yang disepakati. Perjanjian ini juga melengkapi kerja sama transaksi berbasis mata uang lokal (*Local Currency Transaction - LCT*) yang sudah berjalan. Pembaruan LCBSA memungkinkan pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral hingga senilai RM24 miliar atau Rp82 triliun untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Bank Indonesia dan *Bank of Japan* (BOJ), sebagai agen Kementerian Keuangan Jepang, menyepakati perpanjangan *Bilateral Swap Arrangement* (BSA) dengan masa berlaku 3 tahun sebagai opsi bantalan kedua

(*second line of defense*) dalam menjaga ketahanan eksternal. Kerja sama tersebut memungkinkan dilakukannya pertukaran mata uang Rupiah dengan Dolar AS dan/atau Yen Jepang sampai dengan 22,76 miliar dolar AS atau nilai yang setara dalam Yen Jepang. Kerja sama BSA Bank Indonesia dan BOJ pertama kali ditandatangani pada 17 Februari 2003 yang diperpanjang kembali pada 14 Oktober 2024 dan berlaku efektif hingga 13 Oktober 2027.

Bank Indonesia juga terus memperkuat kerja sama LCT. Kerja sama LCT merupakan salah satu inisiatif yang ditempuh untuk diversifikasi mata uang. Diversifikasi mata uang dalam transaksi bilateral antar negara dapat memperkuat ketahanan sektor eksternal dengan stabilitas nilai tukar yang meningkat. Dalam mendorong implementasi LCT, Bank Indonesia menerapkan strategi (1) *refocusing* melalui penajakan intensifikasi cakupan kerja sama dengan negara mitra saat ini (*existing*) serta ekstensifikasi perluasan kerja sama dengan negara mitra baru, dan (2) *restrategizing* melalui pelaksanaan sosialisasi 3T (*Targeted, Terintegrasi, Terencana*), termasuk melalui koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Nasional LCT. Strategi ini berhasil meningkatkan capaian nilai transaksi LCT dan jumlah pelaku LCT secara signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Hingga triwulan III 2024, nilai transaksi dan jumlah pelaku LCT tercatat mengalami peningkatan masing-masing menjadi sebesar USD7,73 Miliar dan 39.753 pelaku usaha, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (triwulan I-III 2023) yang sebesar USD5,36 Miliar dan 21.116 pelaku usaha.

Untuk mendorong akselerasi penggunaan mata uang lokal, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama K/L terkait melalui Satgas Nasional LCT. Pada triwulan III 2024, sejumlah upaya telah ditempuh untuk mendukung peningkatan implementasi LCT salah satunya melalui pertemuan Komite Kerja Tingkat Deputy/Eselon I Satgas Nasional LCT pada 29 Agustus 2024. Pertemuan komite kerja tingkat Deputy tersebut bertujuan untuk mendiskusikan langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mendukung akselerasi implementasi LCT, termasuk mencapai target 10% pada 2024-2025, antara lain melalui pelaksanaan sosialisasi bersama secara *targeted*, terintegrasi, dan terencana, serta mengoordinasikan penyusunan *roadmap* dan *strategic business plan* (SBP). Dalam pelaksanaan sosialisasi, K/L anggota Satgas Nasional LCT yang turut terlibat antara lain adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, serta Kementerian Luar Negeri.

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia terus mendorong penerapan LCT bersama beberapa otoritas mitra, yaitu Otoritas Korea Selatan dan CBUAE. Bank Indonesia berhasil mempercepat kesepakatan kerangka kerja sama LCT dengan Otoritas Korea Selatan pada 30 Agustus 2024, yang kemudian mulai diimplementasikan secara efektif pada 30 September 2024. Kerangka LCT akan memperkuat interkoneksi bank *Appointed Cross Currency Dealer* (ACCD) dalam memfasilitasi transaksi berjalan antar negara dengan menggunakan mata uang lokal. Kerja sama ini juga mendorong kuota dan penggunaan nilai tukar secara langsung (*direct quotation* dan *direct rate*) antara IDR terhadap KRW serta relaksasi ketentuan yang diperlukan untuk mendorong pemanfaatan LCT.

Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama bilateral dengan bank sentral mitra guna mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsinya melalui kerja sama kebanksentralan yang lebih terstruktur (*Structured Bilateral Cooperation* atau SBC). Sejauh ini, Bank Indonesia telah menjalin kerja sama tersebut dengan 12 bank sentral mitra negara Jepang, AS, Jerman, Inggris, Turki, Singapura, Korea Selatan, India, Swiss, Laos, Tiongkok, dan Uni Emirat Arab. Sebagai salah satu implementasi dari SBC tersebut, Bank Indonesia berkolaborasi dengan Bank of England (BoE) pada 1-2 Agustus 2024 menyelenggarakan *workshop* dengan tema "*cyber resilience*" yang dihadiri oleh bank sentral ASEAN dan negara lainnya di kawasan. *Workshop* tersebut ditujukan untuk mendiskusikan peran bank sentral sebagai regulator dalam memperkuat keamanan digital di tengah pesatnya inovasi digital. Selain dengan bank sentral mitra SBC, BI juga secara aktif melakukan kerja sama dengan bank sentral lainnya.

BOKS 6. Penguatan Sinergi Dorong Pemanfaatan Mata Uang Lokal



Penandatanganan MoU Kerangka Kerja Penguatan Kerja Sama Bilateral di Area Sistem Pembayaran antara Bank Indonesia dan Bank Sentral Uni Emirat Arab (CBUAE)



Bank Indonesia terus memperkuat kerja sama internasional untuk mendukung implementasi *Local Currency Transaction* (LCT), yaitu dengan Bank Sentral Uni Emirat Arab (CBUAE) dan otoritas keuangan Korea Selatan. Upaya ini merupakan bentuk penajaman strategi dalam rangka mendorong implementasi LCT melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang merupakan salah satu fokus utama Bank Indonesia. Pada 17 Juli 2024, Bank Indonesia dan CBUAE menyepakati *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk mendukung peningkatan hubungan perdagangan antara kedua negara melalui pembentukan kerangka kerja yang mendorong penggunaan mata uang lokal untuk transaksi bilateral. MoU ini merupakan salah satu capaian dari kunjungan Kepresidenan ke Uni Emirat Arab (UEA) di bulan Juli 2024.

MoU ditandatangani oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo, dan Gubernur CBUAE, Khaled Mohamed Balama. Kerja sama ini merupakan keberlanjutan dari MoU kerja sama bilateral yang ditandatangani pada 29 November 2023, yang memfasilitasi penguatan kerja sama dan pertukaran informasi di berbagai bidang, termasuk sistem pembayaran dan inovasi digital. MoU ini juga melengkapi kerja sama penggunaan mata uang lokal melalui *framework* LCT sebagai bagian dari upaya intensifikasi cakupan transaksi LCT untuk menangkap potensi pembayaran lintas batas pada transaksi bilateral. Melalui kerja sama ini, sistem pembayaran kedua negara dicanangkan untuk semakin terhubung dalam memfasilitasi pembayaran yang lebih cepat, efisien, transparan dan terjangkau, yang pada akhirnya dapat mendukung pembangunan ekonomi kedua negara.

Implementasi tersebut akan dikembangkan dengan memperhatikan manajemen risiko, pengawasan, dan perlindungan hak konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

Lebih lanjut, Bank Indonesia, *Bank of Korea* (BOK), dan Kementerian Keuangan Korea menyepakati kerangka kerja sama LCT dalam mendorong penggunaan mata uang lokal Rupiah-Won untuk transaksi perdagangan antara Indonesia dan Korea Selatan. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut MoU yang ditandatangani pada Mei 2023 dan kesepakatan kerangka operasional (*operational guideline*) pada Juni 2024. Kerangka LCT Indonesia-Korea Selatan telah secara resmi diimplementasikan efektif mulai 30 September 2024 dan menandakan upaya ekstensifikasi melalui perluasan partisipan LCT dengan menambah jumlah negara mitra.

Implementasi kerangka LCT antara Indonesia dan Korea Selatan merupakan capaian penting dalam kerja sama keuangan bilateral kedua negara. Kerangka LCT akan memperkuat interkoneksi bank *Appointed Cross*

Currency Dealer (ACCD) dalam memfasilitasi transaksi berjalan antarnegara dengan menggunakan mata uang lokal. Kerja sama ini juga mendorong kuota nilai tukar secara langsung (*direct quotation*) antara IDR terhadap KRW serta relaksasi ketentuan yang diperlukan untuk mendorong pemanfaatan LCT. Ke depan, implementasi kerangka LCT akan mendorong peningkatan transaksi perdagangan bilateral, mengurangi eksposur risiko nilai tukar, dan meningkatkan efisiensi transaksi.

Langkah penguatan kerja sama LCT dengan memperluas negara mitra dan meningkatkan implementasi penggunaan LCT mencerminkan komitmen Bank Indonesia untuk mendukung ketahanan nasional. Penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi diharapkan dapat memperdalam pasar keuangan dan mendukung stabilitas nilai tukar. Upaya penguatan kerja sama LCT ke depan akan terus ditingkatkan untuk memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

PS 10 Merumuskan kebijakan dan mengelola sistem tata kelola kelembagaan yang baik untuk memperkuat kinerja kelembagaan

Bank Indonesia terus melakukan penguatan tata kelola kelembagaan dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sesuai mandat UU P2SK secara efektif dan efisien. Hal ini tecermin pada: (i) Kinerja kelembagaan yang efektif, efisien, dan berkepatuhan, (ii) Sustainability dan akuntabilitas keuangan Bank Indonesia yang terjaga, serta (iii) Maturitas tata kelola, Manajemen Risiko Bank Indonesia (MRBI), Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia (MKTBI), dan internal audit yang terjaga. Penguatan tersebut dilakukan untuk mencapai kinerja kelembagaan yang kuat dengan pemenuhan prinsip tata kelola kelembagaan yang baik, profesional, dan akuntabel.

Sepanjang triwulan III 2024 Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan kebijakan dan mengelola sistem tata kelola kelembagaan yang baik untuk memperkuat kinerja kelembagaan sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

31) Terjaganya kinerja kelembagaan yang efektif dan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia secara konsisten mempertahankan kinerja kelembagaan yang efektif dan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. Indikator pemenuhan prinsip tata kelola yang baik terefleksikan dari tingkat maturitas tata

kelola. Bank Indonesia telah berkoordinasi dengan asesor eksternal dalam menyusun pedoman penilaian maturitas tata kelola yang selaras dengan kerangka Sistem Tata Kelola Kebijakan dan Kelembagaan Bank Indonesia, serta mengacu pada *leading practices*. Pedoman ini selanjutnya akan menjadi dasar untuk melakukan penilaian tingkat maturitas tata kelola Bank Indonesia sebagai strategi pemantauan dan evaluasi implementasi tata kelola di Bank Indonesia.

Dalam memastikan terjaganya tingkat maturitas tata kelola pada level yang tinggi, Bank Indonesia memantau implementasi tindak lanjut sejumlah rekomendasi penguatan tata kelola pada periode sebelumnya secara berkelanjutan. Tindak lanjut dimaksud antara lain berupa penyusunan dan/atau penguatan ketentuan serta pedoman untuk mendukung perwujudan kredibilitas bank sentral dalam mencapai sasarannya.

32) Terjaganya akuntabilitas dan kinerja keuangan lembaga secara efisien dan sustainable

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) tahun 2023 dari BPK-RI untuk yang ke-21 (berturut-turut sejak tahun 2003). Perolehan opini WTP tersebut merupakan wujud komitmen Bank Indonesia untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik serta menyajikan laporan

keuangan yang relevan, akuntabel, dan transparan sehingga kredibilitas Bank Indonesia sebagai bank sentral tetap terjaga.

33) Terwujudnya pengelolaan risiko yang *pre-emptive*, *forward looking*, dan *agile* yang selaras dengan arah strategis kebijakan dan kelembagaan

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia terus menjaga pengelolaan risiko yang *pre-emptive*, *forward looking*, dan *agile*. Hal ini tecermin pada semakin membaiknya perolehan tingkat maturitas Manajemen Risiko Bank Indonesia (MRBI) dan Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia (MKTBI). Bank Indonesia telah meraih maturitas MKTBI pada level Terkuantifikasi Menuju Teroptimasi (*Quantified to Optimize Managed*). Pencapaian tersebut didukung oleh *improvement* dalam implementasi MKTBI antara lain peningkatan *awareness Business Continuity Management (BCM)* dan simulasi MKTBI yang lebih intensif. Perbaikan implementasi MKTBI akan terus dilakukan melalui penguatan protokol keberlangsungan tugas. Sementara itu, asesmen maturitas MRBI 2024 sedang dilakukan dengan target penyelesaian pada akhir tahun 2024.

Bank Indonesia juga telah menindaklanjuti sejumlah rekomendasi penguatan maturitas MRBI dan MKTBI tahun 2023, antara lain: (i) penyempurnaan kertas kerja pengelolaan risiko guna memperkuat maturitas MRBI; dan (ii) penguatan budaya risiko melalui *training awareness*, *focus group discussion* dan *workshop* terkait MKTBI. Upaya meningkatkan maturitas MRBI dan MKTBI dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola kelembagaan Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang sesuai mandat UU P2SK secara efektif dan efisien.

34) Terwujudnya pelaksanaan audit berbasis risiko yang berkualitas untuk mendukung kinerja kelembagaan yang efektif, efisien dan patuh terhadap ketentuan/prosedur

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia melakukan rangkaian proses pengukuran level maturitas audit berbasis risiko. Beberapa upaya yang dilakukan meliputi penguatan metodologi audit melalui *revisit* ketentuan fungsi audit intern dan pengkinian pedoman audit guna mendukung penguatan maturitas internal audit tersebut. Selain itu, kapabilitas auditor juga terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi audit intern. Pelaksanaan audit sampai dengan triwulan III 2024 tetap berjalan sesuai rencana tahunan, antara lain melalui pelaksanaan audit strategis dan audit kepatuhan. Dalam rangka menjaga level maturitas internal audit, satuan kerja yang melakukan

fungsi audit internal juga memberikan konsultasi dan rekomendasi kepada satuan kerja terkait sebagai upaya memperkuat tata kelola dan pengendalian internal di satuan kerja tersebut.

PS 11 Merumuskan kebijakan, mengembangkan, dan mengelola proses kerja, sumber daya manusia, peraturan dan ketentuan, serta laporan dan komunikasi untuk menjamin tercapainya kinerja kelembagaan secara efisien, profesional, taat hukum, akuntabel, dan transparan

Bank Indonesia terus melakukan penguatan kinerja kelembagaan yang efisien, profesional, taat hukum, akuntabel, dan transparan. Sepanjang triwulan III 2024 Bank Indonesia telah melakukan beberapa upaya dalam rangka merumuskan kebijakan, mengembangkan, dan mengelola proses kerja, sumber daya manusia, peraturan dan ketentuan, serta laporan dan komunikasi sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

35) Tersedianya SDM yang kompeten, profesional, berintegritas, dan berakhlak mulia

Pada triwulan III 2024, penguatan pengelolaan SDM yang kompeten, profesional, berintegritas, dan berakhlak mulia dilakukan melalui penerapan strategi perencanaan, pemenuhan, pengembangan, dan pemeliharaan (4P). Secara khusus, Bank Indonesia memperoleh penghargaan *Best Companies to Work for in Asia 2024* dalam ajang penghargaan internasional yang diselenggarakan oleh HR Asia. Penghargaan ini menjadi wujud reputasi Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara yang menjalankan praktik terbaik di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia dan dapat menjadi *role model* bagi lembaga dan industri perbankan.

Strategi pengelolaan SDM difokuskan pada aspek pemenuhan, pengembangan, dan pemeliharaan. Pemenuhan SDM dari internal dilakukan melalui reposisi pegawai dalam bentuk promosi, mutasi, atau rotasi. Sementara itu, pemenuhan dari eksternal dilakukan melalui proses rekrutmen untuk mendapatkan SDM Bank Indonesia yang berkualitas, berprestasi tinggi, dan berakhlak mulia.

Strategi pengembangan SDM dilakukan dengan pemetaan kualitas pegawai berdasarkan asesmen potensi, yang diterapkan pada pegawai dari pangkat Asisten Manajer hingga Manajer. Asesmen ini bertujuan mengidentifikasi karakter dan kompetensi kepemimpinan secara lebih objektif dengan melihat tiga aspek utama, yaitu *strategic visioning*, *get things done*, dan *coordination (the power of we)*. Hasil dari

asesmen tersebut digunakan untuk memperkuat indikator kepemimpinan pegawai di Bank Indonesia. Pengembangan kapabilitas SDM juga dilakukan melalui berbagai program pendidikan, antara lain orientasi untuk calon pegawai baru, IHT untuk seluruh pegawai, program pengembangan kompetensi untuk kelompok pegawai potensial, dan program pengembangan karir untuk pegawai yang promosi. Pada triwulan III 2024, telah diselenggarakan sejumlah program pengembangan kapabilitas SDM, yaitu program *on boarding* calon pegawai baru yang diikuti oleh 168 peserta, program pengembangan kompetensi untuk 83 topik yang diselenggarakan dalam 152 *batch* kelas dan diikuti oleh 4.856 peserta, program pengembangan karir yang diikuti oleh 482 peserta, program persiapan pegawai tugas belajar (S2 dan S3) yang diikuti oleh 62 peserta, program pengembangan kompetensi untuk pegawai potensial yang diikuti oleh 127 peserta, dan program persiapan masa purnabakti yang diikuti oleh 268 peserta.

Lebih lanjut, strategi pemeliharaan SDM dilakukan melalui penerapan budaya kerja **Aku Bangga BI Bermakna (AB3)** yang didukung dengan berbagai kegiatan di level satuan kerja, tim, dan individu. Hal ini melibatkan kolaborasi dengan komunitas dan lembaga terkait. Implementasi program AB3 dievaluasi secara berkala melalui laporan implementasi tengah tahun, kegiatan pembekalan tim, *mentoring*, serta pengembangan inovasi digital. Selain aspek inovasi dan digital, aspek spiritual juga diintegrasikan melalui program BI Spiritual sebagai bagian dari transformasi budaya kerja BI Inovasi dan BI Digital.

36) Pemenuhan penerbitan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia sesuai amanat Undang-Undang dan kebutuhan Bank Indonesia, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia melakukan penyesuaian terhadap sejumlah ketentuan yang ada dan menerbitkan ketentuan baru dalam rangka menjaga kecukupan landasan hukum dalam pelaksanaan tugas. Bank Indonesia telah menerbitkan 24 peraturan yang terdiri dari 5 PBI, 8 PADG, dan 11 ketentuan internal. Penerbitan ketentuan merupakan pemenuhan terhadap amanat UU P2SK dan kebutuhan Bank Indonesia. Pembentukan peraturan di Bank Indonesia dilakukan melalui: (i) asesmen hukum secara komprehensif di area kebijakan utama dan kebijakan kelembagaan; (ii) proses harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya; serta (iii) koordinasi dengan *stakeholder* terkait. Hal tersebut dimaksudkan agar peraturan yang diterbitkan dapat mendukung

pencapaian tujuan Bank Indonesia dan selaras dengan kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta sesuai dengan tata kelola pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

37) Komunikasi untuk mendukung efektifitas kebijakan serta pemenuhan akuntabilitas dan transparansi

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga keterbukaan informasi publik dengan memperhatikan prinsip **transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas**. Bank Indonesia secara konsisten memperkuat kolaborasi dan sinergi kelembagaan dengan K/L dalam mendorong komunikasi kebijakan. Selanjutnya, dalam memastikan implementasi pelayanan informasi publik yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Bank Indonesia senantiasa meningkatkan kapabilitas dalam pengelolaan layanan informasi publik, di antaranya melalui forum edukasi, *workshop* pemutakhiran informasi, dan berbagai kegiatan lain. Bank Indonesia juga telah melakukan pemutakhiran informasi dan mengumumkan daftar informasi publik (DIP) pada situs Bank Indonesia agar dapat diakses secara luas oleh publik. Selain itu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas komunikasi, Bank Indonesia akan mengikuti audit ISO 9001:2015 terkait kualitas mutu layanan *contact center* BI BICARA, serta mengikuti kompetisi *contact center* tingkat nasional dan internasional.

Pada triwulan III 2024, komunikasi Bank Indonesia diarahkan pada pengelolaan ekspektasi dan literasi *stakeholder* sejalan dengan *stance* bauran kebijakan Bank Indonesia. Komunikasi kebijakan diharapkan dapat memperkuat ekspektasi publik terhadap efektivitas kebijakan moneter dalam menjaga stabilitas (*pro-stability*), serta kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, dan ekonomi keuangan inklusif dan hijau yang diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*). Bauran kebijakan Bank Indonesia tersebut ditujukan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah, memastikan inflasi terkendali dalam kisaran sasaran, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, komunikasi kebijakan juga diharapkan dapat mendorong peningkatan literasi seluruh lapisan masyarakat terkait dengan *stance* kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia.

Komunikasi bauran kebijakan berfokus pada hasil keputusan RDG Juli dan Agustus 2024 yang mempertahankan BI-Rate sebesar 6,25%, dan hasil

keputusan RDG September 2024 yang menurunkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,00%. Komunikasi intensif dilakukan untuk memperkuat ekspektasi masyarakat bahwa keputusan Bank Indonesia tetap konsisten dengan *stance* kebijakan moneter yang *pro-stability* dan sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* dalam menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah serta untuk memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada 2024 dan 2025. Terkait pengendalian inflasi, Bank Indonesia mengomunikasikan rangkaian kegiatan sinergi antara Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Daerah, serta berbagai mitra strategis lainnya dalam TPIP dan TPID, di antaranya melalui GNPIP di berbagai daerah. Sementara itu, komunikasi kebijakan *pro-growth* pada triwulan III 2024 difokuskan pada kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran, seperti penguatan dan *refocusing* KLM, upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia melalui rangkaian kegiatan ISEF 2024, implementasi QRIS antarnegara, akselerasi digitalisasi keuangan daerah, serta penguatan implementasi kerjasama RPC dan LCT dengan negara-negara yang baru bergabung.

Bank Indonesia juga secara intensif melaksanakan komunikasi kebijakan kepada *stakeholder* yang disasar. Komunikasi Bank Indonesia secara konsisten diarahkan untuk mengelola literasi publik melalui beragam kanal *above the line* (ATL) seperti *website*, media sosial Bank Indonesia, serta media massa. Ada pun komunikasi melalui kanal *below the line* (BTL), antara lain dilakukan melalui konferensi pers, taklimat media, serta FGD dengan ekonom, akademisi, lembaga riset, K/L, parlemen, dan media. Kegiatan komunikasi *through the line* (TTL) dilakukan Bank Indonesia melalui kegiatan edukasi yang dipublikasikan pada kanal media sosial Bank Indonesia dan kegiatan komunikasi interaktif yang diselenggarakan oleh Museum Bank Indonesia (MuBI). Melalui berbagai strategi komunikasi dimaksud, *engagement stakeholder* pada triwulan III 2024 dapat tetap terjaga. Hal ini tecermin pada persepsi positif-netral dari mayoritas *stakeholder* terhadap pesan yang dikomunikasikan Bank Indonesia melalui berbagai kanal.

PS 12 Merencanakan, mengembangkan, dan mengelola teknologi dan inovasi digital serta sarana dan prasarana kerja untuk menjamin tercapainya kinerja kelembagaan yang modern, produktif, dan efektif

Bank Indonesia terus melakukan penguatan pengelolaan sumber daya dan pengelolaan program dalam rangka

mencapai kinerja kelembagaan yang modern, produktif, dan efektif. Hal ini tecermin pada: (i) digitalisasi bisnis proses dan digitalisasi data yang selaras dengan transformasi Bank Indonesia, (ii) layanan digital yang andal dan aman, (iii) pengelolaan logistik sesuai standar dan bertatakelola, (iv) perencanaan dan pelaksanaan pengadaan yang terintegrasi, modern dan digital, serta (v) pengelolaan program yang *end-to-end* dan terintegrasi sesuai dengan azas tata kelola yang baik. Penguatan tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kinerja kebijakan dan kelembagaan yang modern, produktif, dan efektif melalui optimalisasi pemanfaatan inovasi dan informasi digital, sarana dan prasarana modern, serta pengelolaan program yang bertata kelola secara baik.

Sepanjang triwulan III 2024, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka merencanakan, mengembangkan, dan mengelola teknologi dan inovasi digital serta sarana dan prasarana kerja sebagaimana tecermin pada pencapaian IKU sebagai berikut:

38) Tersedianya teknologi, layanan, dan inovasi digital yang *agile*, *resilient*, dan *intelligent* untuk mendukung implementasi kebijakan dan kelembagaan

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia memastikan ketersediaan berbagai inovasi dan teknologi serta layanan digital yang *agile*, *resilient*, dan *intelligent* untuk senantiasa mendukung transformasi pada area kebijakan dan kelembagaan. Bank Indonesia telah mengimplementasikan digitalisasi Bank Indonesia sesuai dengan rencana yang sudah disusun, meliputi penyelesaian kegiatan eksplorasi Digital Rupiah untuk cakupan *wholesale cash ledger*, serta perluasan cakupan pengembangan pada area Pusat Data. Pengembangan Pusat Data dilakukan melalui proses pengayaan konten, pengembangan *usecase*, pengembangan *platform* serta pemanfaatan AI/ML. Beberapa pengembangan lainnya juga tengah dilakukan untuk mendukung transformasi digital Bank Indonesia, melalui perluasan cakupan *Digital Workplace* untuk analisis dan *forecasting* indikator kebijakan dan kelembagaan.

Dalam rangka memastikan tingkat keandalan, *availability*, dan keamanan sistem informasi, Bank Indonesia melakukan asesmen *Information Technology Service Management* (ITSM) dan *Cyber Security*. Sepanjang triwulan III 2024, Bank Indonesia terus menjaga dan meningkatkan maturitas ITSM melalui *monitoring* atas *availability* ketersediaan layanan digital. Bank Indonesia juga senantiasa menjaga maturitas *cyber security* melalui *review* dan penguatan terhadap sistem keamanan siber Bank Indonesia. Selain itu, seiring meningkatnya penggunaan BI-FAST,

Casual Talk**Apa-apa Digital, Apa-apa Cyber, Ada Apa Sih?**

FEKDI x KKI Casual Talk: Apa-apa Digital, Apa-apa Cyber, Ada Apa Sih? di Jakarta

Bank Indonesia juga terus berupaya untuk memenuhi standar *availability* melalui penguatan kapasitas layanan.

39) Terwujudnya layanan prima dan sarana dan prasarana kerja kelogistikan yang selaras dengan arah strategis kebijakan dan kelembagaan

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia senantiasa berupaya mewujudkan layanan kelogistikan yang berkualitas untuk aplikasi BI-RTGS, BI-SSSS, SKNBI, BI-ETP, dan BI-FAST. Penyediaan layanan kelogistikan telah dilakukan secara optimal yang tecermin pada kualitas layanan yang memenuhi standar Bank Indonesia. Hal ini dicapai antara lain dengan memastikan *supply* daya listrik secara kontinu 24/7 serta memastikan kualitas tegangan dan frekuensi listrik dicapai secara optimal melalui instalasi peralatan pendukung kelistrikan pada aplikasi kritikal. Di sisi lain, Bank Indonesia turut menjalin kemitraan strategis dengan PLN guna memastikan kualitas layanan listrik pada aplikasi kritikal selalu dalam kondisi yang prima sehingga mendukung operasionalisasi aplikasi dapat berjalan 24/7.

40) Terwujudnya perencanaan dan pengadaan strategis secara profesional serta sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

Pada triwulan III 2024, Bank Indonesia melakukan *Procurement Maturity Assessment* (PMA) sebagai bagian dari kegiatan asesmen tahunan untuk menilai tingkat maturitas pengadaan di Bank Indonesia. Penilaian tingkat maturitas ditujukan dalam rangka memperkuat tata kelola pengadaan, serta mewujudkan perencanaan dan pengadaan strategis secara profesional, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Penguatan

maturitas pengadaan Bank Indonesia tahun 2024 difokuskan pada perencanaan dan pelaksanaan pengadaan yang terintegrasi, *modern* dan digital. Hal tersebut dicapai melalui 4 (empat) strategi transformasi pengadaan, yakni: (i) 3S (simplifikasi, standarisasi, sistemisasi); (ii) *streamlining* proses bisnis dan *decision making process* (DMP) pengadaan; (iii) penguatan organisasi dan SDM; serta (iv) digitalisasi yang selaras dengan transformasi kelembagaan dan arah strategis Bank Indonesia. Berbagai penguatan yang telah dilakukan diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran maturitas pengadaan di level *strategic*.

Penilaian PMA dilakukan oleh *external expert* dengan menerapkan model maturitas pengadaan sesuai *best practice*, yakni model *Procurement Excellent Plus*, untuk menilai kematangan fungsi pengadaan sebuah organisasi secara holistik mencakup aspek *strategy*, *operational*, *organization*, dan *technology*. Pada triwulan III 2024, telah diperoleh penilaian PMA untuk aspek strategi dan organisasi yang mencapai level *strategic*. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pengadaan telah dilakukan secara strategis, kolaboratif, terintegrasi, dan berorientasi pada kinerja, guna mendukung keberhasilan strategi dan pencapaian target kinerja organisasi. Aspek operasional juga memperoleh penilaian level *strategic* untuk area *main process* pengadaan, sedangkan pada aspek teknologi memperoleh penilaian level *proactive*. Pencapaian maturitas pengadaan di level *strategic* menunjukkan bahwa fungsi pengadaan di Bank Indonesia telah didukung oleh standarisasi proses dan tata kelola yang baik, serta telah menggunakan strategi dan perencanaan yang optimal.





LAMPIRAN

DAFTAR ISTILAH

ISTILAH	PENJELASAN
3I	Integrasi, interkoneksi, interoperabilitas yang menggambarkan bentuk keterhubungan antarinfrastruktur pasar keuangan.
3-Smart	Program kepemimpinan Bank Indonesia untuk menciptakan pemimpin yang profesional yang memiliki kompetensi (<i>book smart</i>), berpengalaman (<i>street smart</i>), dan memiliki perilaku mulia (<i>spiritual smart</i>).
<i>Advanced Release Calendar</i>	Sistem yang digunakan untuk menjadwalkan dan merilis informasi penting atau data ekonomi sebelum tanggal rilis resmi.
<i>Agile</i>	Kemampuan untuk bergerak cepat dan mudah
Bantuan Sosial	Pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
Bauran Kebijakan Bank Indonesia	Penggunaan beberapa kebijakan oleh Bank Indonesia, baik berupa kebijakan moneter, makroprudensial, sistem pembayaran maupun kebijakan pendukung lainnya.
Bauran Kebijakan Kelembagaan	Penggunaan beberapa kebijakan pada area kelembagaan dengan basis kinerja efektif, efisien, dan kepatuhan/ <i>compliance</i> . Hal ini diperlukan sebagai langkah dalam memastikan keseimbangan antara memastikan tercapainya mandat Bank Indonesia melalui kinerja yang efektif dengan upaya mendorong produktivitas sumber daya secara efisien, serta memastikan ketaatan hukum dan akuntabilitas melalui tata kelola yang baik.
Bank Indonesia – <i>Electronic Trading Platform</i>	Infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.
Bank Indonesia – <i>Real Time Gross Settlement</i>	Sistem transfer dana secara elektronik antar peserta Sistem BI-RTGS dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi secara individual.
BI-FAST	Layanan sistem pembayaran yang dilakukan secara <i>real time</i> dan 24/7, yang mempercepat proses penyelesaian transaksi dan akan menggantikan SKNBI.
BI-Payment Clear dan BI-Payment Info	Infrastruktur untuk mendeteksi anomali transaksi dan potensi fraud di sektor keuangan.
<i>Blueprint</i>	Kerangka kerja terperinci sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit kerja.
Cadangan devisa	Cadangan devisa negara yang dikuasai oleh Bank Indonesia yang tercatat pada sisi aktiva neraca Bank Indonesia, yang antara lain berupa emas, uang kertas asing, dan tagihan dalam bentuk giro, deposito berjangka, wesel, surat berharga luar negeri dan lainnya dalam valuta asing kepada pihak luar negeri yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran luar negeri.

ISTILAH	PENJELASAN
<i>Capital Adequacy Ratio</i>	Rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR).
<i>Central Bank Digital Currency</i>	Mata uang digital yang diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral, dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk menggantikan uang kartal.
<i>Central Counterparty</i>	Lembaga kliring yang mengambil alih risiko <i>counterparty</i> dari transaksi antar pelaku pasar melalui proses novasi dan melakukan multilateral <i>netting</i> atas eksposur transaksi para pelaku pasar.
<i>Closed Loop</i>	Sistem atau proses yang didesain agar hasil atau output dari suatu proses diumpankan kembali (feedback) ke dalam sistem untuk digunakan kembali atau dikendalikan.
<i>Composability</i>	Kemampuan berbagai komponen atau aplikasi keuangan untuk saling berintegrasi dan beroperasi bersama.
<i>Countercyclical Capital Buffer</i>	Tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga (<i>buffer</i>) untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit dan/atau pembiayaan perbankan yang berlebihan (<i>excessive credit growth</i>) sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.
<i>Counterparty Limit</i>	Batas maksimum eksposur yang dapat diambil terhadap <i>counterparty</i> dalam transaksi keuangan
<i>Counterparty Line</i>	Jumlah kredit atau limit eksposur yang diberikan oleh satu pihak kepada <i>counterparty</i> dalam transaksi keuangan.
<i>Credit Worthiness</i>	Ukuran atau penilaian terhadap kemampuan individu, perusahaan, atau negara untuk memenuhi kewajiban utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat.
<i>Cross Border</i>	Lintas batas, lintas negara.
Dana Pihak Ketiga	Dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada perbankan berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
<i>Data-driven Institution</i>	Organisasi atau lembaga yang mendasarkan pengambilan keputusan dan strateginya pada analisis data.
Derivatif	Instrumen turunan yaitu kontrak, perjanjian, atau transaksi yang nilainya diturunkan dari suatu instrumen keuangan.
Devisa	Sejumlah emas atau valuta asing yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional.
Devisa Hasil Ekspor	Devisa yang diterima eksportir dari hasil kegiatan ekspor.
Digitalisasi	Proses alih media dari bentuk fisik, tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital.

ISTILAH	PENJELASAN
Digital BPR	Pendekatan komprehensif untuk mendesain ulang dan mengoptimalkan proses bisnis berbasis digital dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kemampuan beradaptasi, antara lain mencakup aspek pengambilan keputusan, manajemen informasi, <i>digital environment</i> , dan pola kerja.
Domestic Non-Deliverable Forward	Transaksi derivatif standar (<i>plain vanilla</i>) berupa transaksi <i>forward</i> yang dilakukan dengan mekanisme <i>fixing</i> dan mata uang penyelesaiannya dalam Rupiah.
Dynamic Systemic Risk Surveillance	Kerangka pengawasan yang bersifat <i>forward looking</i> dan terintegrasi dengan mempertimbangkan seluruh informasi pengawasan yang menjadi kewenangan Bank Indonesia.
Ekspor	Proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain.
Elektronifikasi	Mengubah cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi nontunai.
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.
Employee Value Proposition	Nilai tambah yang ditawarkan pegawai dan sebagai imbalan atas kontribusi terhadap perusahaan.
End-to-end	Kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan inklusif.
ETP Multimatching	Sistem elektronik yang digunakan oleh pelaku pasar sebagai sarana untuk melakukan transaksi pasar keuangan dengan metode <i>multimatching</i> .
Financial Market Infrastructure	Sistem multilateral antar lembaga peserta (langsung), termasuk operator sistem, yang digunakan untuk kliring atau pencatatan pembayaran, surat berharga, derivatif, atau transaksi keuangan lainnya.
Financing to Value	Rasio pembiayaan yang diberikan bank terhadap nilai aset.
Forward looking	Kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi pada periode yang akan datang karena mempertimbangkan adanya efek tunda/ <i>time lag</i> kebijakan moneter.
Hedging	Kegiatan yang dilakukan oleh investor untuk mengurangi atau menghilangkan suatu sumber risiko.
Impor	Kegiatan membeli barang dari luar negeri.
Imported Inflation	Inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang yang berasal dari luar negeri akibat dampak perubahan nilai tukar.
IndONIA	Indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjam Rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu <i>overnight</i> di Indonesia.
Inflasi	Keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara cepat sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Terdapat dua jenis sumber inflasi, yaitu inflasi yang disebabkan oleh dorongan biaya (<i>cost-push</i>) dan inflasi karena meningkatnya permintaan (<i>demand-pull</i>).

ISTILAH	PENJELASAN
Inflasi inti	Komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditas internasional, inflasi mitra dagang dan ekspektasi inflasi. Inflasi inti diperoleh dari angka inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen <i>volatile foods</i> dan <i>administered prices</i> .
Integrasi	Penyatuan infrastruktur <i>post trade</i> dalam satu institusi yang sama untuk rantai nilai (<i>value chain</i>) layanan transaksi.
Interkoneksi	Kemampuan antarsistem bertukar informasi atau bertransaksi membutuhkan perantara, atau dengan kata lain interkoneksi antar sistem terjadi secara tidak langsung.
Interoperabilitas	Kemampuan dua sistem untuk berkomunikasi atau bertransaksi secara langsung.
Investasi	Akumulasi suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan mendapatkan keuntungan pada masa depan. Terkadang, investasi disebut juga sebagai penanaman modal.
Keuangan digital	Keuangan yang menggunakan sarana teknologi digital seperti seluler atau <i>web</i> melalui pihak ketiga.
Keuangan inklusif	Suatu bentuk pendalaman layanan keuangan untuk masyarakat bawah untuk dapat memanfaatkan produk keuangan formal.
Klaster	Kelompok usaha yang saling berhubungan atau sentra UMKM.
Likuiditas	Kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat; sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya.
<i>Loan to Value</i>	Rasio pinjaman yang diberikan bank terhadap nilai aset.
<i>Local Currency Transaction</i>	Transaksi bilateral antar dua negara dengan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara, untuk mendiversifikasi <i>currency exposure</i> .
Makroprudensial	Pendekatan regulasi keuangan yang bertujuan memitigasi risiko sistem keuangan secara keseluruhan.
<i>National Driven</i>	Pendekatan atau strategi yang berfokus pada tujuan, kepentingan, dan prioritas suatu negara, dengan dorongan kuat dari pemerintah atau institusi nasional untuk mencapai visi atau target tertentu.
Neraca Pembayaran Indonesia	Suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial.
<i>Net inflows</i>	selisih antara total kontribusi atau pembelian baru (<i>inflows</i>) dan total penarikan atau penjualan (<i>outflows</i>) dari suatu investasi atau entitas.
<i>Non Performing Loan</i>	Kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan, dan macet.

ISTILAH	PENJELASAN
<i>Offtaker</i>	Pihak yang berperan sebagai pembeli utama dalam kontrak jual beli jangka panjang.
<i>Online</i>	Daring atau dalam jaringan, yaitu terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.
Operasi Moneter	Pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui Operasi Pasar Terbuka dan Koridor Suku Bunga (<i>Standing Facilities</i>).
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	Instrumen makroprudensial yang dirumuskan untuk meningkatkan ketahanan likuiditas perbankan. PLM mensyaratkan bank untuk memiliki <i>buffer</i> likuiditas dalam bentuk SSB dalam besaran tertentu dari dana pihak ketiga (DPK) Rupiah.
Penanaman Modal Asing	Kegiatan memasukkan modal atau investasi baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain untuk melakukan kegiatan usaha atau mengelola operasi perusahaan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan di bawah pengawasan dari pemilik modal baik secara total atau sebagian.
<i>Portfolio Inflows</i>	Investasi portofolio yang dilakukan oleh bukan penduduk Indonesia di Negara Indonesia
<i>Primary Dealer</i>	Institusi yang disetujui oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk berpartisipasi dalam pembelian dan penjualan obligasi pemerintah secara langsung dari pemerintah.
<i>Pro-growth</i>	Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
<i>Pro-stability</i>	Kebijakan yang ditempuh untuk menjaga stabilitas ekonomi.
<i>Programmability</i>	Kemampuan sistem keuangan untuk membuat kontrak dan instruksi keuangan yang dapat dijalankan secara otomatis sesuai aturan yang telah ditetapkan sebelumnya
Proyek Garuda	Sebuah inisiatif yang memayungi eksplorasi desain <i>Central Bank Digital Currency</i> (CBDC) Indonesia yang kemudian disebut Rupiah Digital.
<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i> (QRIS)	Standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).
QRIS Cross Border/Lintas Negara	Salah satu inisiatif kolaboratif untuk membangun standarisasi infrastruktur setelmen untuk perdagangan lintas batas.
Rasio Intermediasi Makroprudensial	Penyempurnaan kebijakan GWM LFR yang dilakukan dengan memperluas komponen intermediasi, yakni menambahkan surat-surat berharga (SSB) yang dimiliki bank sebagai komponen pembiayaan. Namun, hanya SSB dengan persyaratan tertentu yang dapat diperhitungkan sebagai komponen RIM, antara lain: diterbitkan oleh korporasi nonkeuangan dan memiliki peringkat setara dengan peringkat investasi.

ISTILAH	PENJELASAN
Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial	Penyempurnaan dari kebijakan rasio kredit UMKM antara lain melalui perluasan mitra bank dalam penyaluran pembiayaan inklusif, sekuritisasi pembiayaan inklusif, dan model bisnis lain dalam rangka memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif
<i>Ready to Offer</i>	Perusahaan atau entitas yang terlibat dalam penawaran umum atau transaksi pasar modal siap untuk meluncurkan Initial Public Offering (IPO) atau penawaran publik perdana.
<i>Regional Payment Connectivity (RPC)</i>	Perjanjian kerja sama konektivitas pembayaran di kawasan yang disepakati oleh Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia, Banko Sentral ng Pilipinas, Monetary Authority of Singapore, Bank of Thailand.
<i>Repurchase Agreement (Repo)</i>	Transaksi penjualan instrumen keuangan antara dua belah pihak yang diikuti dengan perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan di kemudian hari akan dilaksanakan pembelian kembali atas instrumen keuangan yang sama dengan harga tertentu yang disepakati.
Rupiah Digital	Bentuk digital mata uang Rupiah.
Sistem Pembayaran	Sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain.
<i>Spot</i>	Transaksi valas dengan penyelesaian pada hari yang sama atau maksimal dalam dua hari.
Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP)	Standar Nasional Open API Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia guna menciptakan industri sistem pembayaran yang sehat, kompetitif, dan inovatif; mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, serta keamanan dan keandalan infrastruktur sistem pembayaran; dan/atau meningkatkan praktik pasar (<i>market practice</i>) yang sehat, efisien, dan wajar dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.
<i>Straight-through</i>	Pemrosesan otomatis yang dilakukan dalam transaksi bisnis
<i>Streamlining</i>	Peningkatan efisiensi suatu proses tertentu dalam suatu organisasi
<i>Stress test</i>	Uji ketahanan.
Surat Berharga Negara	Surat berharga yang terdiri dari Surat Utang Negara dalam mata uang Rupiah dan Surat Berharga Negara Syariah dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Tim lintas instansi yang melakukan pemantauan perkembangan inflasi daerah dan mengidentifikasi berbagai permasalahan terkait pengendalian inflasi.
<i>Threshold RPLN</i>	Batas minimal atau ambang tertentu dalam hal pembiayaan langsung dari pemerintah untuk perencanaan dan pengelolaan pembiayaan proyek atau program pemerintah.
<i>Tokenization</i>	Proses digitalisasi aset nyata menjadi token yang dapat diperdagangkan di blockchain.
Transaksi <i>Inbound</i>	Transaksi keuangan yang dikirim dari luar negeri ke rekening bank di dalam negeri

ISTILAH	PENJELASAN
Transaksi <i>Outbound</i>	Transaksi keuangan yang dikirim dari rekening di dalam negeri ke luar negeri.
Transformasi kelembagaan	Transformasi yang mencakup penguatan organisasi dan proses kerja, SDM dan budaya kerja, serta digitalisasi.
Uang Elektronik	Alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang telah disetorkan terlebih dahulu.
Uang Layak Edar	Uang Rupiah asli yang memenuhi persyaratan untuk diedarkan berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
<i>Uncollateralized</i>	Transaksi yang tidak memerlukan atau tidak memiliki agunan.
<i>Underlying Asset</i>	Aset yang menjadi dasar dari instrumen finansial atau investasi.
<i>Volatile Food</i>	Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh <i>shocks</i> (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.
Wajar Tanpa Pengecualian	Pendapat wajar tanpa pengecualian, diberikan auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum dalam penyusunan laporan keuangan, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
<i>Waste to Energy</i>	Proses mengubah limbah menjadi energi yang dapat dimanfaatkan, seperti listrik, panas, atau bahan bakar.

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	PENJELASAN
3I	Integrasi, Interkoneksi, Interoperabilitas
3S	Simplifikasi, Standardisasi, dan Sistemisasi
3T	Terdepan, Terluar, dan Terpencil
3P + 1I	<i>Product, Pricing</i> , Pelaku dan Infrastruktur
4P	Perencanaan, Pemenuhan, Pengembangan, Pemeliharaan
AB3	Aku Bangga BI Bermakna
ACC-BIS	The Council dari Asian Consultative Council - Bank for International Settlement
ACCD	<i>Appointed Cross Currency Dealers</i>
AI	Artificial Intelligence
AL	Alat Likuid
AL/DPK	Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga
APUVINDO	Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia
AS	Amerika Serikat
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
ASPI	Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia
ATL	<i>Above The Line</i>
ATM	<i>Automated Teller Machine</i> /Anjungan Tunai Mandiri
ATM/D	<i>Automated Teller Machine/Deposit.</i>
BTL	<i>Below The Line</i>
BBWI	Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja
BI-ETP	Bank Indonesia - <i>Electronic Trading Platform</i>

SINGKATAN	PENJELASAN
BI-FAST	Bank Indonesia - <i>Fast Payment</i>
BI-RTGS	Bank Indonesia - <i>Real Time Gross Settlement</i>
BIS	Bank for International Settlements
BKBI	Bauran Kebijakan Bank Indonesia
BKK	Bauran Kebijakan Kelembagaan
BNM	Bank Negara Malaysia
BoP	<i>Balance of Payments</i>
BoT	Bank of Thailand
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPPU	<i>Blueprint</i> Pengembangan Pasar Uang
BPR	Business Process Reengineering
BSBI	Badan Supervisi Bank Indonesia
BSP	Bangko Sentral ng Pilipina
BSPI	<i>Blueprint</i> Sistem Pembayaran
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUSN	Bank Umum Swasta Nasional
CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
CBDC	<i>Central Bank Digital Currency</i>
CBUAE	Bank Sentral Uni Emirat Arab
CCP	<i>Central Counterparty</i>
CCyB	<i>Countercyclical Capital Buffer</i>
CKPN	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CP	<i>Consultative Paper</i>
CPIS	<i>Coordinated Portfolio Investment Survey</i>
DC	Data Center
DMP	<i>Decision Making Process</i>
DNDF	<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>
DPK	Dana Pihak Ketiga

SINGKATAN	PENJELASAN
DPR-RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DPSP	Destinasi Pariwisata Super Prioritas
DSRS	<i>Dynamic Systemic Risk Surveillance</i>
EKD	Ekonomi Keuangan Digital
EMEAP	Executives Meeting of East Asia Pacific Central Banks
ERB	Ekspedisi Rupiah Berdaulat
ETP	<i>Electronic Trading Platform</i>
ETP	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
EVP	<i>Employee Value Proposition</i>
FAQ	<i>Frequently Asked Question</i>
FATF	Financial Action Task Force
FEB	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
FEKDI	Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia
FFR	<i>Fed Funds Rate</i>
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
FK-PPPK	Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan
FSAP	<i>Financial Sector Assessment Program</i>
FSI	<i>Financial Soundness Indicators</i>
G20	Group of Twenty
GBBI	Gerakan Bangsa Buatan Indonesia
GIRU	<i>Global Investor Relation Unit</i>
GNPIP	Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
IIP	International Investment Position
IKKAT	Independensi, Konsistensi, Koordinasi, Akuntabilitas, dan Transparansi
IKN	Ibu Kota Nusantara
IKNB	Institusi Keuangan Non-Bank

SINGKATAN	PENJELASAN
IKU	Indikator Kinerja Utama
IMF	International Monetary Fund
IPK	Infrastruktur Pasar Keuangan
IndONIA	Indonesia Overnight Index Average
INDRA	<i>Integrated Analytic Data Repository and Analytic</i>
IRFCL	<i>International Reserves and Foreign Currency Liquidity</i>
IRU	<i>Investor Relation Unit</i>
IHT	<i>In House Training</i>
ISDA	<i>International Swaps and Derivatives Association</i>
ISEF	<i>Indonesia Sharia Economic Festival</i>
ISO	International Organization of Standardization
ITSK	Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (inovasi teknologi sistem keuangan)
ITSM	<i>Information Technology Service Management</i>
JIBOR	<i>Jakarta Interbank Offered rate</i>
JKD	Jaringan Komunikasi Data
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
K/L	Kementerian/Lembaga
KCBA	Kantor Cabang Bank Asing
KKI	Karya Kreatif Indonesia
KKI	Kartu Kredit Indonesia
KKI	Kerja Sama Keuangan Internasional
KKKM	Kerangka Kerja Kebijakan Moneter
KKMP	Kerangka Kerja Kebijakan Makroprudensial
KKSP	Kerangka Kerja Sistem Pembayaran
KLM	Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial

SINGKATAN	PENJELASAN
KOPERBI	Komplek Perkantoran Bank Indonesia
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUPVA BB	Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LAPS	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
LCT	<i>Local Currency Transaction</i>
LGA	Listrik-Gas-Air
LKTBI	Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
LMS	<i>Learning Management System</i>
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LRUK	Limbah Racik Uang Kertas
LSB	Lembaga Selain Bank
LU	Lapangan Usaha
MAS	Monetary Authority of Singapore
MDR	<i>Merchant Discount Rate</i>
ME FATF	<i>Mutual Evaluation by the Financial Action Task Force</i>
MKTBI	Manajemen Keberlangsungan Tugas Bank Indonesia
ML	<i>Machine Learning</i>
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
MuBI	Museum Bank Indonesia
MRBI	Manajemen Risiko Bank Indonesia
NCCD	<i>Non Centrally Cleared Derivative</i>
NK	Nota Kesepahaman
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
NPL	<i>Non Performing Loan</i>
NWGBR	<i>National Working Group on Benchmark Reform</i>

SINGKATAN	PENJELASAN
UMI	Usaha Mikro
UMi	Ultramikro
OECD	<i>Organization for Economic Co-operation and Development</i>
OG	<i>Operational Guidelines</i>
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OM	Operasi Moneter
P2DD	Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah
P2SK	Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
PADG	Peraturan Anggota Dewan Gubernur
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PCPM	Pendidikan Calon Pegawai Muda
PDB	Produk Domestik Bruto
PDG	Peraturan Dewan Gubernur
Perpres	Peraturan Presiden
Pemda	Pemerintah Daerah
PFMI	<i>Principles for Financial Market Infrastructures</i>
PII	Posisi Investasi Internasional
PIP	Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran
PJP	Penyedia Jasa Pembayaran
PKWT	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
PLM	Penyangga Likuiditas Makroprudensial
PKS	Perjanjian Kerja Sama
PMA	<i>Procurement Maturity Assessment</i>
PMK	Program Meningkatkan Kompetensi
PMK	Protokol Manajemen Krisis
PPSPM	Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

SINGKATAN	PENJELASAN
PoC	<i>Proof of Concept</i>
PSN	Proyek Strategis Nasional
PSP	Penyelenggara Sistem Pembayaran
PUR	Pengelolaan Uang Rupiah
PUVA	Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing
PQN	Pekan QRIS Nasional
QRIS	<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
QRIS TUNTAS	QRIS Tarik Tunai, Transfer, Setor Tunai
RDG	Rapat Dewan Gubernur
Repo	<i>Repurchase Agreement</i>
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
RIRU	<i>Regional Investor Relation Unit</i>
RPC	<i>Regional Payment Connectivity</i>
RPIM	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
RPLN	Rasio Pendanaan Luar Negeri
RRH	Rata-Rata Harian
SBC	<i>Structured Bilateral Cooperation</i>
SBDK	Suku Bunga Dasar Kredit
SBN	Surat Berharga Negara
SBV	State Bank of Vietnam
SDM	Sumber Daya Manusia
SEKDA	Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah
SEKI	Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia
SIAPIK	Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan
Simkrisnas	Simulasi Krisis Nasional
SKNBI	Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia
SNAP	Standar Nasional Open API

SINGKATAN	PENJELASAN
SPBI	Sistem Pembayaran Bank Indonesia
SPIP	Statistik Sistem Pembayaran dan Infrastruktur Pasar Keuangan Indonesia
SP-PUR	Sistem Pembayaran-Pengelolaan Uang Rupiah
SRBI	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
SSKI	Statistik Sistem Keuangan Indonesia
SULNI	Statistik Utang Luar Negeri Indonesia
<i>SupTech</i>	<i>Supervisory Technology</i>
SUVBI	Sukuk Valas Bank Indonesia
SVBI	Sekuritas Valas Bank Indonesia
<i>Threshold RPLN</i>	<i>Threshold Rencana Pembiayaan Langsung Nasional</i>
ToT	<i>Training of Trainer</i>
TPID	Tim Pengendalian Inflasi Daerah
TPIP	Tim Pengendalian Inflasi Pusat
TPPT	Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
UE	Uang Elektronik
UGM	Universitas Gajah Mada
UI	Universitas Indonesia
ULE	Uang Layak Edar
UMKM	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UPB	Uang Pecahan Besar
UPK	Uang Pecahan Kecil
UU	Undang-Undang
UU P2SK	Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
UYD	Uang Kartal Yang Diedarkan
Valas	Valuta Asing

SINGKATAN	PENJELASAN
VITAL	<i>Visualizing the outcomes, Theory understood, Algorithm fitted, dan Learn the meaning</i>
VF	<i>Volatile Food</i>
WB	World Bank

SINGKATAN	PENJELASAN
WTE	<i>Waste to Energy</i>
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian
yoy	<i>Year on Year</i>





Jl. MH Thamrin No. 2 Jakarta 10350
www.bi.go.id